

JURNAL

**AKUNTANSI &
MANAJEMEN**



**FILSAFAT ILMU SEBAGAI DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN AKUNTANSI
MENUJU KE ARAH PENINGKATAN KUALITAS PROFESI AKUNTAN**

Drs. Eko Widodo Lo, M.Si., Akuntan

**PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN TRANSFORMASIONAL
TERHADAP KEEFEKTIFAN PEMIMPIN, KEPUASAN BAWAHAN,
DAN UPAYA EKSTRA BAWAHAN: PENGUJIAN *AUGMENTATION HYPOTHESIS***

Drs. Tri Heru, M.Si.

**INVESTIGASI EMPIRIS PADA REAKSI PASAR
TERHADAP *PUBLIC ANNOUNCEMENTS*:
PENGUJIAN *THE EFFICIENCY HYPOTHESIS* DI *THIN MARKET***

Indah Kurniawati, SE., M.Si. dan Dra. Sinta Sudarini, MS., Akuntan

**ANALISIS KAJIAN POTENSI DAN PENGGALIAN LABA BERSIH
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN, TAHUN 2002**

Drs. Rudy Badrudin, M.Si.

**HUBUNGAN PEMBINGKAIAN INFORMASI ANGGARAN, TANGGUNG JAWAB,
DAN RESIKO PENGALAMAN TERHADAP PILIHAN KEPUTUSAN
PADA INVESTASI BERISIKO**

Frasto Biyanto, SE., M.Si.

**PENERAPAN *BALANCED SCORECARD*
SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK**

Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan dan Dra. Siti Resmi, MM., Akuntan



ISSN 0853-1269 - Akreditasi No. 118/DIKTI/Kep/2001

Rp7.500,-

Editorial Staff Jurnal Akuntansi Manajemen (JAM)

Editor in Chief

Djoko Susanto
STIE YKPN Yogyakarta

Managing Editor

Sinta Sudarini
STIE YKPN Yogyakarta

Editors

Al. Haryono Jusup
Universitas Gadjah Mada

Arief Ramelan Karseno
Universitas Gadjah Mada

Arief Suadi
Universitas Gadjah Mada

Basu Swastha Dharmmesta
Universitas Gadjah Mada

Djoko Susanto
STIE YKPN Yogyakarta

Enny Pudjiastuti
STIE YKPN Yogyakarta

Gudono
Universitas Gadjah Mada

Harsono
Universitas Gadjah Mada

Indra Wijaya Kusuma
Universitas Gadjah Mada

Jogiyanto H.M
Universitas Gadjah Mada

Mardiasmo
Universitas Gadjah Mada

Soeratno
Universitas Gadjah Mada

Su'ad Husnan
Universitas Gadjah Mada

Suwardjono
Universitas Gadjah Mada

Tandelilin Eduardus
Universitas Gadjah Mada

Zaki Baridwan
Universitas Gadjah Mada

Editorial Secretary

Rudy Badrudin
STIE YKPN Yogyakarta

Editorial Office

Pusat Penelitian STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 Fax. (0274) 486081
(<http://v2.stieykpn.ac.id/jurnal>)

DARI REDAKSI

Pembaca yang terhormat,

Selamat berjumpa kembali dengan Jurnal Akuntansi Manajemen (JAM) STIE YKPN Yogyakarta Edisi April 2003. Perubahan tampilan di halaman sampul depan luar dan dalam telah memperindah tampilan sampul JAM dan memudahkan pembaca dalam melihat judul artikel dan nama penulis. Untuk memudahkan para pembaca mengarsip dalam bentuk *file* artikel-artikel yang telah dimuat pada JAM sebelumnya, maka pembaca dapat mengakses artikel-artikel tersebut di *website* STIE YKPN Yogyakarta (<http://www.stieykpn.ac.id>). Semua itu kami lakukan sebagai konsekuensi ilmiah dengan telah Terakreditasinya JAM berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/DIKTI/Kep/2001.

Dalam JAM Edisi April 2003 ini, disajikan 6 artikel sebagai berikut: Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Pengembangan Akuntansi Menuju ke Arah Peningkatan Kualitas Profesi Akuntan; Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional Terhadap Keefektifan Pemimpin, Kepuasan Bawahan, dan Upaya Ekstra Bawahan: Pengujian *Augmentation*

Hypothesis; Investigasi Empiris pada Reaksi Pasar Terhadap *Public Announcements*: Pengujian *The Efficiency Hypothesis* di *Thin Market*; Analisis Kajian Potensi dan Penggalan Laba Bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, Tahun 2002; Hubungan Pembungkai Informasi Anggaran, Tanggung Jawab, dan Pengalaman Terhadap Pilihan Keputusan pada Investasi Berisiko; dan Penerapan *Balanced Scorecard* Sebagai Pengukur Kinerja pada Sektor Publik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada penerbitan JAM Edisi April 2003 ini. Harapan kami memudahkan artikel-artikel pada JAM tersebut dapat memberikan nilai tambah informasi bidang Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan bagi para pembaca. Selamat menikmati sajian kami pada edisi ini dan sampai jumpai pada edisi Agustus 2003 dengan artikel-artikel yang lebih menarik.

REDAKSI.

DAFTAR ISI

**FILSAFAT ILMU SEBAGAI DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN AKUNTANSI
MENUJU KE ARAH PENINGKATAN KUALITAS PROFESI AKUNTAN**

Drs. Eko Widodo Lo, SE., M.Si., Akuntan

1

**PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN TRANSFORMASIONAL
TERHADAP KEEFEKTIFAN PEMIMPIN, KEPUASAN BAWAHAN,
DAN UPAYA EKSTRA BAWAHAN: PENGUJIAN AUGMENTATION HYPOTHESIS**

Drs. Tri Heru, M.Si.

13

**INVESTIGASI EMPIRIS PADA REAKSI PASAR TERHADAP PUBLIC ANNOUNCEMENTS:
PENGUJIAN THE EFFICIENCY HYPOTHESIS DI THIN MARKET**

Indah Kurniawati, SE., M.Si. dan Dra. Sinta Sudarini, MS., Akuntan

31

**ANALISIS KAJIAN POTENSI DAN PENGGALIAN LABA BERSIH
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN, TAHUN 2002**

Drs. Rudy Badrudin, M.Si.

45

**HUBUNGAN PEMBINGKAIAN INFORMASI ANGGARAN, TANGGUNG JAWAB,
DAN RESIKO PENGALAMAN TERHADAP PILIHAN KEPUTUSAN
PADA INVESTASI BERISIKO**

Frasto Biyanto, SE., M.Si.

69

**PENERAPAN BALANCED SCORECARD
SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK**

Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan dan Dra. Siti Resmi, MM., Akuntan

81

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEEFEKTIFAN PEMIMPIN, KEPUASAN BAWAHAN, DAN UPAYA EKSTRA BAWAHAN: PENGUJIAN AUGMENTATION HYPOTHESIS

*Tri Heru *)*

ABSTRACT

Transformational leadership theory has been examined in 10 Universities in Yogyakarta using a sample technique (N = 125 lecturers). The study has examined the influence of transformational leader behaviour with head of Universities as it relates to leader effectiveness, follower satisfaction with the leader, and follower extra effort. Attitudinal and behavioral datas have been collected from lecturers about 10 of head of Universities. From those datas, the hierarchical regressions analysis show that transformational leadership are significant to the effects of transactional leadership in predicting leader effectiveness, follower satisfaction with the leader, and follower extra effort.

Keyword: Leadership, transactional leadership, transformational leadership.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan telah menjadi salah satu topik utama yang dibahas di antara para penulis manajemen selama tiga puluh tahun terakhir ini (Takala, 1996). Ini tentu saja dapat dipahami, karena bidang kepemimpinan menempati posisi sentral dalam manajemen dan kepemimpinan memiliki hubungan sebab akibat dengan kinerja organisasi (Pfeffer, 1977; Roch & Behling, 1984;

Sosik, 1997). Semakin tinggi keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan pemimpinnya, dan kemampuan pemimpin menimbulkan upaya ekstra bawahannya dalam kepemimpinannya, akan meningkatkan kinerja organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Burns (1978), terdapat dua gaya kepemimpinan yaitu transaksional dan transformasional yang merupakan dua ujung dari satu kontinum, saling melengkapi dan tidak saling meniadakan. Kepemimpinan transaksional berorientasi pertukaran antara pemimpin dan bawahannya, serta menggunakan alasan-alasan logis dalam mempengaruhi bawahannya (Kudisch, Poteet, Dobbins, Rush, & Russel, 1995). Kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi bawahan tidak hanya menggunakan alasan logis tetapi juga emosi (Bass, 1985; Koh, Steers, & Terborg, 1995). Semua pemimpin melaksanakan baik kepemimpinan transaksional maupun transformasional, tetapi dalam proporsi yang berbeda-beda (Haddock, 1989).

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang antarlain dilakukan oleh Bycio, Allen, dan Hackett (1995) menunjukkan bahwa dimensi variabel transformasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan pemimpinnya, dan upaya ekstra bawahannya. Penelitian yang dilakukan oleh Koh, Steers, dan Terborg (1995) menunjukkan bahwa penambahan dimensi

*) Drs. Tri Heru, M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

variabel transformasional ke dalam persamaan dimensi variabel transaksional meningkatkan signifikansi pengaruh kepemimpinan transaksional dalam memprediksi *commitment*, *organizational citizenship*, dan kepuasan para guru, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan prestasi para muridnya.

Penelitian ini bertujuan menguji *augmentation hypothesis*, yaitu pengujian terhadap pengaruh penambahan dimensi variabel transformasional (*charisma*, *inspiration*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration*) ke dalam persamaan dimensi variabel transaksional (*contingent reward*, *management by exception*) dalam menjelaskan variansi variabel keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan pemimpin, dan upaya ekstra bawahan.

TINJAUANTEORI

Kepemimpinan Transaksional

Banyak riset kepemimpinan yang telah dilakukan terfokus pada pengujian rasional, berorientasi pertukaran atau transaksional antara pemimpin dan bawahannya (Kudisch, Poteet, Dobbins, Rush, & Russel, 1995). Kepemimpinan transaksional digambarkan sebagai: (1) mempertukarkan sesuatu yang berharga bagi yang lain antara pemimpin dan bawahannya; (2) intervensi yang dilakukan sebagai proses organisasional untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan; atau (3) reaksi atas tidak tercapainya standar yang telah ditentukan (Avolio, Waldman, & Einstein, 1988; Bycio, Allen, & Hackett, 1995; Steers, Porter, & Bigley, 1996; Masi & Robert, 2000). Pada dasarnya kepemimpinan transaksional mirip dengan *path-goal theory* (Evans, 1974), dan mencakup semua pendekatan situasional, yang antara lain dikemukakan oleh Fidler (1967), Vroom dan Yetton (1973), dan Yukl (1989), yang lebih menekankan pada pendekatan rasional (Metcalf & Metcalfe, 2000). Oleh karena itu, pemimpin transaksional harus memiliki informasi yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan bawahannya, harus menetapkan tujuan yang jelas, harus menjelaskan keterkaitan antara kinerja dan penghargaan, dan harus memberikan balikan yang konstruktif untuk mempertahankan bawahan pada tugasnya (Jung & Avolio, 1999).

Pada hubungan transaksional, pemimpin menjanjikan dan memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berkinerja baik, serta mengancam dan mendisiplinkan bawahannya yang berkinerja buruk. Apakah penghargaan yang dijanjikan atau terhindarnya dari hukuman itu mampu memotivasi bawahannya untuk meningkatkan kinerjanya? Hal ini tergantung pada apakah pemimpinnya mampu mengendalikan penghargaan dan hukuman tersebut, serta apakah bawahan menginginkan penghargaan atau takut terhadap hukuman tersebut (Bass, 1990a).

Kepemimpinan Transformasional

Menurut Bass (1985); Koh, Steers, dan Terborg (1995), saat ini hubungan antara pemimpin dan bawahan telah berubah dan bergeser ke pendekatan transformasional. Pendekatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi bawahan tidak hanya melalui penggunaan alasan-alasan logis, tetapi juga melalui penggunaan emosi. Pemimpin transformasional tidak hanya harus mengetahui kebutuhan dan keinginan bawahannya, tetapi juga: (1) harus berusaha mengungkit kebutuhan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal berprestasi, otonomi, dan afiliasi baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan pekerjaan; (2) harus meningkatkan kesadaran bawahan tentang arti pentingnya pencapaian hasil yang bernilai dan strategi untuk mencapainya; (3) serta memotivasi bawahan untuk lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi.

Kepemimpinan transformasional menekankan pada pendekatan rasional dan emosi dalam hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Kepemimpinan ini, selain berbeda dengan gaya kepemimpinan transaksional, juga berbeda dengan kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik mentransformasikan bawahan hanya melalui pendekatan emosi dan kedekatan yang erat kepada pemimpinnya, sehingga karisma memang dibutuhkan tetapi tidak cukup sebagai syarat dalam kepemimpinan transformasional (Burns, 1978; Bass, 1985; Avolio, Waldman, & Einstein, 1988). Perbedaan karakteristik kepemimpinan transaksional dan transformasional telah dikembangkan secara ringkas oleh Bass (1990) dalam Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional

KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL
<p>Contingent reward: kontrak pertukaran penghargaan untuk usaha, penghargaan yang dijanjikan untuk kinerja yang baik, mengakui pencapaian.</p> <p>Active management by exception: melihat dan mencari penyimpangan dari aturan atau standar, mengambil tindakan perbaikan.</p> <p>Passive management by exception: intervensi hanya jika standar tidak tercapai.</p> <p>Laissez-faire: melepaskan tanggung-jawab, menghindari pengambilan keputusan</p>
KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
<p>Charisma: memberikan visi dan misi yang masuk akal, menimbulkan kebanggaan, menimbulkan rasa hormat dan percaya.</p> <p>Inspiration: mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya, mengekspresikan tujuan penting dengan cara yang sederhana</p> <p>Intellectual stimulation: meningkatkan intelegensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara teliti.</p> <p>Individualized consideration: memberikan perhatian pribadi, melakukan pelatihan dan konsultasi kepada setiap bawahan secara individual</p>

Sumber: Bass (1990), hal 22.

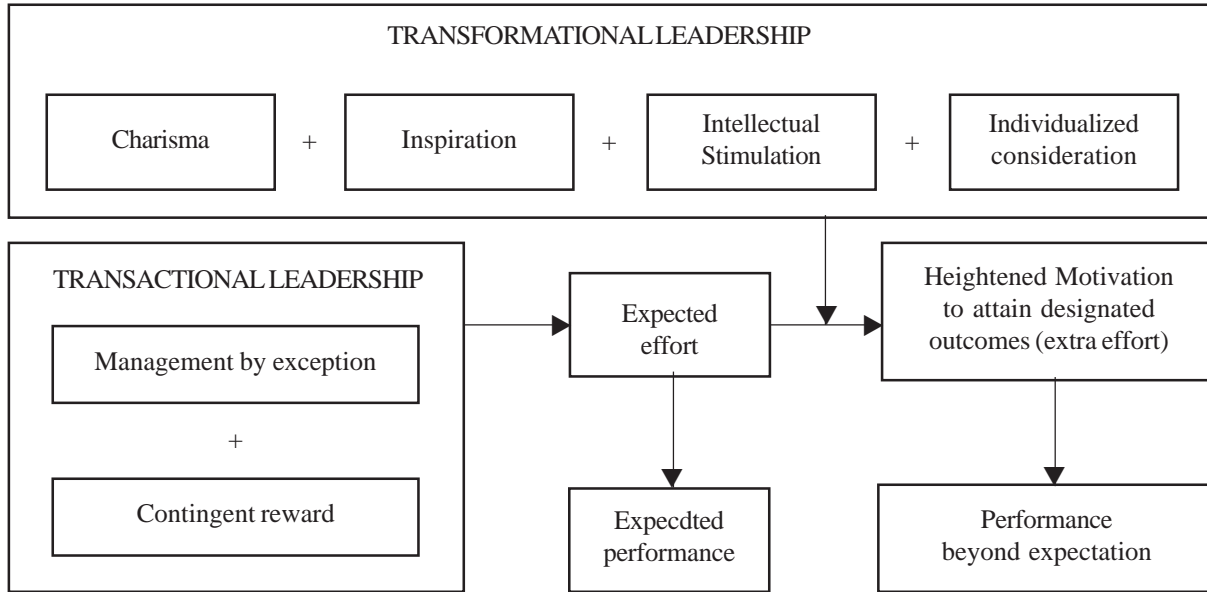
Studi kepemimpinan telah ditandai dengan kuatnya perhatian pada kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan komitmen, upaya dan kesediaan bawahan mengambil risiko dalam mendukung organisasi atau misinya di atas minimal yang diharapkan (Behling & McFillen, 1996). Beberapa hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa proporsi penggunaan gaya kepemimpinan yang cenderung lebih menekankan pada kepemimpinan transformasional, menghasilkan *augmentation effect* yang lebih signifikan dan positif terhadap keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan pemimpin, dan upaya ekstra bawahan (Deluga, 1988; Bycio, Allen, & Hackett, 1995; Koh, Steers, & Terborg, 1995; Kirkpatrick & Locke, 1996; Podsakoff, McKenzie, & Bommer, 1996; Sosik, 1997). Untuk lebih memperjelas, Bass dan Avolio (1990) telah mengembangkan model, yaitu Mode 1

Augmentation kepemimpinan transaksional dan transformasional, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Model Augmentation Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional

Pada model yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1990) ini, dijelaskan bahwa kepemimpinan transaksional yang terdiri dari dua dimensi variable, yaitu *contingent reward* dan *managment by exception*. Kepemimpinan tersebut dapat menghasilkan upaya (*effort*) dan kinerja seperti yang diharapkan; namun bila ditambah empat dimensi variabel kepemimpinan tranformasional yaitu: *charisma*, *inspiration*, *intellectual stimulation*, dan *individualized Individualized consideration* sebagai prediktor, akan menghasilkan peningkatan hasil dan kinerja lebih dari yang ditetapkan.

Gambar 1
The Augmentation Model of Transactional and Transformational Leadership

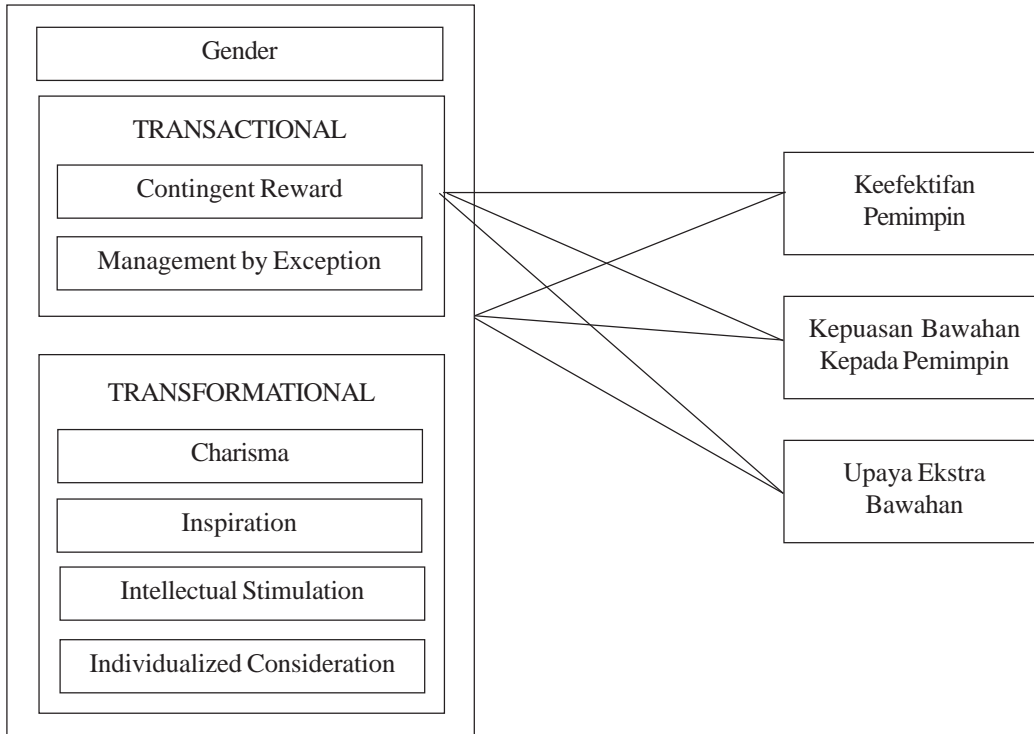


Sumber: Bass and Avolio (1990), hal 6.

Penelitian ini menguji *augmentation effect*, dengan dimensi variabel transformasional ditambahkan sebagai prediktor ke dalam persamaan dimensi variabel transaksional, dalam menjelaskan variansi variabel keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan pemimpin, dan upaya ekstra bawahan. Dimensi variabel

transaksional dan transformasional diberlakukan sebagai variabel independen, dan keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan kepada pemimpin, serta upaya ekstra bawahan diberlakukan sebagai variabel dependen, seperti ditunjukkan dalam gambar 2.

Gambar 2
Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional Terhadap Keefektifan Pemimpin, Kepuasan Bawahan Kepada Pemimpin, dan Upaya Ekstra Bawahan Gender



Gambar 2 menunjukkan tiga tahapan pengujian *augmentation hypothesis* dalam penelitian ini. Pertama, dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *gender* berpengaruh pada karakteristik perilaku kepemimpinan (wanita lebih transformasional daripada pria) (Rosener, 1990; Komives, 1990; Sparrow & Rigg, 1993; Druskat, 1994; Alimo-Metcalve, 1995; Bass, Avolio & Atwater, 1996), maka dalam penelitian ini *gender* difungsikan sebagai variabel kontrol. Pada tahap pertama, dilakukan pengujian pengaruh dimensi variabel *gender* (pria, wanita) terhadap variabel dependen. Kedua, pengujian pengaruh dimensi variabel *gender* dan dimensi variabel transaksional terhadap variabel dependen. Ketiga, pengujian pengaruh dimensi variabel *gender*, dimensi variabel transaksional, dan dimensi variabel transformasional terhadap variabel dependen.

Hipotesis

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dengan menambahkan dimensi variabel transformasional sebagai prediktor dalam persamaan transaksional, meningkatkan proporsi variansi yang dapat dijelaskan pada keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan dengan pemimpin, dan upaya ekstra bawahan melebihi yang dapat dijelaskan oleh dimensi variabel transaksional sendiri (Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
 H1: Tambahkan dimensi variabel kepemimpinan transformasional pada dimensi variabel kepemimpinan transaksional akan dapat menjelaskan proporsi variansi keefektifan pemimpin melebihi yang dapat dijelaskan oleh

dimensi variabel kepemimpinan transaksional sendiri.

- H2: Tambahkan dimensi variabel kepemimpinan transformasional pada dimensi variabel kepemimpinan transaksional akan dapat menjelaskan proporsi variansi kepuasan bawahan kepada pemimpin melebihi yang dapat dijelaskan oleh dimensi kepemimpinan transaksional sendiri.
- H3: Tambahkan dimensi variabel kepemimpinan transformasional pada dimensi variabel kepemimpinan transaksional akan dapat menjelaskan proporsi variansi upaya ekstra bawahan melebihi yang dapat dijelaskan oleh dimensi variabel kepemimpinan transaksional sendiri.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemimpin dan staf pengajar tetap di lembaga pendidikan tinggi swasta. Metoda pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang diambil adalah pimpinan dan staf pengajar tetap di 10 perguruan tinggi swasta Kopertis Wilayah V DIY yang memiliki bidang studi ekonomi. Untuk kepentingan analisis regresi, jumlah sampel yang baik adalah 10 kali atau lebih jumlah variabel penelitian (Roscoe, 1975), jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 10, maka sampel dalam penelitian ini adalah minimum 100 staff pengajar tetap yang tersebar di 10 PTS dan memberikan penilaian pada pimpinannya masing-masing.

Pengumpulan Data

Data primer, diperoleh melalui penyebaran *multifactor leadership questionnaire* (MLQ) kepada responden. Informasi yang diperoleh melalui penyebaran MLQ tersebut adalah: (1) penilaian responden terhadap karakteristik perilaku kepemimpinan transaksional dan transformasional pimpinannya, dan respon responden atas hasil penilaiannya tersebut; dan (2) *gender* pimpinan yang dinilai. Jumlah MLQ yang disebarkan 300 eksemplar. Untuk menghindari kelemahan survei surat (Cooper &

Emory, 1995), peneliti secara langsung menangani penyebarannya serta memberikan penjelasan singkat sebelum responden menjawab pertanyaan dalam kuesioner.

Definisi Variabel

Variabel karakteristik kepemimpinan transaksional

Dimensi variabel yang disertakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut, yang didefinisikan menurut Bass (1990a):

(1) *Contingent reward* adalah karakteristik kepemimpinan yang menekankan pada pertukaran antara penghargaan dan upaya, penghargaan yang dijanjikan hanya untuk kinerja yang baik, dan penghargaan yang diberikan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi yang dicapai; (2) *Active management by exception* adalah kepemimpinan yang menekankan pada upaya menemukan penyimpangan dari aturan atau standar, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi; (3) *Passive management by exception* adalah kepemimpinan yang menekankan pada upaya melakukan perbaikan hanya jika standar yang ditetapkan benar-benar tidak tercapai. Sesuai dengan penelitian terdahulu, dimensi variabel *active management by exception* dan *passive management by exception* disatukan ke dalam satu dimensi variabel *management by exception*.

Variabel karakteristik kepemimpinan transformasional (Bass, 1990a):

(1) *Charisma* adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh visi dan misi yang masuk akal, mampu menimbulkan kebanggaan, rasa hormat, dan kepercayaan bawahannya; (2) *Inspiration* adalah kepemimpinan yang mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya, dan mengekspresikan tujuan penting dengan cara yang sederhana kepada bawahannya; (3) *Intellectual stimulation* adalah kepemimpinan yang mampu meningkatkan intelegensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara teliti kepada bawahannya; (4) *Individualized consideration* adalah kepemimpinan yang mau memberikan perhatian kepada bawahan secara pribadi

dan individual, serta mau melakukan konsultasi dan pelatihan kepada bawahan secara pribadi dan individual.

Variabel keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan kepada pemimpin, upaya ekstra bawahan

(1) Keefektifan pemimpin adalah semua kewajiban yang dilaksanakan pemimpin dapat dicapai dengan baik menurut penilaian bawahan; (2) Kepuasan bawahan kepada pemimpin adalah kesesuaian antara perilaku kepemimpinan yang diharapkan bawahan dan perilaku kepemimpinan pemimpin; (3) Upaya ekstra bawahan adalah perilaku bawahan dalam melaksanakan tugas kewajibannya melebihi yang diharapkan manajemen. Variabel kontrol

Variabel kontrol adalah variabel lain yang mungkin ikut mempengaruhi variabel dependen dalam hubungannya dengan variabel independen (Sekaran, 1992). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa perbedaan *gender* menghasilkan kecenderungan perilaku kepemimpinan yang berbeda (wanita cenderung lebih transformasional daripada pria). Oleh karena itu, di dalam penelitian ini *gender* difungsikan sebagai variabel kontrol.

Pengukuran Variabel

Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: (1) kepemimpinan transaksional meliputi dua dimensi variabel, yaitu *contingent reward*, diukur dengan 7 item pertanyaan (misal, pemimpin saya memberikan apa yang saya inginkan sebagai penukar dari dukungan yang saya berikan kepadanya), dan *management by exception*, diukur dengan 6 item pertanyaan (misal, pemimpin saya selalu puas bila saya melaksanakan pekerjaan saya dengan cara yang sama); (2) kepemimpinan transformasional, yang meliputi empat dimensi variabel, yaitu *charisma*, diukur dengan 10 item pertanyaan (misal, pemimpin saya membuat saya senang bergabung dengannya), *inspiration*, diukur dengan 10 item pertanyaan (misal, pemimpin saya menyampaikan arti pentingnya tujuan dengan cara yang sederhana), *intellectual stimulation*, diukur dengan 10 item pertanyaan (misal, pemimpin saya memperkenankan

saya meninjau persoalan lama dengan cara baru), *individualized consideration*, diukur dengan 10 item pertanyaan (mis. pemimpin saya memberikan konsultasi kepada siapapun yang membutuhkan). Semua ini diukur dengan menggunakan MLQ yang dikembangkan oleh Bass (1985), pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan seberapa sering pemimpin menunjukkan karakteristik perilaku sebagaimana digambarkan dalam kuesioner, dengan menggunakan 5 skala poin dan skor sebagai berikut: 0 = tidak pernah; 1 = jarang; 2 = kadang-kadang; 3 = sering; dan 4 = selalu.

Variabel dependen

Variabel dependen terdiri dari tiga dimensi variabel: (1) *leader effectiveness*, diukur dengan 4 item pertanyaan (misal, sejauh mana keefektifan pemimpin dalam pertemuan yang diperlukan organisasi) yang dinilai berdasarkan 5 skala poin (dari tidak efektif s/d ekstrem efektif) dan skor (dari 0 s/d 4); (2) *follower satisfaction with the leader*, diukur dengan 2 item pertanyaan (misal, secara keseluruhan, sejauh mana kepuasan anda pada superior anda) yang dinilai berdasarkan 5 skala poin (dari sangat tidak puas s/d sangat puas) dan skor (dari 0 s/d 4); dan (3) *follower extra effort*, diukur dengan 3 item pertanyaan (misal, optimisme dan antusiasme saya dapat meningkat karena sesuatu hal dari pemimpin saya) yang dinilai berdasarkan 5 skala poin (dari tidak pernah s/d selalu) dan skor (dari 0 s/d 4). Semua ini sesuai dengan yang tertera dalam MLQ yang dikembangkan oleh Bass (1985).

Variabel kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini hanya mencakup satu dimensi variabel yaitu *gender*. Untuk kepentingan pengukuran, maka variabel ini diperlakukan sebagai variabel *dummy* dengan memberikan nilai 1 untuk pemimpin pria dan nilai 0 untuk wanita.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sampel

Jumlah kuesioner yang disebarkan 300 eksemplar dan yang kembali 146 eksemplar (*response rate* 46 %), 21 eksemplar tidak layak untuk diproses lebih lanjut,

sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini 125 staf pengajar tetap. Komposisi *gender* pemimpin yang dinilai 66% pria, dan 34 % wanita. Pengalaman kerja responden minimal 2 tahun, dan sebagian besar sarjana ekonomi serta beberapa telah menyelesaikan program studi strata dua. Pimpinan lembaga yang dinilai telah menduduki jabatannya minimal selama 2 tahun.

Hasil Analisis Reliabilitas

Hasil analisis interkorelasi menunjukkan bahwa arah hubungan antara dimensi variabel transformasional dengan variabel dependen positif signifikan ($p < 0,01$), hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Arah hubungan antara *contingent reward* dengan variabel dependen positif signifikan ($p < 0,01$), hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1990). Arah hubungan antara *management by exception* dengan variabel dependen positif tidak signifikan. Sedangkan arah hubungan *gender* dengan variabel dependen tidak signifikan.

Nilai koefisien reliabilitas pada setiap dimensi variabel atau nilai reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah antara 0,83 dan 0,88 sehingga dapat dikatakan baik karena lebih besar dari 0,7 (Sekaran, 1992). Secara keseluruhan hasil analisis reliabilitas ini terlampir).

Hasil Analisis Regresi Hirarkis

Menurut Cohen dan Cohen (1975) dalam Seltzer dan Bass (1990), analisis regresi hirarkis sangat berguna untuk menguji tambahan variansi yang dapat dijelaskan pada variabel dependen pada setiap penambahan variabel independen ke dalam persamaan. Penambahan beberapa dimensi variabel independen secara simultan dapat membantu mengatasi masalah multikolinearitas yang terjadi di antara variabel independen dalam berinterkorelasi.

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi hirarkis yang dilakukan untuk setiap variabel dependen dapat dilihat pada lampiran artikel ini.

Keefektifan pemimpin

Gender dimasukkan ke dalam persamaan regresi hasilnya tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak dapat menjelaskan proporsi variansi ($R\ square = 0,00$;

$p > 0,05$) pada variabel dependen. Dimensi variabel transaksional secara simultan ditambahkan ke dalam persamaan regresi, hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan proporsi variansi yang dapat menjelaskan variabel dependen ($D\ R\ square = 0,22$; perubahan $F = 11,14$; $p < 0,05$). Selanjutnya, dimensi variabel transformasional secara simultan ditambahkan dalam persamaan, hasilnya terjadi peningkatan secara signifikan proporsi variansi yang dapat dijelaskan pada variabel dependen ($D\ R\ square = 0,32$; perubahan $F = 8,42$; $p < 0,05$). Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Hasil analisis mendukung hipotesis pertama (H1).

Kepuasan bawahan pada pemimpin

Gender dimasukkan ke dalam persamaan regresi, hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh secara signifikan atau variabel *gender* tidak dapat menjelaskan proporsi variansi pada variabel dependen ($R\ square = 0,00$; $p > 0,05$). Dimensi variabel transaksional secara simultan ditambahkan dalam persamaan regresi, hasilnya terjadi peningkatan proporsi variansi yang dapat menjelaskan variabel dependen secara signifikan ($D\ R\ square = 0,17$; perubahan $F = 8,39$; $p < 0,05$). Selanjutnya, dimensi variabel transformasional ditambahkan dalam persamaan secara simultan, hasilnya terjadi peningkatan proporsi variansi yang dapat dijelaskan pada variabel dependen secara signifikan ($D\ R\ square = 0,34$; perubahan $F = 8,88$; $p < 0,05$). Hal ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Hasil analisis mendukung hipotesis ke dua (H2).

Upaya ekstra bawahan

Gender dimasukan ke dalam persamaan regresi, hasilnya tidak berpengaruh atau tidak dapat menjelaskan proporsi variansi pada variabel dependen secara signifikan ($R\ square = 0,01$; $p > 0,05$). Dimensi variabel transaksional ditambahkan dalam persamaan, hasilnya terjadi peningkatan proporsi variansi yang dapat menjelaskan variabel dependen secara signifikan ($D\ R\ square = 0,15$; perubahan $F = 7,24$; $p < 0,05$). Selanjutnya, dimensi variabel transformasional ditambahkan dalam persamaan regresi, hasilnya terjadi

peningkatan proporsi variansi yang dapat dijelaskan pada variabel dependen secara signifikan ($D R square = 0,45$; perubahan $F = 17,24$; $p < 0,05$). Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Hasilnya mendukung hipotesis ke tiga (H3). Secara keseluruhan hasil analisis regresi hirarkis ini terlampir.

Pembahasan

Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Bycio, Allen, & Hackett, 1995). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi variabel transformasional menghasilkan *augmentation effect* dimensi variabel transaksional terhadap variabel dependen secara signifikan. Hal ini berarti bahwa pemimpin PTS yang hanya berperilaku transformasional dalam kepemimpinannya, dinilai oleh bawahannya (*lecturer*) lebih efektif, lebih memuaskan, dan lebih mampu menimbulkan upaya ekstra bawahannya tersebut daripada yang berperilaku transaksional dalam kepemimpinannya. Implikasi yang muncul kemudian adalah: dapatkah ketrampilan kepemimpinan transformasional itu dilatih dan digunakan sebagai dasar seleksi calon pemimpin? (Koh, Steers, & Terborg, 1995; Bass, 1990a; Parry, 2000). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Howell & Frost, 1989; Bass, 1990a; Parry, 2000) menunjukkan bahwa ketrampilan itu dapat dilatih dan dapat digunakan sebagai dasar seleksi calon pemimpin.

Pengaruh *gender* terhadap variabel dependen adalah negatif tidak signifikan terhadap keefektifan pemimpin, dan kepuasan bawahan kepada pemimpin, serta positif tidak signifikan terhadap upaya ekstra bawahan. Artinya peran *gender* sebagai prediktor relatif sangat kecil yang kemungkinan disebabkan oleh: (1) kultur yang tidak mempersoalkan *gender* dalam kepemimpinan; dan (2) jumlah sampel pemimpin wanita yang relatif sedikit, sehingga tidak mampu mencerminkan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Pada hasil penelitian ini, terdapat dimensi variabel transformasional yang tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu (1) hubungan pengaruh *charisma* terhadap variabel dependen yang positif tidak signifikan; (2) hubungan pengaruh *intellectual stimulation* terhadap variabel dependen yang negatif signifikan. Kemungkinan penyebabnya adalah pertama,

perbedaan kultur dari sampel penelitian (perawat di Amerika dan staf pengajar di Indonesia). Perbedaan kultur memungkinkan terjadinya persepsi yang tidak bisa membedakan setiap item pertanyaan yang diajukan atau setiap item pertanyaan yang diajukan tidak ada bedanya satu sama lain (perawat Amerika bisa membedakan setiap item pertanyaan yang diajukan, sedangkan staf pengajar Indonesia tidak bisa membedakan) (Koh, Steers, & Terborg, 1995). Dengan kata lain, perbedaan kultur menyebabkan perbedaan bobot penilaian terhadap satu atau lebih dimensi variabel yang sama (Kuchinke, 1999). Kedua menurut, hasil penelitian sebelumnya (Seltzer, Numerof, & Bass, 1989 dalam Seltzer & Bass, 1990), *intellectual stimulation* sangat erat kaitannya dengan *charisma*, dan mengandung arti pemimpin menekan bawahan untuk menggunakan alasan pendukung yang rasional dan riil dalam berpendapat, sehingga dimungkinkan menimbulkan pengalaman yang negatif bagi bawahan dan menimbulkan hubungan pengaruh yang negatif terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hubungan pengaruh dimensi transaksional dalam penelitian ini adalah positif tidak signifikan terhadap variabel dependen. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Bycio, Allen, & Hackett, 1995).

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Simpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah menguji *augmentation hypothesis* yang menyatakan bahwa, dengan menambahkan dimensi variabel transformasional ke dalam persamaan dimensi variabel transaksional akan menjelaskan proporsi variansi keefektifan pemimpin, kepuasan bawahan kepada pemimpin, dan upaya ekstra bawahan melebihi yang dapat dijelaskan oleh dimensi variabel transaksional sendiri. Hasil analisis penelitian ini mendukung *augmentation hypothesis* tersebut. Jadi, meskipun pada masa yang lalu pendekatan transaksional mendominasi pengukuran perilaku kepemimpinan, namun hasil penelitian ini mendukung arti pentingnya penambahan dimensi variabel transformasional untuk memprediksi dan memahami kepemimpinan secara lebih baik.

Keterbatasan

Menurut Seltzer dan Bass (1990), di dalam organisasi, seorang pemimpin di samping berpengaruh pada bawahan sebagai individu juga berpengaruh pada bawahan sebagai kelompok. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini mengasumsikan hubungan pengaruh antara pemimpin dan bawahan sebagai kelompok, tidak mencakup hubungan pengaruh antara pemimpin dan bawahan sebagai individu. Penelitian yang akan datang sebaiknya dilengkapi dengan metoda yang dapat menjelaskan hubungan pengaruh antara pemimpin dan bawahan sebagai individu, hal ini penting untuk menghindari adanya bias persepsi terhadap hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan di dalam organisasi *non-profit* (PTS) dan bawahan yang dimaksudkan adalah karyawan edukatif (staf pengajar) saja, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada organisasi yang mencari laba dan bawahan secara keseluruhan (baik edukatif maupun nonedukatif).

Implikasi

Implikasi hasil penelitian ini terhadap kepemimpinan adalah bahwa seorang pemimpin yang lebih cenderung

berperilaku transformasional dalam kepemimpinannya, akan lebih efektif, lebih memuaskan bawahan, dan lebih mampu menimbulkan upaya ekstra bawahan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Implikasi hasil penelitian ini terhadap penelitian mendatang dalam topik yang sama adalah bahwa: 1) beberapa item pertanyaan dalam MLQ memiliki pengertian yang ambigu, khususnya dalam konteks lintas kultural, sehingga satu item pertanyaan di dalam satu dimensi variabel dapat dipersepsikan sama dengan satu item pertanyaan di dalam dimensi variabel yang lain oleh responden (Koh, Steers, & Terborg, 1995); 2) metoda yang digunakan dalam penelitian yang akan datang hendaknya dilengkapi dengan metoda yang dapat menjelaskan hubungan pengaruh pemimpin dan bawahan sebagai individu untuk menghindari adanya bias persepsi terhadap hasil penelitiannya.

Implikasi hasil penelitian ini terhadap pelatihan, pengembangan, dan seleksi calon pemimpin adalah bahwa orientasi dan paradigma pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, serta seleksi calon pemimpin bergeser ke arah kepemimpinan transformasional. Karena, ketrampilan kepemimpinan transformasional dapat diajarkan dan digunakan sebagai dasar seleksi (Howel & Forst, 1989; Bass, 1990a; Parry, 2000).

REFERENSI

Avolio, B.J., Waldman, D.A., & Einstein, W.O. 1988. Transformational leadership in a management games simulation: Impacting the bottom line. *Group & Organization Studies*, 13 : 59-80.

Avolio, B.J., Bass, B.M. 1987. Charisma and beyond. In J. G. Hunt, B.R., Baliga, H.P., Dachler, & C.A. Schriesheim. Ed. *Emerging leadership vitas*. Boston: Lexington Books.

Avolio, B.J., Bass, B.M. 1988. *An alternative strategy for reducing biases in leader*

ship ratings. Paper presented at the national meeting of the Academy of Management, Anaheim, CA.

Algifari, 2000. *Analisis regresi: Teori, kasus, dan solusi*, ed. 2. Yogyakarta: BPFE

Alimo-Metcalf, B. 1995. An investigation of female and male constructs of leadership and empowerment. *Women in Management Review*, 10: 3-8.

Bass, B.M. 1990a. From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. *Journal of Organization Dynamics*, 18: 19-31.

- Bass, B.M. 1990b. Transformational Leadership: Beyond Initiation and Consideration. *Journal of Management*, 16: 693
- Bass, B.M. 1985. *Leadership and performance beyond expectation*. New York: Free Press.
- Bass, B.M., & Avolio, B.J. 1994. *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Bass, B.M., Avolio, B.J., & Atwater, L.E. 1996. The transformational and transactional leadership of men and women. *Journal of Applied Psychology: An International Review*, 45: 5-34.
- Bass, B. M. 1998. *Transformational leadership: Industrial, military, and educational impact*. Mahwah, New Jersey: LEA.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. 1990. *Transformational leadership development: Manual for the multifactor leadership questionnaire*. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, Inc.
- Behling, O., & McFillen, J.M. 1996. A Syncretical model of charismatic/transformational leadership. *Group & Organization Management*, 21: 163-191.
- Burns, J.M. 1978. *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Bycio, P., Allen, J. S., & Hackett, R. D. 1995. Further assessment of Bass's (1985) conceptualization of transactional and transformational leadership. *Journal of Applied Psychology*, 80 : 468-478.
- Cooper, D.R. & C. William Emory. 1995. *Business Research Methodes*. Fifth Edition. Chicago: Richard D. Irwin, Inc.
- Cardona, P. 2000. Transcendental leadership. *Leadership & Organization Development Journal*, 21 : 1-8.
- Crouch, A. G., & Yetton, P. 1987. Manager behavior, leadership style, and subordinate performance: An empirical extension of the Vroom-Yetton conflict rule. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 19: 384-396.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. 1987. Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. *Academy of Management Review*, 12: 637-647.
- Dubinsky, A.J., Yammarino, F.J., & Jolson, M.A. 1995. An Examination of linkages between personal characteristics and dimensions of transformational leadership. *Journal of Business and Psychology*, 9 : 315-335.
- Deluga, R.J. 1988. Relationship of transformational and transactional leadership with employee influencing strategies. *Group & Organization Studies*, 13 : 456-467.
- Druskat, V.U. 1994. Gender and leadership style: Transformational and transactional leadership in the Roman Catholic Church. *Leadership quarterly*, 5 : 99-119.
- Dansereau, F., Graen, G., & Hage, W.J. 1975. A vertical dyad linkage approach to leadership in formal organization. *Organizational Behavior and Human Performance*, 13: 46-78.
- Downton, R. J. 1973. *Rebel Leadership: Commitment and charisma in a revolutionary process*. New York: Free Press.
- Direktorat Perguruan Tinggi Swasta. 1998/1999. *Direktorat Perguruan Tinggi Swasta*

Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Evans, M.G. 1974. Extensions of a path-goal theory of motivation. *Journal of Applied Psychology*, 59: 172-178.

Fleishman, E.A., & Harris, E.P. 1962. Patterns of leadership behavior related to employee grievances and turnover. *Journal of Personnel Psychology*, 15: 43-56.

Fiedler, F.E. 1964. A contingency model of leadership effectiveness. In L. Berkowitz (Ed.). *Advances in experimental social psychology*, Vol. 1. New York: Academic Press.

Fiedler, F.E. 1967. *A theory of leadership effectiveness*. New York: McGraw-Hill.

Fiedler, F. E. 1978. The contingency model and the dynamics of the leadership process. In L. Berkowitz (Ed.). *Advances in experimental social psychology*. Vol. 11. New York: Academic Press.

Filley, A. C., House, R. J., & Kerr, S. 1976. *Managerial process and organizational behavior*. 2nd ed. Glevview, Ill.: Scott, Foresman.

Field, R. H. G, Read, P.C., & Louviere, J. J. 1990. The effect of situation attributes on decision making choice in the Vroom-Jago model of participation in decision making. *Leadership Quarterly*, 1: 165-176.

Field, R. H. G, Wedley, W. C., & Hayward, M. W. J. 1989. Criteria used in selecting Vroom-Yetton decision styles. *Canadian Journal of Administrative Science*, 6: 18-24.

Field, R. H. G. 1979. A critique of the Vroom-Yetton contingency model og leadership

behavior. *Academy of management Review*, 4: 249-257.

Graen, G., Orris, J.B., & Alvares, K.M. 1971. Contingency model of effectiveness: Some experimental results. *Journal of Applied Psychology*, 55: 196-201.

Huges, Ginnett, & Curphy. 1999. *Leadership: Enhancing the lessons of experience*. Boston: Mcgraw-Hill, Inc.

Haddock, C.C. 1989. Transformational leadership and the employee discipline process. *Hospital & Health Services Administration Journal*, 34 : 185-194.

Hollander, E.P. 1978. *Leadership Dynamics: A Practical Guide to Effective Relationship*. New York: Free Press.

House, R. J. 1971. A path-goal theory of leader effectiveness. *Administrative Science Quarterly*, 16: 321-339.

House, R. J., & Dessler, G. 1974. The path-goal theory of leadership: Some post hoc and priori tests. In J. Hunt & L. Larson (Eds.). *Contingency approaches to leadership*. Carbondale Ill.: Southern Illinois Press.

House, R. J., & Mitchell, T. R. 1974. Path-goal theory of leadership. *Journal of contemporary Business*. 3: 81-97.

House, R. J. 1977. A 1976. Theory of charismatic leadership. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.). *Leadership: The cutting edge*. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press.

Howell, J.M. & Frost, P. 1989. A laboratory study of charismatic leadership. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 43: 243-269.

- Ichikawa, A., 1993. Leadership as a form of culture: Its present and future state in Japan. *International Review of Strategic Management Journal*, 11: 473-480.
- Invik, J. 1986. Path-goal theory of leadership: A metta-analysis. Proceedings, Academy of Management, Chicago, 189-192.
- Jung, D.I., & Avolio, B.J. 1999. Effects of leadership style and followers' cultural orientation on performance in group and individual task conditions. *Academy of Management Journal*, 42 : 208-218.
- Kelloway, E.K. & Barling, J. 2000. What we have learned about developing transformational leaders. *MCB Leadership & Organization Development Journal*, 21: 1-10.
- Komives, S.R. 1991. The relationship of hall directors transformational and transactional leadership to select resident assistent outcomes. *Journal of College Student Development*, 32: 509-15.
- Koh, W.L., Steers, R.M., & Terborg, J.R. 1995. The effects of transformational leadership on teacher attitudes and student performance in Singapore. *Journal of Organizational Behavior*, 16: 319-333.
- Kudisch, J.D., Poteet, M.L., Dobbins, G.H., Rush, M.C., & Russell, J.E.A. 1995. Expert power, referent power, and charisma: Toward the resolution of a theoretical debate. *Journal of Business Psychology*, 10: 177-195.
- Kirkpatrick, S.A., & Locke, E.A. 1996. Direct and indirect effects of three corecharismatic leadership components on performance and attitudes. *Journal of Applied Psychology*, 81 : 36-51.
- Kuchinke, P.K. 1999. Leader and culture: Work-related value and Leadership style among one company's U.S. and German telecommunication employees. *Human Resource Development Quarterly*, 10 : 135-154.
- Komaki, J.L. 1986. Toward effective supervision: An operant analysis and comparison of managers at work. *Journal of Applied Psychology*, 71: 270-279.
- Kerr, S., & Harlan, A. 1973. Predicting the effects of leadership training and experience from the contingency model: Some remaining problems. *Journal of Applied Psychology*, 57: 114-117.
- Lim Bernard, 1997. Transformational leadership in the UK management culture. *Leadership & Organization Development Journal*, 18 : 1-6.
- Luthans, F., Paul, R., & Baker, D. 1981. An experimental analysis of the impact of contingent reinforcement on salesperson performance behavior. *Journal of Applied Psycholog*, 66: 314-323.
- Likert, R. 1961. *New patterns of management*. New York: McGraw-Hill.
- Likert, R. 1967. *The human organization: Its management and value*. New York: McGraw-Hill.
- Mayer, G.A., Brown, T.S.J., Browne, M.N., & Kubasek, N. 1998. Do we really want more leaders in business? *Jurnal of Business Ethic*, 17: 1727-1736.
- McClelland, D.C. 1975. *Power: The inner experience*. New York: Irvington.

- McClelland, D.C., & Boyatzis, R.E. Leadership motive pattern and long-term success in management. *Journal of Applied Psychology*, 67: 737-743.
- McClelland, D.C., & Burnham, D.H. 1976. Power is the great motivator. *Harvard Business Review*, 54: 100-110.
- Masi, R. J., & Robert, A. C. 2000. Effects of transformational leadership on subordinate motivation, empowering norms, and organizational productivity. *International Journal of Organizational Analysis*, 8 : 16-47.
- Metcalf, R. J., & Metcalf, B. A. 2000. The transformational leadership questionnaire (TLQ-LGV): a convergent and discriminant validation study. *MCB Leadership & Organizational Development Journal*, 21 : 1-20.
- Nelson, D. L., & Quick, J. C. 1997. *Organizational behavior: foundations, realities, and challenges*. 2nd ed. New York: West Publishing Company.
- Niehoff, B.P., Enz, C.A., Grover, R.A. 1990. The impact of top management action on employee attitudes and perceptions. *Group & Organization Studies*, 15 : 337-352.
- Osborn, R. N. 1974. Discussant comments. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.). *Contingency approach to leadership*. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press.
- Parry, K. 2000. Does leadership help the bottom line? *New Zealand management*. Auckland, 47 : 38-41.
- Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., & Bommer, W.H. 1996. Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behavior. *Journal of Management*, 22 : 259-298.
- Podsakoff, P.M., Todor, W.D., & Skov, R. 1982. Effects of leader contingent reward and punishment behavior on subordinate performance and satisfaction. *Academy of Management Journal*, 25: 810-821.
- Pfeffer, J. 1977. The Ambiguity of leadership. *Academy of Management Review*, 2 : 104-12.
- Parry, K. 2000. Does leadership help the bottom line? *New Zealand Management*, 47: 38-41.
- Roach, C.F., and Behling, O. 1984. Functionalism: Basis for an alternate approach to the study of leadership. In *Leaders and Managers: International Perspectives on Managerial Behavior and Leadership*. ed. Hunt, J.G. New York: Pergamon.
- Rosener, J. 1990. Ways woman lead. *Harvard Business Review*, 68: 119-225.
- Rice, R. W. 1978. Construct validity of the least preferred coworker score. *Psychological Bulletin*, 85: 1199-1237.
- Roscoe, J. T. 1973. *Fundamental research statistics for the behavioral sciences*. 2nd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sparrow, J. and Rigg, C. 1993. Job analysis: Selecting for the masculine approach to management. *Selection and Development Review*, 9 : 5-8.

- Sosik, J.J. 1997. Effect of transformational leadership and anonymity on idea generation in computer-mediated groups. *Group & Organization Management*, 22: 460-487.
- Sekaran, U. 1992. *Research methods for business: a Skill building approach*, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Seltzer, J., & Bass, B.M. 1990. Transformational leadership: Beyond initiation and consideration. *Journal of Management*, 16 : 693-703.
- Stogdill, R.M. 1974. *Handbook of leadership: A survey of the literature*. New York: Free Press.
- Stogdill, R.M. 1948. Personal factors associated with leadership: A survey of the literature. *Journal of Psychology*, 25: 35-71.
- Steers, R.M., Porter, L.W., & Bigley, G.A. 1996. *Motivation and Leadership at Work*, 6th ed. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Schriesheim, C. A., & Kerr, S. 1977. Theories and measures of leadership: A critical appraisal. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.). *Leadership: The cutting edge*. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press.
- Schriesheim, C. A., Bannister, B. D., & Money. 1979. Psychometric properties of the LPC scale: An extension of Rice's review. *Academy of Management Review*, 4: 287-290.
- Szilagy, A. D., & Wallace, M. J., Jr. 1990. *Organizational behavior and performance*. New York: HarperCollins.
- Tracey, B.J., & Hinkin, T.R. 1998. Transformational leadership or effective managerial practices. *Group & Organization Management*, 23 : 220-236.
- Takala, T. 1998. Plato on leadership. *Journal of Business Ethics*, 17: 785-798.
- Vroom, V. H., & Jago, A. G. 1988. *The new leadership: Managing participation in organizations*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
- Vroom, V. H., & Yetton, P. W. 1973. *Leadership and decision making*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Weber, M. 1947. *The theory of social and economic organization*. New York: Free Press.
- Yukl, G. 1989. Managerial leadership: A review of theory and research. *Journal of Management*, 15 : 251-289.
- Yukl, G. 1994. *Leadership in organization*. 3d ed. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
- Zaleznik, A. 1977. Managers and leaders: Are they different? *Harvard Business Review*, 54: 67-78.

LAMPIRAN

**Analisis Reliabilitas
Interkorelasi, Mean & Standar Deviasi, Reliabilitas**

	M	SD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Alpha													
Gen	0,66	0,48	1,00										
Conr	2,07	0,79	0,22	1,00								0,85	
Mbe	2,26	0,66	0,01	0,45*	1,00							0,88	
Char	2,55	0,62	0,06	0,29	-0,16	1,00						0,85	
Inspi	2,38	0,75	0,13	0,40*	0,04	0,58*	1,00					0,83	
Intst	2,48	0,73	0,03	0,36*	0,01	0,67*	0,70*	1,00				0,84	
Indc	2,45	0,71	0,08	0,47*	0,12	0,51*	0,73*	0,63*	1,00			0,83	
LE	2,26	0,64	-0,00	0,46*	0,19	0,36*	0,57*	0,37*	0,69*	1,00		0,84	
FS	2,45	0,75	0,03	0,40*	0,08	0,40*	0,57*	0,36*	0,67*	0,71*	1,00	0,84	
EE	2,36	0,76	0,11	0,40*	0,13	0,43*	0,63*	0,45*),76*	0,75*	0,71*	1,00	0,83

*) p < 0,01

Gen = gender
 Conr = contingent reward
 Mbe = management by exception
 Char = charisma
 LE = leader effectiveness

Inspi = inspiration
 Inst = intellectual stimulation
 Indc = individualized consideration
 FS = follower satisfaction with the leader
 EE = follower extra effort

Analisis Regresi Hirarkis

Hasil Analisis Regresi Hirarkis: Pengujian Augmentation Hypothesis

Variabel	Leader Effectiveness			Follower Satisfaction			Follower Extra Effort			
	Beta	T	P val	Beta	t	P val	Beta	t	P val	
Tahap 1										
Gender	-0,00	-0,03	0,98	0,04	0,31	0,76	0,17	1,20	0,23	
R square	0,00			0,00				0,01		
F	0,00		0,98	0,01		0,76		1,43		0,23
Tahap 2										
Gender	-0,02	-0,16	0,88	0,03	0,23	0,82	0,16	1,19	0,24	
Cont rew	0,39	5,29	0,00	0,43	4,91	0,00	0,42	4,69	0,00	
Man by ex	-0,03	-0,32	0,75	-0,15	-1,37	0,17	-0,08	-0,09	0,43	
R square	0,22			0,17				0,16		
Δ R squar	0,22			0,17				0,15		
F	11,1			8,40				8,67		
Δ F	11,1		0,00	8,39		0,00		7,24		0,00
Tahap 3										
Gender	-0,01	-1,14	0,26	-0,06	-0,57	0,57	0,06	0,67	0,50	
Cont rew	0,12	1,85	0,07	0,11	1,43	0,16	0,03	0,43	0,67	
Man by ex	0,05	0,70	0,48	0,03	-0,37	0,71	0,05	0,64	0,52	
Charisma	0,05	0,49	0,63	0,14	1,24	0,22	0,13	1,29	0,20	
Inspiration	0,21	2,34	0,02	0,28	2,59	0,01	0,22	2,24	0,03	
Intelec sti	-0,22	-2,24	0,02	-0,31	-2,92	0,04	-0,21	-2,19	0,03	
Indivi cons	0,52	5,84	0,00	0,58	5,41	0,00	0,70	7,25	0,00	
R square	0,54			0,51				0,61		
Δ R square	0,32			0,34				0,45		
F	19,6			17,3				26,2		
Δ F	8,42		0,00	8,80		0,00		18,1		0,00

Tingkat signifikansi = 0,05

FILSAFAT ILMU SEBAGAI DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN AKUNTANSI MENUJU KE ARAH PENINGKATAN KUALITAS PROFESI AKUNTAN

Eko Widodo Lo^{)}*

ABSTRAK

Filsafat ilmu menyediakan metoda berpikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga pemanfaatan filsafat ilmu untuk pengembangan ilmu akuntansi adalah penting. Setiap aliran filsafat dapat digali untuk pengembangan ilmu akuntansi karena setiap aliran mempunyai pola pemikiran masing-masing. Sistematika pembahasan dalam analisis hubungan filsafat dengan pengembangan ilmu akuntansi meliputi pendahuluan, pragmatisme dalam akuntansi, metafisika pragmatisme dalam akuntansi, empirisme dalam akuntansi, positivisme dalam akuntansi, analisis interpretatif dan kritikal dalam akuntansi, serta diakhiri dengan simpulan. Simpulan-simpulan pembahasan meliputi (1) pragmatisme sangat dominan mempengaruhi akuntansi yang berkiblat ke Amerika Serikat, (2) empirisme mempunyai tempat dalam akuntansi karena bahan baku akuntansi adalah fakta atau empiri berupa transaksi-transaksi ekonomi, (3) positivisme mempunyai peluang untuk menyumbangkan pola pemikirannya dalam pengembangan akuntansi, walaupun penggunaan istilah positif dalam teori akuntansi positif tidak mencerminkan arti positif dalam positivisme, (4) pendekatan interpretatif dan kritikal dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian-penelitian akuntansi yang sesuai dengan karakteristik obyek dan metode

dalam kedua pendekatan tersebut (5) setiap aliran dalam filsafat mempunyai peluang untuk digali dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu akuntansi, dan (6) pemahaman dan penguasaan metode berpikir filsafati menjadi suatu keharusan bagi para akuntan peneliti karena merekalah yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu akuntansi.

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang merupakan pengembangan dari filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu bukanlah sekedar suatu metode penelitian atau tata cara penulisan ilmiah, namun merupakan dasar dan arah pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membahas empat bidang yaitu:

1. Ontologi, yang membahas apakah ilmu itu atau hakekat apa yang dipelajari.
2. Epistemologi adalah berbagai sumber ilmu pengetahuan, sarana, tata cara, dan tolok ukur pengetahuan ilmiah. Epistemologi merupakan tata cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah.
3. Aksiologi yaitu tata nilai yang seharusnya ditaati ketika mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan.
4. Strategi pengembangan ilmu, yang meliputi tiga strategi, yaitu:

^{*)} Drs. Eko Widodo Lo, SE., M.Si., Akuntan adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta dan kandidat Doktor Akuntansi pada program Doktor Akuntansi Program Pasca Sarjana UGM.

- a. Ilmu berkembang dalam konteks.
- b. Ilmu lebur dalam konteks.
- c. Ilmu dikembangkan untuk peningkatan harkat manusia.

Filsafat ilmu menyediakan metode berpikir dan meletakkan dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Akuntansi merupakan ilmu yang baru berkembang pesat sejak awal abad 20 terutama di Amerika Serikat. Akuntansi di Indonesia saat ini masih berkiblat ke Amerika Serikat walaupun Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan IAI (1994) tampaknya mengacu pada International Accounting Standards (IAS). Aliran filsafat pragmatisme lahir dan berkembang pesat di Amerika Serikat sehingga dapat diduga bahwa akuntansi produk Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh pragmatisme. Selain pragmatisme terdapat aliran-aliran lain yang dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu akuntansi dan kualitas akuntan karena hampir semua aliran filsafat mempunyai suatu metode berpikir yang mungkin dapat digunakan dalam pengembangan ilmu akuntansi. Pembahasan berikutnya meliputi hubungan filsafat dengan akuntansi yaitu pragmatisme dalam akuntansi, metafisika pragmatisme dalam akuntansi, empirisme dalam akuntansi, positivisme dalam akuntansi, analisis interpretatif dan kritikal dalam akuntansi, dan diakhiri dengan simpulan.

PRAGMATISME DALAM AKUNTANSI

Pragmatisme

Pragmatisme merupakan suatu aliran filsafat kontemporer yang lahir di Amerika Serikat. Tokoh yang menjadi cikal bakal dan peletak dasar aliran pragmatisme adalah Charles Sanders Pierce (1839-1914). Pragmatisme dikembangkan dan dipopulerkan oleh sahabat Pierce, yaitu William James (1824-1910) dan kemudian John Dewey (1859-1952). Nama pragmatisme pertama kali dikenalkan oleh William James dengan tiga bukunya (Delfgauw, 1972:60-66) yaitu *Pragmatisme* (1907), *A Pluralistic Universe* (1909), dan *Essay in Radical Empirism* (1912). James menyebut aliran ini pragmatisme, atau empirisme radikal, dan juga pluralisme. Dewey mempunyai gaya yang berbeda dari James. Dewey menggunakan prinsip naturalisme empirisme.

Ajaran pragmatisme secara ringkas dapat dinyatakan dalam formula bahwa kebenaran adalah apa yang membawa hasil (Gallagher, 1994: 123-129). Suatu pertimbangan dapat dinyatakan benar jika penggunaannya memberikan hasil yang bermanfaat, dan pertimbangan tersebut adalah salah jika penggunaannya memberikan hasil yang merugikan. Pragmatisme sebagai pandangan hidup mengandung unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ajaran tersebut menyebabkan para penganut pragmatisme lebih memperhatikan praktik. Mereka memandang kehidupan manusia sebagai suatu perjuangan yang terus menerus dan di dalamnya yang paling penting adalah konsekuensi-konsekuensi yang bersifat praktis (Kattsoff, 1996: 129-134). Apabila sesuatu tidak menimbulkan konsekuensi praktis maka tidak ada makna yang dikandungnya sehingga dapat disimpulkan apa yang tidak mengakibatkan perbedaan maka tidak mengandung makna.

Pragmatisme memandang filsafat sebagai alat untuk menolong manusia dalam hidupnya sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mewujudkan dunia teknik (Mudji Sutrisno, 1993: 91-99). Untuk segala hal bukan pendapat atau hipotesis yang penting, namun yang penting adalah praktik dalam hidup manusia. Ilmu pengetahuan, anggapan hidup, dan filsafat dinilai berdasarkan akibat dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Teori atau hasil pemikiran menjadi alat yang berguna jika memungkinkan timbulnya pengalaman yang ikut mengembangkan kehidupan manusia dalam praktik pelaksanaannya.

Pragmatisme mengkritik rasionalisme, idealisme, dan materialisme karena tidak mampu memberikan kegunaan secara langsung yang bersifat praktik bagi kehidupan manusia. Pragmatisme mengkritik empirisme yang hanya memperhatikan masalah-masalah pengalaman namun tidak berhasil memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Pragmatisme menggambarkan berbagai corak yang memiliki persamaan berikut ini:

1. Manusia merupakan makhluk yang aktif dan kreatif dalam membentuk dunianya.
2. Manusia selalu memadukan kebenaran dan nilai. Perpaduan ini menjadi dasar untuk konsekuensi yang praktis bagi kehidupan manusia.
3. Kebenaran merupakan sesuatu yang bermanfaat, fungsional, substansial, dan praktis.

4. Filsafat harus berhubungan dengan problem-problem kehidupan manusia yang diselesaikan.

PRAGMATISME DALAM AKUNTANSI

Pragmatisme Dalam Tujuan Akuntansi

Pragmatisme yang lahir dan berkembang pesat di Amerika Serikat mempengaruhi perkembangan akuntansi karena akuntansi juga berkembang pesat di Amerika Serikat mulai sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20 sampai dengan sekarang. Akuntansi yang berkembang di Amerika Serikat telah menjadi kiblat pengembangan akuntansi di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. *Financial Accounting Standards Board* (FASB) sebagai badan regulator akuntansi di AS telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang diduga kuat dipengaruhi oleh pragmatisme. *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1 yang dikeluarkan oleh FASB pada tahun 1978 berisi pernyataan mengenai tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah meyakinkan:

1. Informasi yang berguna bagi investor dan kreditor potensial maupun yang ada serta pemakai lain dalam pembuatan keputusan investasi, kredit, dan sejenisnya secara rasional.
2. Informasi yang membantu investor dan kreditor potensial maupun yang sudah ada serta pemakai lain dalam menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek aliran kas bersih perusahaan.
3. Informasi mengenai sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber ekonomi tersebut, dan perubahannya.

Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994: 5) sebagai badan regulator akuntansi di Indonesia menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kedua pernyataan tersebut dengan jelas merupakan indikator bahwa pragmatisme memberikan dasar pemikiran dalam penentuan tujuan akuntansi keuangan. Pragmatisme menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan benar apabila penggunaannya

memberikan manfaat dan akuntansi menyatakan bahwa informasi yang dihasilkan adalah informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. Simpulan yang dapat dibuat dari kedua indikator tersebut adalah pragmatisme dapat dan telah memberikan kerangka penyusunan dan pengembangan akuntansi. Simpulan ini juga didukung oleh beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Beam (1969: 382) menyatakan bahwa pragmatisme berhubungan dengan tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi.
2. Belkaoui (1993: 23) menyatakan bahwa akuntansi meliputi sekumpulan teknik yang benar-benar bermanfaat untuk bidang-bidang tertentu.

Pragmatisme Dalam Kualitas Informasi Akuntansi

SFAC No.2 (FASB: 1978) berisi pernyataan mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi menyatakan bahwa kualitas bermanfaat untuk pembuatan keputusan merupakan kriteria pervasive yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi. Kualitas bermanfaat merupakan kualitas informasi akuntansi yang paling penting. Informasi akuntansi harus bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh pemakainya. Standar Akuntansi Keuangan (IAI: 1994: 9) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pragmatisme juga mempengaruhi akuntansi dalam penentuan karakteristik utama informasi akuntansi. Pragmatisme menyatakan sesuatu adalah benar apabila penggunaannya memberikan manfaat dan SFAC No. 2 menyatakan bahwa kualitas informasi yang paling penting adalah kualitas bermanfaat.

Pendekatan Operasional Pragmatis Untuk Pendefinisian dan Pengukuran Dalam Akuntansi

Pendekatan operasional adalah relevan dan konsisten dengan pragmatisme (Beam, 1969: 384). Pendekatan operasional untuk definisi-definisi dapat diinterpretasikan sebagai memberikan definisi suatu konstruk operasi yang dilakukan dalam pengukurannya dan bukan mengenai sifat umum atau properti. Pendekatan operasional cenderung menghilangkan kekaburan dan ambiguitas tapi dibatasi hanya pada

bagaimana mengukur sesuatu dan apa sesuatu itu. Definisi operasional dianggap konsisten dengan pola pemikiran pragmatisme karena: (1) tidak menggambarkan pengalaman perusahaan tapi dirancang untuk menyediakan dasar untuk memperoleh informasi yang berguna mengenai pengalaman perusahaan, (2) verifikasi tidak berhubungan dengan fakta tapi dalam penggunaannya dalam menyediakan informasi yang lebih berguna daripada pendekatan-pendekatan alternatif.

Dalam pemikiran pragmatisme, kos adalah data harga pertukaran yang mengukur pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu jasa. Pendapatan adalah data harga pertukaran yang

mengukur jasa yang diserahkan kepada pelanggan. Kos dan pendapatan adalah harga pertukaran dan merupakan data. Kos di sini bukan dan tidak dapat *expire*, diproduksi, memberikan kontribusi, dipertanggungjawabkan, dan menyebabkan kegiatan. Konstruksi kos dan pendapatan adalah konstruksi operasional dan mengacu pada data yang diakumulasi untuk mengukur sesuatu dalam perusahaan. Asosiasi kos dan pendapatan dalam skema pragmatisme adalah asosiasi data, dan bukan asosiasi kondisi dan peristiwa ekonomi. Berikut ini disajikan definisi operasi konstruksi-konstruksi akuntansi menurut pola pragmatisme (Beam, 1969: 387):

Konstruksi	Definisi Operasional Pragmatik
Aktiva	Harga pertukaran jasa potensial pada masa yang akan datang
Utang	Harga pertukaran yang menunjukkan investasi kreditur dalam suatu perusahaan
Ekuitas	Harga pertukaran yang menunjukkan investasi pemilik dalam suatu perusahaan
Expenses	Data harga pertukaran yang mengukur <i>expiration</i> jasa potensial
Losses	Tidak ada perbedaan antara <i>expenses</i> dengan <i>losses</i>
Pendapatan	Data harga pertukaran untuk jasa yang diserahkan kepada pelanggan
Kos	Data harga pertukaran untuk jasa yang diperoleh
Laba bersih	Indeks efektivitas manajerial

METAFISIKA PRAGMATISME DALAM AKUNTANSI

Dengan pengakuan dan pernyataan secara metafisika terhadap akuntansi akan lebih memungkinkan presuposisi-presuposisi yang tersembunyi menjadi tampak dan dapat dianalisis. Apabila antar hubungan suposisi-suposisi metafisika dapat dibentuk akan memungkinkan untuk mengembangkan apa yang benar pada suatu tingkatan analisis menjadi tidak benar pada tingkatan analisis yang lain, atau apa yang tampaknya tidak dapat dijelaskan pada tingkatan pertama mungkin menjadi dapat dijelaskan pada tingkatan yang lebih tinggi.

Usaha menghubungkan pragmatisme dengan akuntansi melalui asumsi metafisika seharusnya tidak berarti bahwa dasar metafisika merupakan yang paling cocok untuk perumusan teori akuntansi. Penggunaan

dasar metafisika tidak dimaksudkan untuk menawarkan keyakinan mengenai akuntansi. Seperti pragmatisme, dasar metafisika bagi akuntansi seharusnya dalam bentuk suatu hipotesis yang dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pengetahuan dan pengalaman pada masa yang akan datang.

Metafisika membahas apa yang ada di balik sesuatu. Metafisika berhubungan dengan realitas yang melewati batas pengalaman. Metafisika pragmatisme mengacu pada asumsi mengenai manusia dan alam dalam suatu sistem yang di dalamnya meliputi suatu teori pengalaman dan peristiwa-peristiwa alamiah, suatu teori nilai, dan suatu teori hubungan manusia dengan alam —yang merupakan sumber dan sifat pengetahuan. Suatu sistem metafisika menawarkan suatu interpretasi fakta-fakta empiris yang mengarah pada metode dan bidang pertanyaan yang membangun suatu konsistensi struktur pemikiran.

Dopuch (1962: 254-260) menggunakan kerangka metafisika Butler (1951: 431-437 dan 1957: 451-457) sebagai kerangka utama dalam menghubungkan metafisika pragmatisme dengan akuntansi.

Dunia Adalah Semua Latar Depan

Pernyataan bahwa dunia adalah semua latar depan bukanlah suatu deskripsi akurat mengenai penekanan empiris dalam pragmatisme. Pragmatisme tidak berhubungan dengan penemuan realitas yang menjadi latar belakang setiap pengalaman dan semua kegiatan manusia.

Akuntansi mengakui perbedaan kualitatif dalam transaksi-transaksi suatu organisme tanpa mempostulatkan dulu suatu konteks perilaku yang menyeluruh, misalnya, orientasi pada laba, yang sulit dihubungkan kembali dengan realitas. Dalam pengertian akuntansi, karakteristik lingkungan operasi—kejadian-kejadian alam dalam lingkungan akuntansi—diterima sebagai suatu refleksi realitas pengalaman yang dapat diterima oleh pemikiran akuntansi dan dipelajari untuk membangun signifikansi fungsi akuntansi.

Dunia Dibentuk Melalui Proses dan Perubahan

Tidak ada sesuatu yang statis atau permanen. Segala sesuatu bergerak dan berubah terus menerus. Dalam penolakan terhadap teori universal realitas, karakteristik pertama yang ditekankan dalam pragmatisme adalah perubahan dan proses yang selalu ada dalam dunia pengalaman.

Suatu perubahan asumsi akuntansi mungkin tidak signifikan secara keseluruhan, kecuali implikasi-implikasi yang diakibatkan oleh perubahan tersebut. Fungsi akuntansi tampaknya tergantung pada suatu perubahan yang tidak dapat diprediksi sehingga pengukuran *ex post* dalam akuntansi dirancang untuk mencerminkan tingkatan pada kondisi yang diasumsikan, yang menyimpang dari harapan-harapan implisit dalam tujuan yang dimiliki oleh manusia yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan yang lain. Penggunaan kos historis dibandingkan dengan pendapatan merupakan kelanjutan harapan manajemen yang telah direalisasikan. Hal ini tidak mempunyai masalah kecuali jika terjadi perubahan.

Dunia Adalah Sulit dan Berbahaya

Dalam dunia yang berubah secara konstan tidak ada keadaan yang benar-benar aman. Perubahan menyatakan secara tidak langsung adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi dan berisiko. Segala sesuatu tidak selalu seperti yang direncanakan. Hasil yang dicapai tidak selalu seimbang dengan usaha yang telah dikeluarkan. Semakin lama rentang waktu suatu proyek, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.

Ketidakpastian dan risiko di dalamnya, atau kemungkinan harapan tidak dapat direalisasi adalah keadaan-keadaan yang sesungguhnya terjadi. Signifikansi data akuntansi cenderung dijustifikasi oleh kejadian atau keberadaan keadaan-keadaan yang tidak pasti dan berisiko, mengikuti asumsi perubahan yang konstan.

Dunia adalah Tidak Lengkap dan Tidak Menentu

Manusia percaya dan terlibat secara terus menerus dalam proses alam. Manusia membutuhkan kemampuan untuk berpikir. Pertumbuhan kecerdasan alami merupakan sifat manusia. Suatu analisis pemikiran mungkin memberikan tanda-tanda sifat dunia. Dalam dunia yang tidak menentu sepenuhnya, tidak ada yang dapat diantisipasi dan pilihan menjadi tidak berarti. Suatu gabungan antara ketidaklengkapan dan ketidakmenentuan dengan kelengkapan dan kementerian merupakan sifat keberadaan dunia. Fungsi akuntansi juga mempostulatkan suatu gabungan antara ketidaklengkapan dengan kelengkapan dan ketidakmenentuan dan kementerian.

Dunia Mempunyai Akhir Dalam Prosesnya

Dunia dipahami sebagai mempunyai akhirnya sendiri dalam jalinan prosesnya sendiri. Tujuan dan nilai tidak berakhir dan merupakan terminal-terminal transit. Manusia harus belajar membedakan proses yang mempunyai hasil yang memenuhi kebutuhannya dan yang tidak. Karena manusia mempunyai kecerdasan, manusia mungkin mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi dan memanfaatkan sumber alam untuk lebih menjamin peristiwa-peristiwa yang mempunyai hasil akhir yang bagus.

Proses di atas mendasari pembuatan keputusan modern dan pemilihan alternatif-alternatif. Komitmen sumber alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, pemanfaatan sumber alam dalam proses pemenuhan kebutuhan diputuskan menurut antisipasi terhadap hasil tindakan-tindakan alternatif, yang merupakan tahap awal tindakan efisien dan rasional. Pada tahap inilah fungsi akuntansi dikembangkan menjadi sistem pengukuran dan komunikasi untuk pemilihan tindakan awal yang memerlukan pengukuran dan komunikasi hasil pada titik yang sesuai dalam urutan tindakan.

Manusia Bukan Penyebab Aktif Dalam Dunia

Walaupun manusia bukan penyebab aktif dan bukan inisitor kejadian, melalui proses interaksi manusia mengubah tindakan dan arah aliran kejadian dengan refleksi pada sejumlah kejadian alternatif untuk menentukan alternatif yang lebih kondusif dalam memenuhi kebutuhan. Dalam mengelola dan mengatur dunia yang selalu berubah, tidak pasti, dan berisiko, manusia memerlukan informasi yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi tindakan yang diantisipasi pada awal perencanaan dan informasi dalam pelaksanaan rencana sepanjang waktu interim agar dapat melakukan modifikasi yang diperlukan dan arah modifikasi yang diketahui. Fungsi akuntansi berperan penting sejak tahap awal perencanaan sampai dengan realisasi akhir rencana.

Dunia Tidak Menjamin Kemajuan

Dunia tidak menawarkan jaminan positif kepada manusia untuk memenuhi harapannya. Dunia tidak menentu sehubungan dengan nilai dan dalam ketidakmenentuan manusia mengatur kembali kekuatannya untuk dapat digunakan dalam masa yang akan datang. Matriks nilai, alat, dan harapan merupakan data akuntansi signifikan, apakah nilai-nilai adalah ekonomis atau tidak ekonomis. Kecuali kalau matriks informasi dapat dikomunikasikan sebagai latar belakang hasil yang diperoleh, setiap konsep maksimisasi dalam akuntansi akan tetap steril. Jika masyarakat menuju dalam arah yang diharapkan, matriks informasi tersebut akan perlu diungkap oleh unit-unit sosial (perusahaan) sehingga konsekuensi-konsekuensi keseluruhan dapat dievaluasi oleh masyarakat.

EMPIRISME DALAM AKUNTANSI

Empirisme

Empirisme merupakan suatu epistemologi yang menggunakan empiri atau pengalaman sebagai dasar ilmu pengetahuan. Empirisme adalah suatu aliran filsafat yang tokoh-tokohnya adalah John Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753), dan David Hume (1711-1776). John Locke mengemukakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa seluruh pengetahuan manusia adalah penjabaran dari hasil pengamatan indrawi. John Locke menyampaikan terdapat dua macam pengalaman, yaitu:

1. Pengalaman dari sensasi yaitu pengalaman lahiriah.
2. Pengalaman dari refleksi batin yaitu pengalaman sensasi yang disimpan dalam akal budi.

Sensasi dan refleksi adalah proses yang dilalui untuk memperoleh ide atau pengetahuan. Teori tabula rasa yang dikemukakan John Locke menyatakan bahwa pengetahuan adalah gambaran mengenai pengamatan atau pengalaman yang diperoleh melalui indera dan akal budi manusia. Secara ringkas empirisme berfokus pada obyek pengalaman atau empiri dengan menggunakan premis fenomena yang menampak secara indrawi. Metode analisis yang digunakan adalah metode induktif. Hasil analisis berupa keterangan empiris mengenai sesuatu yang dihubungkan dengan isi empirisnya. Parameter yang digunakan adalah kesesuaian antara obyek dengan pengalaman indrawi.

EMPIRISME DALAM AKUNTANSI

Empirisme Dalam Kualitas Informasi Akuntansi

Empirisme dalam konteks akuntansi mengasumsikan bahwa tujuan akuntansi adalah menyajikan fakta pengalaman keuangan perusahaan. Penekanan pada informasi faktual, pengukuran yang akurat dan obyektivitas data merupakan perwujudan empirisme dalam akuntansi (Beam, 1969: 383). SFAC No.2 (FASB: 1978) berisi pernyataan mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang menyatakan bahwa untuk mencapai kualitas bermanfaat, informasi akuntansi harus mempunyai kualitas relevan dan realibilitas. Kualitas realibilitas ini merupakan salah satu bentuk perwujudan pengaruh empirisme dalam akuntansi.

Kualitas informasi yang andal (*reliable*) adalah informasi yang mempunyai kualitas berdaya uji atau obyektif, menyajikan yang seharusnya (*representational faithfulness*), serta bebas dari kesalahan dan bias, dengan pengertian ringkas sebagai berikut:

1. Berdaya uji atau obyektif adalah kualitas yang ditunjukkan dengan terjaminnya tingkat konsensus yang tinggi terhadap hasil pengukuran di antara para pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
2. Penyajian yang seharusnya adalah kualitas informasi yang menunjukkan bahwa angka-angka dan deskripsi-deskripsi menyajikan apa yang sesungguhnya ada atau terjadi.
3. Netral adalah kualitas informasi yang dihasilkan tidak untuk memihak kepentingan pihak tertentu serta bebas dari kesalahan dan bias. Netral dapat diartikan tidak memihak dalam pembuatan standar dan tidak memihak dalam pemilihan alternatif akuntansi. Bias dalam ukuran akuntansi berarti suatu kecenderungan secara konsisten menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah

Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 1994: 11-13) menyatakan agar berguna, informasi harus reliabel yang mengandung kualitas bebas dari kesalahan material dan bias serta menyajikan yang seharusnya. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa empirisme mempengaruhi akuntansi dalam penentuan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Empirisme menyatakan informasi faktual, pengukuran yang akurat dan obyektivitas data merupakan perwujudan empirisme. SFAC No. 2 dan Standar Akuntansi Keuangan menunjukkan perwujudan empirisme dalam pernyataannya.

Pendekatan Konstitutif Empiris untuk Pendefinisian dan Pengukuran Dalam Akuntansi

Pendekatan konstitutif adalah relevan dan konsisten dengan pemikiran empiris. Pendekatan konstitutif untuk definisi-definisi dapat memberikan definisi suatu

konstruk mengenai sifat umum atau propertinya. Definisi konstitutif cenderung kekurangan presisi dan mungkin dihasilkan dari spekulasi karena tidak didukung oleh definisi operasional. Definisi konstitutif bersifat deskriptif dan memberikan suatu titik awal untuk perolehan informasi yang tidak dapat dipertentangkan mengenai pengalaman keuangan perusahaan. Definisi konstitutif memberikan titik awal dari observasi yang dilakukan dan pengukuran yang menyajikan perkiraan terbaik mengenai hasil observasi. Informasi dihasilkan melalui proses penghubungan fakta-fakta, sehingga pendekatan konstitutif konsisten dengan sudut pandang empirisme.

Definisi kos dalam pola pikir empirisme hanyalah sebagai dasar pengukuran kuantitatif. Interpretasi kos dalam empirisme mirip dengan yang disampaikan oleh Paton dan Littleton (1940: 25) yang menyatakan kos adalah data fundamental akuntansi dan istilah yang digunakan dalam arti luas. Kata kos secara substansial ekuivalen dengan *price-aggregate* (harga per unit dikalikan kuantitas) atau *bargained price*. Karena terdapat beberapa interpretasi kos selain sebagai *bargained price* —misalnya *current cost*, *replacement cost*, *price level adjusted cost*, dan *opportunity cost*—, definisi kos sebagai dasar pengukuran kuantitatif lebih mencerminkan kos dalam arti luas daripada sebagai *bargained price*.

Dalam pola pikir empirisme, istilah kos digunakan terhadap konstruk lain untuk menunjukkan pengukuran kuantitatif. Dengan mengacu pada kos suatu aktiva secara tidak langsung menunjukkan hak, sumber ekonomi, serta pengukuran kuantitatif. Hak dan sumber ekonomi mungkin digunakan dalam kegiatan produksi dan mungkin juga *expire*, serta mungkin juga hilang bukan karena keduanya. Hak dan sumber ekonomi yang digunakan dalam produksi barang atau jasa pada akhirnya dijual sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerolehan pendapatan. Berikut ini disajikan definisi konstitutif konstruk-konstruk akuntansi menurut pola pemikiran empirisme (Beam, 1969: 387):

Konstruk	Definisi Konstitutif Empiris
Aktiva	Hak dan sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan
Utang	Tuntutan atau hak pihak luar terhadap perusahaan
Ekuitas	Tuntutan atau hak pemilik terhadap perusahaan
<i>Expenses</i>	Penurunan aktiva atau bertambahnya utang yang berasosiasi dengan pengakuan pendapatan
<i>Losses</i>	Penurunan aktiva atau bertambahnya utang yang yang tidak berasosiasi dengan pengakuan pendapatan atau transaksi keuangan
Pendapatan	Peningkatan aktiva atau berkurangnya utang yang diakui dari penyerahan jasa kepada pelanggan
Kos	Dasar untuk pengukuran kuantitatif
Laba bersih	Aktiva bersih yang meningkat sebagai hasil dari kegiatan bisnis

SFAC No. 6 (1985) yang berisi pernyataan mengenai elemen-elemen laporan keuangan mempunyai empat dari sepuluh elemen laporan keuangan yang definisinya mirip dengan definisi konstitutif empiris, sebagai berikut:

1. **Utang** adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang mungkin terjadi pada masa akan datang yang berasal dari kewajiban saat ini suatu entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lain pada masa akan datang sebagai hasil transaksi atau kejadian pada masa lalu.
2. **Revenues (pendapatan)** adalah aliran masuk atau bertambahnya aktiva suatu entitas atau penyelesaian utang atau kombinasi keduanya, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, pengadaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama entitas yang sedang berlangsung.
3. **Expenses (biaya)** adalah aliran keluar atau penggunaan lain aktiva atau bertambahnya utang atau kombinasi keduanya, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, pengadaan jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan operasi utama perusahaan yang sedang berlangsung.
4. **Losses** adalah berkurangnya ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi atau bukan utama suatu entitas dan yang berasal dari semua transaksi lain serta keadaan dan kejadian lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang berasal dari *expenses* atau distribusi kepada pemilik.

Definisi yang dibuat oleh SFAC No. 2 tampak lebih lengkap daripada definisi konstitutif empiris yang disampaikan oleh Beam, namun terdapat kemiripan gagasan untuk elemen utang, *revenues* (pendapatan), *expenses* (biaya), dan *losses*. Kemiripan gagasan ini menunjukkan adanya pengaruh empirisme dalam penyusunan definisi elemen-elemen laporan keuangan.

POSITIVISME DALAM AKUNTANSI

Positivisme

Positivisme merupakan epistemologi yang semata-mata berdasarkan pada realitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat dunia barat modern dengan August Comte (1798-1857) sebagai peletak dasar utama. August Comte memberi arti positif dalam positivisme (Wibisono, 1996: 37-38) sebagai berikut:

1. Positif menunjuk pada sesuatu yang nyata atau kongkrit yang dilawankan atau kebalikan dari sesuatu yang khayal.
2. Positif menunjuk pada sesuatu yang bermanfaat sebagai lawan atau kebalikan dari sesuatu yang tidak bermanfaat.
3. Positif menunjuk pada sesuatu yang sudah pasti sebagai lawan atau kebalikan dari sesuatu yang meragukan.
4. Positif menunjuk pada sesuatu yang jelas atau tepat sebagai lawan atau kebalikan dari sesuatu yang kabur.

5. Positif digunakan untuk menunjukkan sifat pandangan filsafatnya yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban sebagai lawan atau kebalikan dari sesuatu yang negatif.

Setiap ilmu semestinya bebas nilai dalam menghasilkan informasi namun setiap ilmu lahir dari nilai-nilai tertentu.

Positivisme adalah penerus ajaran Francis Bacon seorang filosof Inggris (1561-1626) yang mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dimulai dari pengamatan terhadap alam semesta. Setelah melakukan pengamatan secara terus menerus dan teratur, manusia akan menemukan perulangan-perulangan yang akan menjadi pengetahuan. Pendapat yang disampaikan Bacon menggunakan metode induksi.

Dalam positivisme, manusia tidak mempunyai pengetahuan apapun kecuali apa yang menampak secara indrawi. Fenomena yang muncul diamati secara terus menerus untuk memperoleh kejelasan atau perulangan-perulangan yang kemudian menjadi pengetahuan. Metode analisis yang digunakan dalam positivisme meliputi tahap observasi atau pengamatan, eksperimen, komparasi atau perbandingan, dan eksplorasi. Cara kerja positivisme dimulai dengan subyek melakukan observasi terhadap obyek secara kontinyu. Berdasarkan hasil pengamatan subyek membuat hipotesis-hipotesis yang diuji dalam eksperimen. Hasil eksperimen kemudian dibandingkan dengan hal-hal yang sejenis. Jika komparasi memberikan simpulan bahwa hasilnya adalah sama maka akan menjadi teori yang kemudian dieksplorasi.

Dalam perkembangan positivisme, muncul *logico-positivism* yang merupakan teknik atau metode berpikir yang menggunakan presisi, verifikasiabilitas, konfirmasi, dan eksperimen dengan derajat optimal untuk melakukan prediksi dengan derajat yang optimal pula. Kebenaran ilmiah diukur secara positivistik, yang berarti kebenaran ilmiah harus kongkrit, pasti, akurat, dan bermanfaat.

TEORIAKUNTANSIPOSITIF

Watts dan Zimmerman yang berasal dari Rochester School pada tahun 1986 menulis buku Teori Akuntansi Positif. Pada bagian awal buku tersebut disampaikan mengenai peran teori. Tujuan teori akuntansi adalah menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi (Watts

dan Zimmerman, 1986: 2). Penjelasan berarti menyediakan alasan praktik yang diamati. Prediksi praktik akuntansi berarti teori memprediksi fenomena akuntansi yang tidak diamati. Teori akuntansi positif menurut mereka mampu menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena akuntansi.

Dalam ilmu ekonomi, konsep teori yang digunakan disebut teori positif untuk membedakannya dari argumen normatif. Istilah teori positif dipopulerkan oleh Friedman pada tahun 1953 untuk arti konsep yang digunakan dalam ilmu, yang dikacaukan dengan pandangan dalam filsafat ilmu, dan *logico-positivism*. Watts dan Zimmerman (1986:8) tidak memperdulikan kekacauan istilah tersebut dan menggunakan istilah teori positif karena umum digunakan dalam ilmu ekonomi. Mereka berpendapat proposisi positif berbeda dengan proposisi normatif. **Proposisi positif** berhubungan dengan **bagaimana dunia bekerja**. Misalnya, “Jika suatu perusahaan berpindah dari asumsi aliran kos persediaan FIFO ke LIFO dan pasar saham tidak melakukan antisipasi terhadap perubahan tersebut, maka harga saham akan naik”. Pernyataan ini merupakan suatu prediksi yang **dapat dibantah** oleh bukti. Proposisi normatif berhubungan dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya, “Karena harga-harga menaik, asumsi aliran persediaan LIFO harus digunakan”. Proposisi ini **tidak dapat dibantah**. Tapi untuk tujuan tertentu dapat dibantah oleh bukti. Misalnya, “Jika harga-harga menaik pemilihan LIFO akan memaksimalkan nilai perusahaan”, pernyataan ini dapat dibantah oleh bukti. Jadi, untuk tujuan tertentu, peneliti dapat beralih dari suatu ketentuan (preskripsi) menjadi suatu prediksi kondisional dan menilai validitas empirisnya.

KRITIK TERHADAP TEORIAKUNTANSIPOSITIF WATTS DAN ZIMMERMAN

Christenson (1983: 19-21) melakukan kritik terhadap metodologi teori akuntansi positif yang disampaikan oleh Watts dan Zimmerman sebagai berikut:

1. Teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (Rochester School) lebih merupakan suatu sosiologi akuntansi, bukannya suatu teori.
2. Pernyataan Rochester School bahwa jenis penelitian “positif” yang mereka lakukan adalah suatu

prasyarat untuk teori akuntansi normatif didasarkan pada suatu kerancuan domain-domain fenomenal pada dua tingkatan yang berbeda yaitu entitas akuntansi dan akuntan.

3. Konsep teori positif diambil dari filsafat ilmu lama dan merupakan kesalahan penggunaan istilah karena teori-teori ilmu empirikal tidak membuat pernyataan positif "What is".
4. Walaupun suatu teori mungkin digunakan hanya untuk prediksi sekalipun teori tersebut diketahui salah, suatu teori *explanatory* dengan jenis seperti yang diteliti oleh Rochester School, atau seseorang yang menggunakannya untuk menguji proposal normatif, seharusnya tidak diketahui salah. Metode analisis dengan pemikiran balik dari fenomena ke premis yang dapat diterima berdasarkan bukti independen, adalah metode yang sesuai untuk penyusunan teori *explanatory*.
5. Berlawanan dengan metode empirikal yang membatasi teori dengan usaha keras untuk menyalahkan teori, Rochester School mengemukakan argumen *ad hoc* untuk memaafkan atau menjustifikasi kegagalan teori mereka. Taktik ini merupakan penyimpangan norma yang harus diikuti jika suatu sistem proposisi dipertimbangkan secara ilmiah (Popper, 1959 dalam Christensen, 1983).

Whittington (1987: 329) mengkritik pernyataan bahwa teori akuntansi positif adalah bebas dari penilaian subyektif dan bersifat ilmiah sedangkan teori normatif mempunyai penilaian subyektif yang tinggi dan tidak ilmiah, adalah tidak dapat diterima dengan dua keberatan sebagai berikut:

1. Teori akuntansi positif tidak bebas dari penilaian atau implikasi preskriptif.
2. Anggapan bahwa semua teori yang tidak positif adalah normatif dalam arti mengarah pada preskripsi-preskripsi, adalah tidak benar.

Kata positif dalam teori akuntansi positif belum seperti yang dimaksudkan oleh aliran filsafat positivisme, namun sesungguhnya terbuka peluang bagi teori akuntansi untuk menggunakan pemikiran-pemikiran positivisme dalam pengembangan teori akuntansi dan pengetahuan ilmiah akuntan. Positivisme merupakan metode berpikir yang menggunakan presisi, verifikasiabilitas, konfirmasi, dan eksperimen dengan derajat optimal untuk melakukan prediksi dengan

derajat yang optimal pula. Metode berpikir positivisme dapat dihubungkan dengan tujuan akuntansi, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, proses akuntansi, dan pengembangan penelitian-penelitian akuntansi.

ANALISIS INTERPRETATIF DAN KRITIKAL DALAM AKUNTANSI

Akuntansi *mainstream* didasarkan pada sehimpunan asumsi filsafati mengenai ilmu pengetahuan, dunia empiris, dan hubungan antara teori dengan praktik. Akuntansi menekankan pada *hipothetico-deductivism* dan pengendalian teknis yang mempunyai kekuatan tertentu tapi mempunyai batasan lingkup masalah dan penggunaan metode penelitian (Chua, 1986: 601-626). Dengan perubahan asumsi, wawasan penelitian yang lebih kaya dan berbeda secara fundamental akan diperoleh. Dua sudut pandang alternatif diajukan oleh Chua yaitu sudut pandang interpretatif dan kritis. Chua melakukan klasifikasi asumsi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi epistemologi dan metodologi.
2. Keyakinan mengenai fisik dan realitas sosial, yang meliputi ontologi, intensi manusia dan rasionalitas, serta konflik sosial atau *social order*.
3. Hubungan antara teori dan praktik.

Berdasarkan klasifikasi tersebut Chua membuat ringkasan asumsi dominan dalam akuntansi *mainstream*, sebagai berikut:

1. Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi:
 - a. Epistemologi: Teori dipisahkan dari observasi yang mungkin digunakan untuk memverifikasi atau memfalsifikasi suatu teori. Penjelasan ilmiah *hipothetico-deductive* diterima.
 - b. Metodologi: Metode-metode kuantitatif untuk pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan generalisasi.
2. Keyakinan mengenai fisik dan realitas sosial, yang meliputi:
 - a. Ontologi: realitas empiris adalah tujuan dan eksternal terhadap subyek. Manusia adalah obyek yang pasif dan tidak dipandang sebagai pembuat realitas sosial.
 - b. Intensi manusia dan rasionalitas: Tujuan tunggal maksimisasi utilitas diasumsikan untuk

individu dan perusahaan. Rasionalitas *means-ends* diasumsikan.

- c. Konflik sosial atau *social order*: masyarakat dan organisasi pada dasarnya stabil. Konflik disfungsional mungkin diatur melalui perancangan pengendalian akuntansi yang sesuai.
3. Hubungan antara teori dan praktik: Akuntansi merupakan alat, bukan tujuan. Penerimaan terhadap struktur institusional yang ada.

Asumsi dominan dalam prespektif interpretatif disajikan sebagai berikut:

1. Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi:
 - a. Epistemologi: Penjelasan ilmiah mengenai intensi manusia. Kecukupan dinilai melalui kriteria konsistensi logika, interpretasi subyektif, dan persetujuan dengan interpretasi aktor.
 - b. Metodologi: Aktivitas etnografi, studi kasus, dan observasi terhadap partisipan. Aktor dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
2. Keyakinan mengenai fisik dan realitas sosial, yang meliputi:
 - a. Ontologi: Realitas sosial adalah timbul begitu saja, diciptakan secara subyektif, dan diobyektifkan melalui interaksi antar manusia.
 - b. Intensi manusia, dan rasionalitas: Semua kegiatan mempunyai arti dan maksud yang diwarisi dan ditanamkan dalam praktik sosial dan sejarah.
 - c. Konflik sosial atau *social order*: Konflik sosial diasumsikan ada. Konflik ditengahi melalui skema umum makna sosial.
3. Hubungan antara teori dan praktik: Teori hanya mencari untuk menjelaskan dan memahami bagaimana *social order* dihasilkan dan direproduksi.

Asumsi dominan dalam perspektif kritikal adalah:

1. Keyakinan mengenai pengetahuan, yang meliputi:
 - a. Epistemologi: Kriteria terhadap teori adalah temporal dan dibatasi oleh konteks.
 - b. Metodologi: Penelitian etnografi, kesejarahan dan studi kasus sering digunakan.
4. Keyakinan mengenai fisik dan realitas sosial, yang meliputi:
 - a. Ontologi: manusia mempunyai potensi yang dijauhkan (dicegah untuk mekar penuh) melalui

mekanisme pembatasan. Obyek hanya dapat dimengerti melalui suatu studi pengembangan kesejarahan dan perubahan dalam totalitas hubungan. Realitas empiris diberi karakteristik secara obyektif, hubungan riil ditransformasi dan direproduksi melalui interpretasi subyektif.

- b. Intensi manusia, dan rasionalitas: Intensi manusia, rasionalitas, dan agensi diterima, namun dianalisis secara kritis.
 - c. Konflik sosial atau *social order*: Konflik sosial adalah endemik bagi masyarakat. Konflik timbul karena ketidakadilan dan ideologi dalam domain sosial, ekonomi, dan politik yang mengaburkan dimensi kreatif manusia.
5. Hubungan antara teori dan praktik: Teori mempunyai suatu imperatif kritikal. Identifikasi dan penghilangan dominasi dan praktik ideologi.

Chua mengajukan dua perspektif analisis yaitu interpretatif dan kritikal yang jika diterapkan merupakan akuntansi *nonmainstream* untuk masa sekarang. Pemikiran Chua tetap memberikan arti dalam proses pengembangan teori akuntansi, walaupun aliran ini belum banyak penganutnya dalam akuntansi yang berkiblat ke Amerika Serikat. Penganut aliran tersebut banyak terdapat di Australia dan Eropa.

SIMPULAN

Setiap aliran dalam filsafat mempunyai metode berpikir tertentu sehingga metode berpikir aliran apapun dalam filsafat mempunyai peluang untuk digali dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu akuntansi. Pragmatisme sangat dominan mempengaruhi akuntansi yang berkiblat ke Amerika Serikat. Pemahaman ontologi, epistemologi, dan aksiologi aliran pragmatisme oleh akuntan-akuntan dari negara-negara yang berkiblat ke akuntansi Amerika Serikat akan memberikan nilai lebih, kalau tidak merupakan suatu keharusan untuk peningkatan kualitas akuntan dan pengembangan ilmu akuntansi di negaranya masing-masing. Empirisme mempunyai tempat dalam akuntansi karena bahan baku akuntansi adalah fakta atau empiri berupa transaksi-transaksi ekonomi. Penelitian-penelitian empiris cukup banyak dilakukan dalam pengembangan ilmu akuntansi. Positivisme mempunyai peluang untuk menyumbangkan pola pemikirannya dalam pengembangan akuntansi, walaupun penggunaan

istilah positif dalam teori akuntansi positif tidak mencerminkan arti positif dalam positivisme. Pendekatan interpretatif dan kritikal dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian-penelitian akuntansi yang sesuai dengan karakteristik obyek dan metode dalam kedua pendekatan tersebut. Pemahaman dan

penguasaan metode berpikir filsafati menjadi suatu keharusan bagi para akuntan peneliti karena merekalah yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu akuntansi dan penguasaan metode berpikir filsafat dapat menjadi alat analisis yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

Beam, F. A., "Indications of Pragmatism and Empiricism in Accounting Thought", *The Accounting Review*, 1969.

Belkaoui, A. R., "*Accounting Theory*", Orlando:Harcourt Brace & Company: 1993.

Chua, W. F. "Radical Development in Accounting Thought", *The Accounting Review*, 1986.

Christenson, C. "The Methodology of Positive Accounting", *The Accounting Review*, 1983.

Delfgauw, B., "Filsafat Abad 20", Yogyakarta: Tiara Wacana, 1972.

Dopuch, N., "Metaphysics on Pragmatism and Accountancy", *The Accounting Review*, 1962.

FASB, "Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, Connecticut: 1978

FASB, "Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, Connecticut: 1980

FASB, "Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, Connecticut: 1985.

Gallagher, K. T., "Epistemologi Filsafat Pengetahuan", Yogyakarta: Kanisius, 1994.

IAI, "Standar Akuntansi Keuangan", Jakarta: Salemba Empat: 1994.

Kattsoff, O. L., "Pengantar Filsafat", Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Littleton A.C. dan Paton, W.A., "An Introduction to Corporate Accounting Standards, AAA: 1940.

Sutrisno, M., "Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu Ilmu: Pragmatisme, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Watts R. I. dan Zimmermman, J. L., "Positive Accounting Theory", New Jersey: 1986.

Wibisono, K., "Arti Perkembangan Menurut Positivisme Auguste Comte", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 1996.

INVESTIGASI EMPIRIS PADA REAKSI PASAR TERHADAP PUBLIC ANNOUNCEMENTS: PENGUJIAN THE EFFICIENCY HYPOTHESIS DI THIN MARKET

Indah Kurniawati^{)}
Sinta Sudarini^{**)}*

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the effect of public announcements-right issue, bonus share, earnings, dividend and stock split-on market reaction in the Jakarta Stock Exchange. Since the Jakarta Stock Exchange is a market with thin trading, therefore, this study employs a research method which is appropriate for such market.

The result of this study show that around the date of announcements (1) right issue, bonus share and dividend are responded positively but not statistically significant (2) Earning is responded positively and statistically significant (3) stock split is responded negatively and statistically significant.

Keywords : Public Announcement, thin market, efficiency market hypothesis, market reaction

PENDAHULUAN

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan yang penting untuk mempengaruhi segala macam bentuk transaksi perdagangan di pasar modal tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelaku di pasar modal akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap

setiap pengumuman atau informasi yang masuk ke bursa efek tersebut. Informasi atau pengumuman-pengumuman yang diterbitkan oleh emiten akan mempengaruhi para (calon) investor dalam mengambil keputusan untuk memilih portofolio investasi yang efisien. Dalam pasar yang efisien, informasi yang masuk ke bursa efek akan tercermin pada harga-harga surat berharga. Pasar akan memproses informasi yang relevan kemudian pasar akan mengevaluasi harga saham berdasarkan informasi tersebut. Beberapa macam informasi atau pengumuman yang dapat mempengaruhi harga sekuritas adalah *earnings announcement*, *forecast announcements*, *dividend announcement*, *financing announcement* dan lain-lain.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda bahkan kontroversi mengenai efek pengumuman tersebut. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Myers dan Maljuf (1984), Healey dan Palepu (1990), Fama et al. (1969), Ewijaya dan Indriantoro (1998), Miller dan Modigliani (1961), Lako (2002); hasil temuannya menunjukkan bahwa pasar melakukan reaksi yang negatif bahkan signifikan pada pengumuman-pengumuman yang diterbitkan oleh emiten di bursa efek. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Loderer dan Zimmerman (1988), Smith (1977), Mc. Nichols & Dravid (1990),

^{*)} Indah Kurniawati, SE., M.Si., adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

^{**)} Dra. Sinta Sudarini, MS., Akuntan., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

Brennan & Hughes (1991), Na'im & Finn (2000) menunjukkan hasil yang berlawanan yakni para pelaku pasar memberikan respon yang positif terhadap pengumuman-pengumuman tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian di Bursa Efek Jakarta ini mempertimbangkan kondisi transaksi perdagangan yang jarang terjadi atau biasa disebut pasar yang tipis (*thin market*). Pasar yang tipis ini merupakan ciri dari pasar modal yang sedang berkembang, sehingga beta untuk pasar modal yang berkembang perlu disesuaikan terlebih dahulu untuk mengurangi ketidakakuratan hasil estimasi return yang diharapkan dari suatu investasi (Hartono, 1999).

Permasalahan utama pada penelitian ini adalah apakah pasar memberikan reaksi terhadap *corporate action* atau pengumuman *right issue*, *bonus share*, *dividend*, *earnings* dan *stock split* apabila terlebih dahulu dilakukan koreksi terhadap bias beta di Bursa Efek Jakarta. Bertitik tolak dari hasil penelitian yang kontroversi tersebut, penelitian ini bertujuan menguji secara empiris mengenai reaksi pasar dengan terlebih dahulu melakukan koreksi terhadap bias beta Fowler & Rorke (1983) empat lag dan empat lead yang telah terbukti secara empiris paling mampu mengurangi bias beta di Bursa Efek Jakarta (Hartono dan Suriyanto, 1999). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih akurat bagi para atau calon investor dan praktisi bisnis dalam menganalisis ekspektasi pasar di Bursa Efek Jakarta.

LANDASAN TEORIDAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Informasi yang tersedia terdiri dari informasi masa lalu, informasi yang sedang dipublikasikan dan informasi privat. Teori pasar efisien dihubungkan dengan apakah harga sekuritas pada suatu waktu mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Suatu pasar yang harga-harga sekuritasnya mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia disebut efisien.

Fama et al. (1969) menyajikan tiga bentuk efisiensi pasar berdasarkan informasi, yaitu

1. Pasar efisien bentuk lemah (*weak form*)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika

harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Efisiensi pasar bentuk lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk theory).

2. Pasar efisien bentuk setengah kuat (*semistrong form*)

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten.

3. Pasar efisien bentuk kuat (*strong form*)

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat.

Informasi yang ditanggapi oleh pasar adalah informasi baru yang tidak diharapkan oleh pasar sehingga menimbulkan perubahan kepercayaan dan menimbulkan reaksi yang memotivasi untuk melakukan perdagangan saham. Informasi baru yang sudah diestimasi oleh pasar tidak akan menimbulkan reaksi pasar. Perdagangan saham dapat terjadi jika investor mempunyai kecermatan yang berbeda terhadap informasi yang diperoleh.

Jogiyanto (1998) menambahkan bentuk pasar efisien juga dapat dilihat dari keputusan, ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah suatu informasi. Berdasarkan bentuk pasar efisien secara keputusan ini, investor digolongkan menjadi dua yaitu investor yang canggih (sophisticated) dan investor yang kurang atau tidak canggih (naive). Untuk mengolah suatu informasi dengan benar pelaku pasar harus canggih (sophisticated). Jika sebagian saja pelaku pasar yang canggih, maka kelompok ini dapat menikmati abnormal return disebabkan karena mereka dapat menginterpretasikan informasi dengan benar dibandingkan pelaku pasar yang tidak canggih (naive). Sedangkan investor yang naive memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima sehingga mereka sering melakukan keputusan yang salah. Dengan keputusan salah tersebut akibatnya keputusan sekuritas yang bersangkutan dinilai tidak tepat.

Menurut Jogiyanto (1998), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi setiap pengumuman yang

diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya adanya perubahan pada volume perdagangan, perubahan pada harga saham, bid/ask spread, proporsi kepemilikan dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, sehingga direaksi oleh para pelaku di pasar modal. Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi jika pada saat transaksi perdagangan terjadi, terdapat perubahan terutama perubahan harga saham. Perubahan harga saham ini mengakibatkan para pelaku di pasar modal mendapatkan abnormal return. Abnormal return ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku di pasar modal.

Right Issue merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini (*existing shareholders*), sehingga dalam hal ini pemegang saham memiliki hak *preemptive right* atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham baru tersebut (Darmadji & Fakhruddin, 2001).

Perusahaan emiten lebih tertarik untuk menerbitkan *right issue* daripada menawarkan saham ke investor baru karena emiten tidak harus membayar fee untuk *underwriter* dan tidak perlu mendistribusikan kemakmuran kepada investor baru. Oleh karena itu biasanya *right issue* ini dibatasi hanya untuk pemegang saham lama, sehingga sering disebut sebagai penawaran terbatas (*limited offering*) (Husnan, 1998)

Penerbitan *Right Issue* biasanya ditujukan untuk mendapat dana tambahan dari investor/masyarakat baik untuk kepentingan ekspansi, restrukturisasi dan lain-lain. Umumnya harga saham perusahaan setelah emisi *right* secara teoritis akan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena harga pelaksanaan emisi *right* selalu lebih rendah dari harga pasar (Darmadji & Fakhruddin, 2000)

Menurut Miller dan Rock (1985), hipotesis *negative information effect* menyatakan bahwa *Right Issue* merupakan sinyal negatif sehingga pasar melakukan respon yang negatif. Hal ini disebabkan oleh keyakinan para investor yang menganggap bahwa dana yang diperoleh dari aktivitas *Right Issue* ini digunakan manajemen untuk membiayai hutang yang telah jatuh tempo atau mendanai suatu proyek yang memiliki NPV

nol atau malah negatif, sehingga hal tersebut merupakan *bad news* bagi investor.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, terutama mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman *right Issue*, menunjukkan hasil yang berbeda-beda, bahkan menunjukkan kontroversi. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Myers dan Maljuf (1984), Healey dan Palepu (1990), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah pengumuman *right Issue* terjadi penurunan terhadap harga saham, atau dengan kata lain pasar memberikan respon negatif terhadap *right Issue*. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Loderer dan Zimmerman (1988), Smith (1977), justru menunjukkan hasil yang berlawanan yakni pasar melakukan reaksi positif dan signifikan.

Di Indonesia, penelitian mengenai *right Issue* dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999). Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, pada *return saham* dan volume perdagangan disekitar tanggal pengumuman. Sementara yang dilakukan oleh Yusi (2001) menunjukkan hasil yang berbeda yakni pasar memberikan reaksi negatif pada *short event windows* maupun pada *long event windows*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *abnormal return* yang negatif.

Berdasarkan beberapa argumentasi diatas dan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman *right issue* yang ditunjukkan dengan adanya *abnormal return*

Bonus share merupakan bonus pembagian saham baru untuk para pemegang saham, sebagai bentuk reward. Saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten kepada pemegang saham tersebut dapat berasal dari kapitalisasi agio saham atau dapat pula berasal dari selisih kembali penilaian aktiva tetap. Besarnya bonus ditentukan dalam rapat umum pemegang saham, yang besarnya dinyatakan dalam satuan rasio, berapa pemegang saham lama mendapatkan tambahan saham baru. Dampak dari saham bonus ini adalah meningkatnya jumlah saham yang beredar. Dengan kata lain, saham bonus berakibat pada meningkatnya faktor penawaran saham dan

dengan asumsi permintaan tetap maka dapat berakibat pada turunnya harga saham atau terjadi koreksi atas harga saham sesuai faktor koreksinya. (Darmadji & Fakhruddin, 2000)

Na'im & Finn (2000) melakukan penelitian terhadap 371 pengumuman *bonus share* di *Singapore Stock Exchange* di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *cumulative abnormal return* di sekitar pengumuman *bonus share* menggambarkan nilai yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa *bonus share* ini dianggap sebagai pengumuman yang bagus bagi para pelaku pasar di *Singapore Stock Exchange* di mana mereka beranggapan bahwa perusahaan yang melakukan pengumuman *bonus share* adalah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang bagus.

Berdasarkan argumentasi dan hasil penelitian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman *bonus share* yang ditunjukkan dengan adanya *abnormal return*

Stock split merupakan suatu fenomena yang masih diperdebatkan dan menjadi teka-teki dibidang ekonomi (Brigham dan Gapenski, 1994). Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakcocokan antara teori dan praktik. Secara teoritis, *stock split* ini hanya meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar, tidak menambah kesejahteraan para investor dan tidak memberikan tambahan nilai ekonomi bagi perusahaan atau tidak secara langsung mempengaruhi *cash flow* perusahaan. Tetapi beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman *stock split*, bahkan beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang kontroversial mengenai efek *split* tersebut. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Mc. Nichols & Dravid (1990) dan Brennan & Huges (1991). Hasil temuannya menunjukkan bahwa pengumuman *stock split* memiliki kandungan informasi yang direaksi secara positif oleh para pelaku di pasar modal. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Fama et .al (1969), Wiggin (1992) justru menunjukkan hasil yang berlawanan yakni pasar tidak melakukan reaksi terhadap pengumuman *stock split*.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh *stock split* terhadap harga saham dilakukan oleh

Ewijaya dan Indriantoro (1998). Temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *stock split* berpengaruh secara negatif terhadap perubahan harga saham secara signifikan. Sementara itu, Fatmawati (1999) menganalisis *bid ask spread* diseperti pengumuman *stock split*. Temuannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham, *volume turn over* dan *bid ask spread* pada saat sebelum dan setelah *stock split*.

Berdasarkan beberapa argumentasi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman *stock split* yang ditunjukkan dengan adanya *abnormal return*

Kebijakan dividen sampai saat ini masih merupakan teka-teki yang masih terus diperdebatkan. Perbedaan itu berkisar tentang apakah dividen dapat dikatakan sebagai *good news* atau *bad news* bagi para pemegang saham atau investor, atau dengan kata lain bahwa dapatkah dividen itu dijadikan sebagai sinyal tentang nilai perusahaan (*value of firm*) pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dividen merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen itu sendiri dalam bentuk tunai (*cash dividend*) atau pun dividen saham (*stock dividend*). Dividen interim atau sementara menunjukkan bahwa dividen tersebut merupakan dividen yang sifatnya sementara, sehingga dimungkinkan adanya pemberian dividen lanjutan sehingga tercipta nilai dividen yang sifatnya final untuk tahun buku tertentu. Setelah dikeluarkan dividen final maka tidak ada lagi tambahan dividen untuk tahun buku tersebut. Dividen final diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. (Darmadji & Fakhruddin, 2000)

Pengujian secara empiris terhadap pengumuman dividen telah banyak dilakukan dengan hasil yang tidak konsisten. Pettit (1972) menemukan bahwa pasar melakukan reaksi yang sangat cepat terhadap pengumuman peningkatan atau penurunan dividen. Namun, Watts (1973) menemukan bahwa perubahan dividen hanya sedikit membawa informasi tentang laba masa depan perusahaan dan tidak

ditemukan *abnormal return* disekitar pengumuman dividen (Healy dan Palepu, 1988) yang mendukung hipotesis kandungan informasi dividen yang diusulkan oleh Miller dan Modigliani (1961). Healy dan Palepu (1988) menguji sampel 131 perusahaan yang membayar dividen pertamakalinya dan 172 perusahaan yang menghapus dividen pertamakalinya antara tahun 1969 dan 1980. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan untuk membayar atau menghapus dividen pertamakalinya ditafsirkan oleh pasar sebagai ramalan perusahaan mengenai peningkatan dan penurunan laba masa depan.

Berdasarkan beberapa argumentasi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman *dividen* yang ditunjukkan dengan adanya *abnormal return*

Laba merupakan salah satu komponen penting untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Ball dan Brown (1968) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pengumuman laba dan harga saham di *New York Stock Exchange*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan laba tahunan berasosiasi dengan perubahan harga saham dengan arah yang sama. Beaver (1968) menguji secara empiris mengenai muatan informasi laba. Hasilnya menunjukkan bahwa pasar melakukan reaksi terhadap informasi akuntansi terutama pengumuman laba yang tercermin dari harga saham yang meningkat secara signifikan di sekitar tanggal pengumuman laba. Sementara penelitian yang dilakukan Foster (1977) menunjukkan hasil bahwa dua hari sejak pengumuman laba, harga saham berubah secara signifikan.

Bamber (1987) melakukan pengujian mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman *earnings* kuartalan dengan mempertimbangkan salah satu faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi yakni ukuran perusahaan (*firm size*). Kesimpulannya menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang lebih sedikit mengungkapkan informasi keuangannya daripada perusahaan besar, mendapat respon pasar lebih besar yang ditunjukkan dengan adanya volume penjualan meningkat tajam. Berdasarkan *spearman rank correlation test*, tampak bahwa volume penjualan berkorelasi

negatif dengan ukuran perusahaan ($\alpha < 0.001$).

Ball and Walts (1972) menguji sifat-sifat data *time series* yang dikaitkan dengan *income* perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penurunan *net income* dan perilaku EPS sangat mirip dan korespondensi antara ranking untuk *net income* dan *submartingale* dengan *trend linear* sangat dekat. Penjualan berhubungan dengan *submartingale* dan *trend*, sedangkan data *net income* aktual memberikan ranking yang mirip pada *martingale* dan *submartingale* dengan *trend*.

Berdasarkan beberapa argumentasi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman *laba* yang ditunjukkan dengan adanya *abnormal return*

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga pasar saham dan data harga saham dari perusahaan-perusahaan yang mengumumkan *right issue, bonus shares, dividen, laba dan stock split* selama periode 1992-1996. Data yang diperlukan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta. Sampel yang digunakan dibersihkan dari pengumuman lain untuk menghindari *confounding effect*.

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta. Sampel diambil dari populasi dengan beberapa kriteria atau secara *purposive sampling*, yakni perusahaan yang aktif terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan melakukan *corporate action* seperti *stock split, right issue, bonus share, earnings* dan *dividend* yang tercermin pada pengumuman-pengumuman yang dilakukan emiten. Data diambil dari database Bursa Efek Jakarta, *Indonesian Capital Market Directory* dan sumber lain yang berhubungan.

Sampel pada penelitian ini diambil dari saham yang melakukan pengumuman-pengumuman yang diteliti, yakni pengumuman *right issue, bonus shares, dividen, laba dan stock split* selama periode 1992-1996. Hasil dari sampling menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *right issue* pada periode tersebut terdapat 26 perusahaan, sedangkan perusahaan yang

melakukan *bonus share* terdapat 51 perusahaan, perusahaan yang melakukan *stock split* terdapat 62 perusahaan dan perusahaan yang mengumumkan dividen meningkat dan menurun terdapat 50 perusahaan serta perusahaan yang mengumumkan laba diambil duapertiga dari semua perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta karena dianggap sudah dapat mewakili semua perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Jakarta tersebut.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *market model* yang digunakan oleh Brown and Warner (1985) dalam event studi. Return saham harian dan return pasar harian diregresikan sehingga diperoleh a dan b. Selanjutnya *expected return* dihitung selama *event period*. Windows period yang digunakan dalam penelitian ini 11 hari yakni 5 (lima) hari sebelum pengumuman, saat pengumuman dan 5 (lima) hari setelah pengumuman diterbitkan oleh emiten. *Abnormal return* diperoleh dari selisih antara return saham dengan *expected return*. Pengumuman *Right issue* kemudian diuji dengan menggunakan Uji-T untuk melihat signifikansinya dengan tingkat signifikan 5%. Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

- a. Menghitung return saham harian individual untuk *estimation period*

$$R_{mt} = \frac{IHS_{Gt} - IHS_{Gt-1}}{P_{it} - 1}$$

- b. Menghitung return pasar harian :

$$R_{it} = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}}$$

Return saham harian dan return pasar harian diregresikan sehingga diperoleh a dan b

$$\beta = \frac{n(y) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$\alpha = \frac{\sum y - \beta(\sum x)}{n}$$

Pasar Modal di Indonesia khususnya Bursa Efek Jakarta merupakan pasar modal yang

perdagangannya tidak sinkron. Hal ini terjadi karena Bursa Efek Jakarta merupakan pasar yang transaksi perdagangannya jarang terjadi atau disebut dengan pasar yang tipis (*thin market*) sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu karena mengandung bias. Hartono dan Suriyanto (1999) melakukan penelitian mengenai bias yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda *beta koreksi* Fowler dan Rorke (1983) dengan periode koreksi *empat lead* dan *empat lags* dianggap paling mampu untuk mengoreksi bias beta di Bursa Efek Jakarta.

- c. Mengestimasi beta dengan metode koreksi Fowler dan Rorke

$$R_{it} = a_i + b_i - 4R_{mt-4} + b_i - 3R_{mt-3} + b_i - 2R_{mt-2} + b_i - 1R_{mt-1} + b_0 R_{mt} + b_4 R_{mt+4} + b_3 R_{mt+3} + b_2 R_{mt+2} + b_1 R_{mt+1} + e_{it}$$

Besarnya beta perusahaan ke-i yang telah dikoreksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Arif dan Johnson, 1990) :

$$b_i = W_4 b_{i-4} + W_3 b_{i-3} + W_2 b_{i-2} + W_1 b_{i-1} + b_0 + W_1 b_{i+1} + W_2 b_{i+2} + W_3 b_{i+3} + W_4 b_{i+4}$$

- d. Menghitung *expected return* untuk *estimation period* menggunakan *Single Index Model* :

$$E(R_{it}) = a_i + b_i R_m$$

- e. Mencari *abnormal return* pada *estimation period* :

$$AR_{it} = R_{it} - E(R_{it})$$

Pada *event period* :

- a. Menghitung *return* saham harian individual
- b. Menghitung *return* pasar harian
- c. Menghitung *expected return*
- d. Selanjutnya menghitung *abnormal return*
- e. Menghitung *average abnormal return* untuk setiap hari selama event period

$$AAR_t = \frac{1}{k} \sum AR_{it}$$

f. Menghitung CAAR selama *event period* dengan rumus :

$$CAAR_t = \sum_{t=-5}^{t=5} AAR_t$$

$$KSE_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=t-1}^{i2} R_{ij} - Rt}{T - 2}}$$

g. Pengujian statistik (*t-test*) untuk menguji signifikansi hipotesis pertama terhadap *average abnormal return* pada *event period* bertujuan untuk melihat signifikansi *average abnormal return* tersebut. *Standar abnormal return* *i,t* diartikan sebagai nilai *t*-hitung untuk masing-masing *abnormal return* sekuritas *i* pada hari ke-*t*. Sedangkan *standar average abnormal return-t* merupakan nilai *t*-hitung untuk *average abnormal return* pada hari-*t* selama *event period* (Hartono, 1998).

$$SAAR_t = \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{i=1}^k SAR_{i,t}$$

h. Menentukan *Standardized Cummulative Average Abnormal return* dengan rumus :

ANALISIS HASIL PENGUJIAN

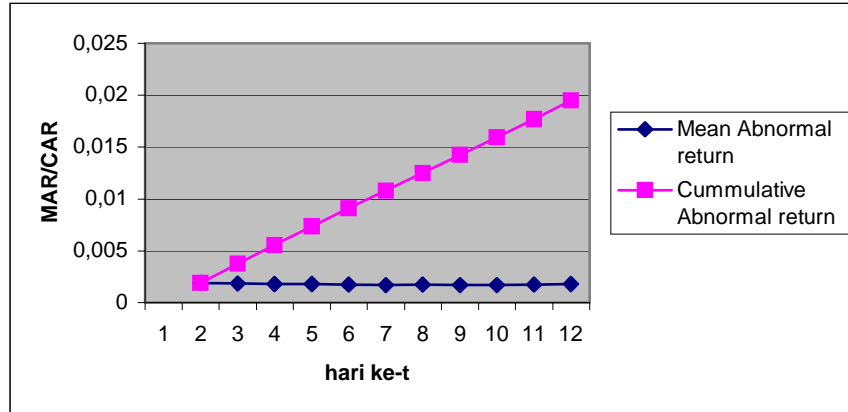
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis terhadap reaksi pasar pada pengumuman *Right Issue*, pengumuman *Bonus Share*, pengumuman *Stock Split*, pengumuman Dividen dan pengumuman Laba dengan terlebih dahulu dilakukan koreksi terhadap bias beta yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil pengujian *abnormal return* di seputar pengumuman *right issue*
(Sampel terdiri atas 26 perusahaan)

Hari ke-t	Mean Abnormal return	Cummulative Abnormal return	t-hitung	Keterangan
-5	0,001882	0,001882	-4163,038373	Tidak Signifikan
-4	0,0018612	0,0037432	-4171,465158	Tidak Signifikan
-3	0,0018088	0,005552	-4181,408947	Tidak Signifikan
-2	0,0018032	0,0073552	-4190,423568	Tidak Signifikan
-1	0,0017264	0,0090816	-4152,511461	Tidak Signifikan
0	0,0017116	0,0107932	-4164,133976	Tidak Signifikan
1	0,0017272	0,0125204	-4136,146027	Tidak Signifikan
2	0,001718	0,0142384	-4144,087009	Tidak Signifikan
3	0,0017024	0,0159408	-4153,258624	Tidak Signifikan
4	0,0017592	0,0177	-4170,028188	Tidak Signifikan
5	0,001818	0,019518	-4133,712163	Tidak Signifikan

Hasil pengolahan spss

Grafik:



Berdasarkan tabel ditunjukkan bahwa *mean abnormal return* dan *cummulative abnormal return* menunjukkan hasil yang positif meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar memberikan respon yang positif terhadap pengumuman *Right issue*. Padahal *right issue* itu sendiri merupakan *bad news* di pasar modal, sehingga hal ini

mengindikasikan bahwa sebagian para pelaku pasar yakni (calon) investor telah menerima *assymetry information*, di mana mereka telah mendapatkan informasi yang baik/ menguntungkan dari perusahaan emiten yang melakukan *right issue* tersebut.

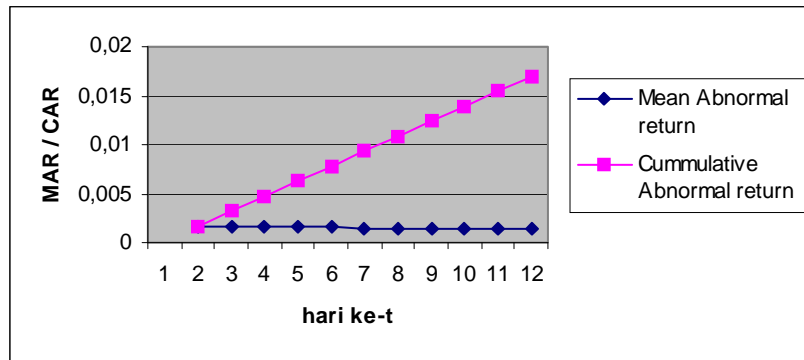
Hasil Pengujian terhadap reaksi pasar pada pengumuman *bonus share* sebagai berikut

Tabel 2
Hasil pengujian *abnormal return* di seputar pengumuman *bonus share*
(Sampel terdiri atas 51 perusahaan)

Hari ke-t	<i>Mean Abnormal return</i>	<i>Cummulative Abnormal return</i>	t-hitung	Keterangan
-5	0,001606604	0,001606604	-0,90680901	Tidak Signifikan
-4	0,001575472	0,003182075	-0,197052453	Tidak Signifikan
-3	0,001553019	0,004735094	0,100528889	Tidak Signifikan
-2	0,001558868	0,006293962	-0,854238353	Tidak Signifikan
-1	0,001552642	0,007846604	-0,155076277	Tidak Signifikan
0	0,001508491	0,009355094	-0,808221986	Tidak Signifikan
1	0,001498868	0,010853962	-1,888120432	Signifikan
2	0,001518302	0,012372264	-0,195584665	Tidak Signifikan
3	0,001529811	0,013902075	-0,708060386	Tidak Signifikan
4	0,001509434	0,015411509	0,965753653	Tidak Signifikan
5	0,001489623	0,016901132	0,237616845	Tidak Signifikan

Hasil pengolahan spss

Grafik:



Berdasarkan tabel ditunjukkan bahwa *mean abnormal return* dan *cumulative abnormal return* menunjukkan hasil yang positif meskipun secara keseluruhan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar memberikan respon yang positif terhadap pengumuman *Bonus share*. Reaksi positif tersebut disebabkan karena para pelaku di pasar

modal mempunyai anggapan bahwa hanya perusahaan yang memiliki kinerja yang baguslah yang mampu memberikan *bonus share* kepada para pemilik saham, sehingga hal ini mengakibatkan pasar menanggapi secara positif pengumuman *bonus share* tersebut.

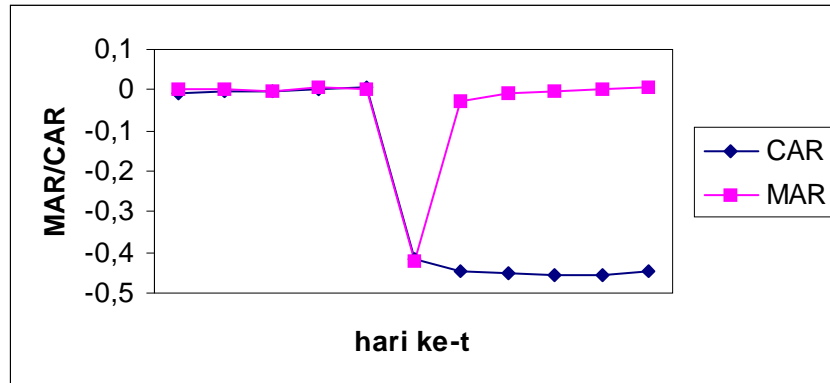
Hasil Pengujian mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman stock split adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil pengujian *abnormal return* di seputar pengumuman *Stock split*
(Sampel terdiri atas 62 perusahaan)

Hari ke-t	<i>Mean Abnormal Return</i>	<i>Cumulative Abnormal Return</i>	t-hitung	Keterangan
-5	-0,00589	-0,00589	-2,57070	Signifikan
-4	0,00351	-0,00238	1,41034	Tidak Signifikan
-3	-0,00157	-0,00395	0,40298	Tidak Signifikan
-2	0,00526	0,00131	1,07951	Tidak Signifikan
-1	0,00299	0,00431	0,60042	Tidak Signifikan
0	-0,42207	-0,41776	-135,15815	Signifikan
1	-0,02823	-0,44599	-5,39797	Signifikan
2	-0,00722	-0,45321	-3,51882	Signifikan
3	-0,00377	-0,45698	-0,99873	Tidak Signifikan
4	0,00214	-0,45484	0,18029	Tidak Signifikan
5	0,00664	-0,44819	1,54835	Tidak Signifikan

Hasil Pengolahan spss

Grafik:



Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pasar secara tidak stabil merespon pengumuman stock split tersebut. *Mean abnormal return* dan *cumulative abnormal return* 5 hari sebelum terjadi pengumuman menunjukkan hasil yang negatif meskipun tidak signifikan, begitu juga pada saat 3 hari setelah pengumuman *stock split*. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar merespon secara negatif pengumuman *stock*

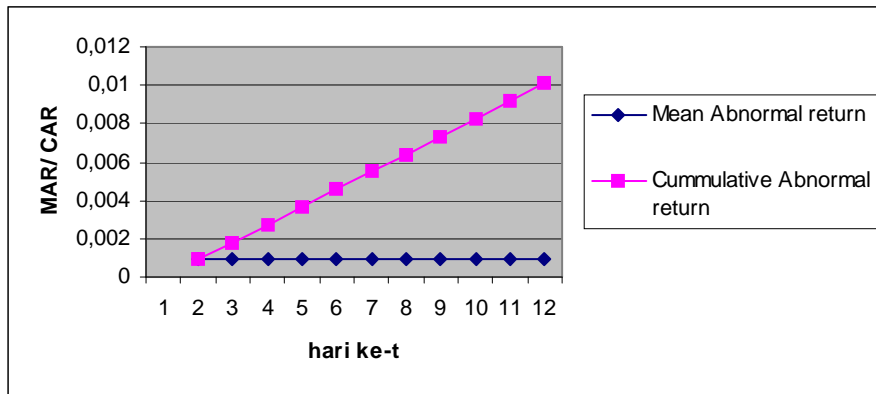
split. Hal ini disebabkan karena investor sudah mengetahui terlebih dahulu berita mengenai *stock split* tersebut atau hal ini disebabkan adanya *asymetry information*, dimana sebagian calon investor sudah mengetahui terlebih dahulu informasi yang ada di perusahaan yang melakukan *stock split* tersebut. Sementara itu hasil pengujian terhadap pengumuman dividen menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil pengujian *abnormal return* di seputar pengumuman *dividen*
(Sampel terdiri atas 50 perusahaan)

Hari ke-t	<i>Mean Abnormal return</i>	<i>Cummulative Abnormal return</i>	t-hitung	Keterangan
-5	0,000913	0,000913	-0,820420258	Tidak Signifikan
-4	0,0009116	0,0018246	-6086,586414	Tidak Signifikan
-3	0,000916	0,0027406	1,463041982	Tidak Signifikan
-2	0,0009186	0,0036592	-11179,1747	Tidak Signifikan
-1	0,0009104	0,0045696	0,410290272	Tidak Signifikan
0	0,0009126	0,0054822	0,311305372	Tidak Signifikan
1	0,0009104	0,0063926	-1,902474549	Tidak Signifikan
2	0,0009094	0,007302	1,627364396	Tidak Signifikan
3	0,0009288	0,0082308	-2,322247052	Tidak Signifikan
4	0,000934898	0,009165698	-1,317722181	Tidak Signifikan
5	0,000934583	0,010100281	-0,287250482	Tidak Signifikan

Hasil pengolahan spss

Grafik:



Berdasarkan tabel dan grafik menunjukkan bahwa pasar memberikan respon yang positif terhadap pengumuman dividen. Hal ini terlihat pada adanya *abnormal return* yang positif meskipun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembagian dividen yang diberikan oleh perusahaan emiten ditanggapi secara positif oleh investor. Selain itu juga

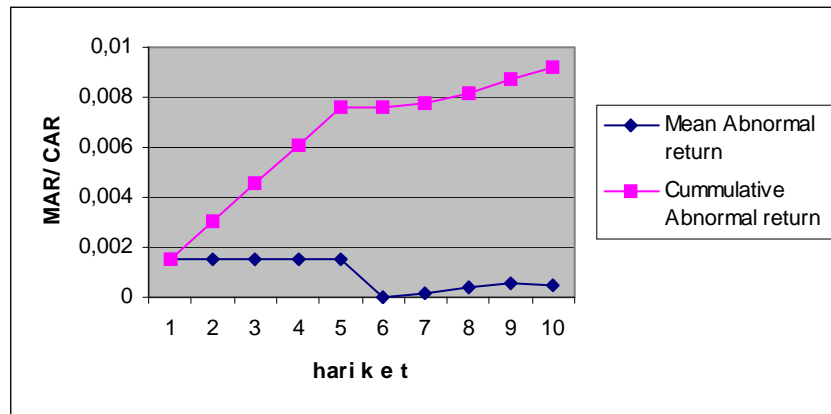
menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan dividen menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba sehingga dapat memberikan dividen kepada para pemegang saham.

Hasil pengujian mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman laba sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil pengujian *abnormal return* di seputar pengumuman laba
(Sampel terdiri atas 90 perusahaan)

Hari ke-t	Mean Abnormal return	Cummulative Abnormal return	t-hitung	Keterangan
-5	0,001516705	0,001516705	-7,039352579	Signifikan
-4	0,001514091	0,003030795	-1,876511015	Signifikan
-3	0,00151375	0,004544545	2,336914247	Signifikan
-2	0,001507955	0,0060525	0,303228935	Tidak Signifikan
-1	0,001510114	0,007562614	-6,409107952	Signifikan
1	0	0,007562614	0	Tidak Signifikan
2	0,000176364	0,007738977	-14,27444844	Signifikan
3	0,000418409	0,008157386	-14,13070784	Signifikan
4	0,000541023	0,008698409	-11,60315311	Signifikan
5	0,000501818	0,009200227	-3,856223239	Signifikan

Grafik:



Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pasar memberikan reaksi yang positif secara signifikan pada pengumuman laba di Bursa Efek Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar dapat menyerap informasi yang disampaikan oleh perusahaan emiten dengan bagus. Selain itu juga menunjukkan bahwa pelaku pasar menanggapi pengumuman laba tersebut secara tepat, hal ini terlihat dari *mean abnormal return* dan *cumulative abnormal return* yang positif.

SIMPULAN

Para pelaku pasar modal baik para investor maupun calon investor di pasar modal khususnya Bursa Efek Jakarta memberikan reaksi terhadap setiap pengumuman yang masuk ke bursa. Hal ini berarti menunjukkan bahwa para pelaku pasar sudah memberikan respon yang tepat dan tidak *foolish*

terhadap informasi yang diterbitkan oleh para emiten. Pengumuman *right issue*, *bonus share*, *earnings* dan *dividend* direaksi positif secara statistik oleh pasar, sementara pengumuman *stock split* direaksi secara negatif. Reaksi pasar yang diamati selama periode pengamatan ini menunjukkan reaksi yang tidak signifikan.

SARAN

Pada penelitian-penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan memisahkan antara perusahaan yang memberikan pengumuman berdasarkan *size*, jenis industri dan lain sebagainya. Selain itu dapat pula menambah *windows period* untuk penelitian selanjutnya supaya setiap pengumuman yang masuk ke Bursa Efek Jakarta dapat terserap secara penuh oleh para pelaku di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Brennan, M.J. and P.J. Hughes, 1991, Stock Pices and The Supply of Information, *Journal of Finance*, Vol. 46, pp. 1665-1691
- Brigham, E.F., L.C Gapenski, 1994, *Financial Management: Theory & Practice*, Orlando, The Dryden Press
- Budiarto, Arif dan Zaki Baridwan, 1999. "Pengaruh Pengumuman Right Issue terhadap Tingkat Keuntungan dan Likuiditas Saham di Bursa Efek Jakarta periode 1994-1996". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Januari 1999.
- Darmadji Tjiptono & Hendy M.F., "Pasar Modal di Indonesia", *Salemba Empat*, Jakarta, 2001.
- Ewijaya dan Nur Indriantoro, 1999, Analisis Pengaruh P, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Pemecahan Saham terhadap Perubahan Harga Saham, hal 53-65
- Fama, Eugene., Lawrence Fisher, Michael C. Jensen and Richard Roll, 1969, The Adjustment of Stock Prices to new Information, *Internatioanl Ecinomic Review* 10:1, pp.1-21
- Fatmawati, 1999, Pengaruh Stock Split terhadap likuiditas saham yang diukur dengan besarnya Bid-ask spread di Bursa Efek Jakarta, *Thesis S2 Program Studi Akuntansi UGM, Yogyakarta*
- Fowler, D.J., dan C.H. Rorke, 1983, "The Risk Measurement When Shares are Subject to Infrequent Trading", *Jornal of Financial Economics*, 12, hal. 279-289
- Hartono, J., dan Surianto, 1999, "Bias Di Beta Sekuritas dan Koreksinya Untuk Pasar Modal yang Sedang Berkembang: Bukti Empiris Di Bursa Efek Jakarta", *Makalah Seminar*, pada Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian, Forum Komunikasi Penelitian Manajemen dan Bisnis, UNDIP Semarang
- Healey, Paul dan Khrisna G Palepu, 1990. "Earning and Risk Charges Surrounding Primary Stock Offer". *Journal of Accounting Research*. Vol. 28, Spring.
- Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Kedua, Yogyakarta. AMP YKPN, 1996
- Jogiyanto, H.M., 1998, *Teori Portofolio & Analisis Invensi*, BPFE, Yogyakarta
- Lako. A. 2002. "Market reaction to Earnings Announcements With and Without Confounding Effect" Simposium dwi tahunan *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, Yogyakarta
- Loderer, C., Zimmermann, H., 1998. "Stock Offerings in a Different Institutions Setting ; The Swiss Casse, 1973-1983". *Journal of Banking Finance* 12, 353-378.
- McNichols, M. and A. Dravid, 1990, Stock Dividends, Stock Splits and Signaling, *Journal of Finance*, Vol. 45, pp. 857-979
- Miller, M., dan K. Rock. 1985. "Dividend Policy Under Assymmetric Information". *Journal of Finance*, P. 1031-1051.
- Miller, M.H and Modigliani. "Dividend policy, growth and the valuation of shares", *journal of Business*, October 1961

Myers, S.C., Majluf, N.S. 1984. "Corporate Finance and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have". *Journal of Finance Economics* 13, 187-221.

Na'im, Ainun and Frank Finn, "Announcement effects and Market Efficiency in a Thin Market", *Asia Pacific Journal of Management*, 6 (2) pp: 243-265

Smith K., Fred and Jay M. Smith. *Intermediate Accounting*. 9th edition. Ciricinati : South Wesetern, 1990.

Wiggins, J.B., 1992, Beta Changes Around Stock Splits Revisted, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 27, pp. 631-640

Yusi S.P. "Analisis *Right Issue* terhadap Return Saham setelah Cum Date". *Simposium Nasional Akuntansi IV*, Bandung, 2001

ANALISIS KAJIAN POTENSI DAN PENGGALIAN LABA BERSIH BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SLEMAN, TAHUN 2002

*Rudy Badrudin *)*

ABSTRACT

The autonomy of region be regulated in UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) and UU Nomor 25 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). These regulations can be implicated to all of regions, for example Kabupaten Sleman if all of regions and Kabupaten Sleman have revenue to budget development. One of revenue to budget development region is Pendapatan Asli Daerah (PAD) from profit's Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). For developing BUMD, each region has to make a fit development strategy based on its endowment. This paper present the strategy of BUMD (Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar", and PDAM Kabupaten Sleman) in Kabupaten Sleman so that can give to contribute for profit's BUMD, PAD, and budget development.

PENDAHULUAN

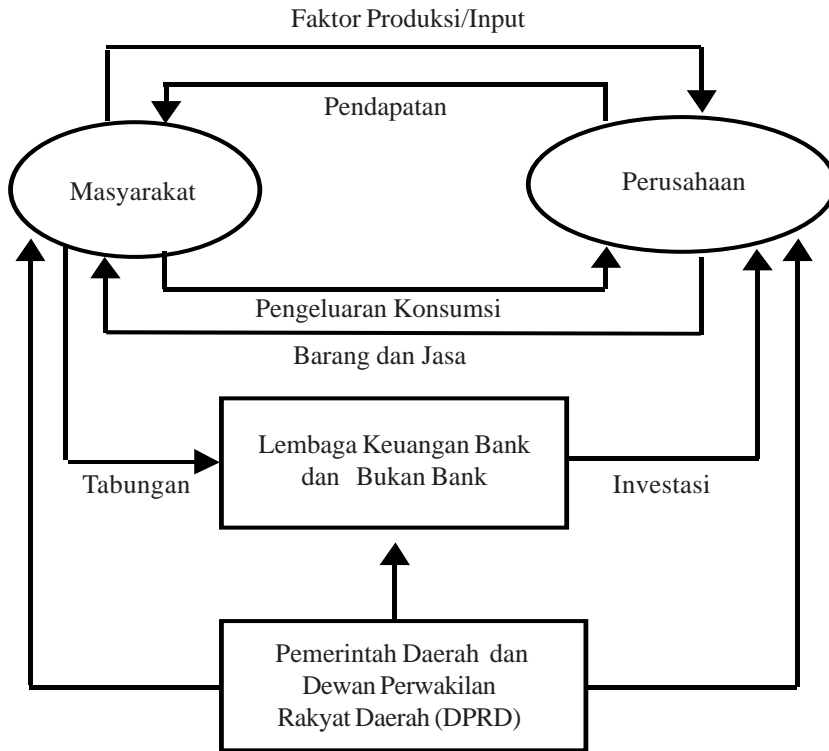
Lebih dari 3 tahun sudah kita menjalankan paradigma pembangunan yang telah memberikan peran yang lebih

besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah dalam menangani pembangunan di daerah. Hal itu ditunjukkan dengan pemberlakuan dua undang-undang tentang Otonomi Daerah per 1 Januari 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan daerah dalam menjalankan kedua undang-undang tersebut adalah kesiapan pelaku ekonomi daerah dan masalah sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen sumberdaya manusia di daerah dalam menyongsong Otonomi Daerah dapat dijelaskan secara teori dengan menggunakan *circular flow* diagram seperti yang ditunjukkan pada Diagram 1. Diagram tersebut menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi, dengan asumsi bahwa ada lima pelaku yaitu masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan bank dan bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

*) Drs. Rudy Badrudin, M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

Gambar 1
Circular Flow Diagram



Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi yang lain seperti masyarakat, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam penentuan kebijakan untuk membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dituntut untuk siap menghadapi Otonomi Daerah tersebut. Pemerintah daerah akan lebih leluasa mengelola badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) setelah Otonomi Daerah diberlakukan. Hal itu dapat dilakukan dengan persyaratan usaha dan strategi tertentu mengingat kondisi BUMD yang ada sekarang ini masih memprihatinkan (Bisnis Indonesia, 22 Desember 1999). DPRD juga dituntut untuk menjadi "oposisi" yang konstruktif bagi eksekutif pada saat Otonomi Daerah diberlakukan sehingga pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran yang seimbang (Kompas, 16 Desember 1999).

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Dana perimbangan sebagai salah satu sumber pembiayaan

daerah tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah langsung karena pelaksanaan pinjaman daerah dilakukan melalui pemerintah pusat sebagaimana janji pemerintah dalam *Letter of Intent* (LoI) keempat yang ditandatangani di Jakarta, 13 Desember 2001 yang lalu (Kompas, 15 Desember 2001, hal. 13).

Oleh karena itu, tepatlah kalau pemerintah daerah harus pandai menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Tetapi bukan dengan sembarang membuat berbagai peraturan-peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah atau retribusi daerah yang ujung-ujungnya akan memberatkan pelaku ekonomi di daerah tersebut sehingga akan menjadi bumerang bagi pelaksanaan dan kelancaran otonomi daerah tersebut. Hal itu bahkan sudah ditegaskan dalam LoI IV, bahwa IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut perda-perda (68 perda) yang bermasalah (Kompas, 26 Nopember 2001, hal. 15). Sumber dana daerah alternatif dapat pula digali oleh pemerintah daerah melalui pembentukan BUMD seperti yang sudah dijelaskan dalam Gambar 1. Dengan pembentukan BUMD yang kemudian dikelola secara profesional maka BUMD akan memperoleh keuntungan sehingga akan menjadi salah satu sumber penerimaan PAD.

Kabupaten Sleman yang terletak di Propinsi DIY perlu mengembangkan lebih lanjut sumber dana mandiri

yang berasal dari PAD Kabupaten Sleman, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengembangan PAD Kabupaten Sleman sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Sleman itu sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman secara lebih mandiri. Pembiayaan secara lebih mandiri tersebut diperlukan karena sangat berisiko sekali bagi Kabupaten Sleman apabila mengharapkan sumber pembiayaan yang bukan bersumber pada PAD karena dana perimbangan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum bisa diharapkan menjadi salah satu sumber langsung pembiayaan daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah tetap melalui pemerintah pusat, dalam arti pemerintah pusat sebagai peminjam yang kemudian akan dialokasikan kepada pemerintah daerah.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, beban pembiayaan semakin berat. Perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 8 tahun ditunjukkan sebagai berikut:

Peningkatan realisasi APBD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun juga diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai gambaran,

kondisi PAD selama 8 tahun terakhir ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi PAD Sleman 1995/1996 - 2002

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Peningkatan
1995/1996	Rp 7.442.337.458	-
1996/1997	Rp 10.574.223.660	42 %
1997/1998	Rp 13.646.881.289	29 %
1998/1999	Rp 14.786.415.038	8 %
1999/2000	Rp 17.125.444.712	13,55%
2000	Rp 17.889.883.435	4,46%
2001	Rp 29.571.153.214	65,30%
2002	Rp 38.908.192.767	31,57%

Sumber: BPKKD.

Berdasarkan realisasi PAD yang tergalai tersebut, dapat ditunjukkan kontribusi PAD terhadap realisasi APBD dan APBD non rutin sebagai berikut:

Tabel 3
Kontribusi PAD Sleman 1995/1996 - 1999/2000

Tahun Anggaran	Kontribusi Pada APBD	Kontribusi Pada APBD Non Belanja
1995/1996	22,69 %	27,32 %
1996/1997	14,68 %	33,19 %
1997/1998	14,92 %	35,79 %
1998/1999	14,91 %	35,48 %
1999/2000	11,86 %	32,34 %

Sumber: Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman, 2000, hal. 32.

Sumber PAD yang menjadi adalah dari sektor pajak adalah pajak hotel dan restoran, Pajak penerangan jalan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara untuk retribusi daerah yang menjadi andalan adalah retribusi pelayanan kesehatan,

retribusi pasar dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Secara lengkap, komponen PAD Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002 ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Komponen PAD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

NU	SUBYEK	JUMLAH	PERSENTASE DARI			
			TOTAL	SUBTTL	SUBSUB	SSS
1	Pendapatan Asli Daerah	34.001.261.932	10.37%			
	a. Pajak Daerah	17.074.636.139		50.22%		
	- Pajak Hotel dan Restoran	9.000.000.000			52.71%	
	- Pajak Hiburan	526.700.000			3.08%	
	- Pajak Reklame	622.554.339			3.65%	
	- Pajak Penerangan Jalan	5.545.381.800			32.48%	
	- Pjk BGG-C	180.000.000			1.05%	
	- Pjk ABT dan Pompa Air	1.200.000.000			7.03%	
	b. Retribusi Daerah	9.443.952.700		27.78%		
	- R. Pelayanan Kesehatan	4.761.960.000			50.42%	
	- R. Pel. Sampah dan Kebers.	231.900.000			2.46%	
	- R. Cetak KTP dan Akte Capil	610.145.500			6.46%	
	- R. Parkir di Tepi Jalan	420.000.000			4.45%	
	- R. Pasar	1.150.000.000			12.18%	
	- R. Pengujian Kend. Bermotor	316.717.500			3.35%	
	- R. Pemakaian Kekay. Daerah	57.125.000			0.60%	
	- R. Terminal	164.466.000			1.74%	
	- R. Rumah Pemot. Hewan	62.748.200			0.66%	
	- R. Tempat Rekr. dan OR	660.600.000			6.99%	
	- R. Penjualan PUD	233.290.500			2.47%	
	BPP/Kebun	58,652,500				25.14%
	Kebun Sawangan	600,000				0.26%
	Benih Ikan	24,038,000				10.30%
	Pentas seni	150,000,000				64.30%
	- R. Izin Penggunaan Tanah	90.000.000			0.95%	
	- R. IMB	500.000.000			5.29%	
	- R. Izin Gangguan	180.000.000			1.91%	
	- R. Izin Trayek	5.000.000			0.05%	
	c. Bagian Laba Perush. Daerah	1.761.360.635		5.18%		
	- BPD	1.018.116.635			57.80%	
	- Perush. Daerah	743.244.000			42.20%	
	BPR Bank Pasar	743,000,000				99.97%
	PDAM	244,000				0.03%
	- Hasil Investasi kpd phk III	nihil				
	d. Lain-lain PAD	5.721.312.458		16.83%		
	- Hsl Penj. Milik Daerah	30.000.000			0.52%	
	Drum Bekas aspal	30,000,000				100.00%

	- Jasa Giro	591.128.858			10.33%	
	BPD	591,128,858				100.00%
	- Sumbangan Pihak Ketiga	2.500.000			0.04%	
	- Pener. Kembali Restr. Modal	1.392.688.000			24.34%	
	Restrukt. Model Perikanan	735,188,000				52.79%
	Restrukt. Model Perkebunan	196,250,000				14.09%
	Restrukt. Modal Kehutanan	75,000,000				5.39%
	Restrukt. T. Pangan dan Hort.	298,750,000				21.45%
	Restrukt. Modal Koperasi	87,500,000				6.28%
	- Lain-lain Pendapatan	3.704.995.600		10.90%	64.76%	
	Penj. Sapi dana kereman	2,582,661,200				69.71%
	Penelitian IMB	19,250,000				0.52%
	Adm. Pemutihan IMB	2,000,000				0.05%
	Sewa Lahan eks Dipenda	nihil				
	Penerimaan MCK Terminal	8,664,000				0.23%
	Jasa fasilitas. Kaliurang	31,170,400				0.84%
	Jasa fasilitas. Kaliadem	nihil				
	Sewa Kios Kaliurang	nihil				
	Konsesi Pemasangan Iklan	321,250,000				8.67%
	Tanda Daftar Perusahaan	29,000,000				0.78%
	Bunga Deposito	666,000,000				17.98%
	IUJK	45,000,000				1.21%
2.	Dana Perimbangan	288.434.390.109	87.94%			
	a. Bagi Hasil Pajak	20.500.000.000		7.11%		
	PBB 8,900,000,000				43.41%	
	PHTB	5,500,000,000			26.83%	
	PPH Pasal 21	6,100,000,000			29.76%	
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	684.390.109		0.24%		
	Profesi Sumberdaya Hutan	nihil				
	Pemb. Atas Hak Tanah Negara	Nihil				
	Pungutan Hasil Perikanan	684,390,109		0.24%	100.00%	
	c. Dana Alokasi Umum	255.350.000.000		88.53%		
	DAU 255,350,000,000				100.00%	
	d. Dana Alokasi Khusus	nihil				
	Dana Darurat	nihil				
	e. Dana Perimb. Dari Propinsi	11.900.000.000		4.13%		
	PKB/BBNKB	9,500,000,000			79.83%	
	PBB KB	2,400,000,000			20.17%	
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.560.000.000	1.70%			
	a. Dana Penyeimbang	5,060,000,000		91.01%		
	b. Dana Luncuran	500,000,000		8.99%		
	TOTAL	327.995.652.041				

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun Anggaran 2002. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4, tampak bahwa persentase PAD dari keseluruhan anggaran Kabupaten Sleman hanya sebesar 10,37%, sedangkan persentase dana perimbangan sangat besar, yaitu 87,94%. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemandirian Kabupaten Sleman dalam anggaran pembangunannya perlu dilakukan usaha-usaha untuk menggali potensi dan mengembangkan PAD Kabupaten Sleman. Untuk data PAD Kabupaten Sleman, sumber terbesar adalah Pajak Daerah, yaitu 50,22% diikuti sumber Retribusi Daerah 27,78%, lain-lain sumber PAD 16,83% dan laba bersih Perusahaan Daerah 5,18%.

Berdasarkan penjelasan Tabel 4 tersebut ternyata kontribusi laba bersih Perusahaan Daerah atau BUMD paling rendah. Sehubungan dengan usaha pemerintah Kabupaten Sleman dalam membiayai secara lebih mandiri pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman, maka perlu diadakan kajian tentang potensi dan penggalan laba bersih BUMD PAD di Kabupaten Sleman agar dalam perkembangan waktu berikutnya kontribusi laba bersih BUMD bisa meningkat.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa jenis pajak daerah (kabupaten/kota) dan tarif maksimumnya adalah pajak hotel (10%), pajak restoran (10%), pajak hiburan (35%), pajak reklame (25%), pajak penerangan jalan (10%),

pajak pengambilan bahan galian golongan C (20%), dan pajak parkir (20%). Di samping jenis pajak tersebut, daerah (kabupaten/kota) dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/ kota yang lain tetapi memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
- e. potensinya memadai.
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. menjaga kelestarian lingkungan

Di samping pajak daerah kabupaten/kota, kabupaten/kota juga menerima (*share*) bagian pajak propinsi sebesar persentase tertentu yang terdiri dari:

- a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air tarif maksimum 5% (*share* minimum 30%).
- b. bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air tarif maksimum 10% (*share* minimum 30%).
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor tarif maksimum 5% (*share* minimum 70%).
- d. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tarif maksimum 20% (*share* minimum 70%).

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Di samping itu, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang lebih ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum
 - i. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
 - ii. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- iii. jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - iv. jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
 - v. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - vi. retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - vii. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang lebih baik
- b. Retribusi jasa usaha
- i. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
 - ii. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- c. Retribusi perijinan tertentu
- i. perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - ii. perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - iii. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:
- a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

- b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

Analisis terhadap data PDRB Kabupaten Sleman, PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman, dan *Location Quotient* (LQ) per kecamatan di Kabupaten Sleman akan diperoleh sektor-sektor per kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil daripada 1 sehingga dapat diusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dari sektor-sektor yang berpotensi ekonomi di Kabupaten Sleman yang berbasis di kecamatan-kecamatan. Dengan demikian, pembentukan BUMD baru yang menguntungkan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dan mengembangkan kecamatan yang berpotensi secara ekonomi berdasarkan nilai LQ.

ANALISIS KAJIAN POTENSIDAN PENGGALIAN LABA BERSIH BUMD SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PAD DI KABUPATEN SLEMAN

Pada bagian ini akan dibahas analisis terhadap kajian potensi dan penggalan PAD Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi analisis terhadap sumber-sumber PAD -secara khusus laba bersih BUMD- Kabupaten Sleman. Posisi PAD Kabupaten Sleman terhadap total anggaran penerimaan Kabupaten Sleman dan posisi masing-masing sumber PAD Kabupaten Sleman terhadap PAD Kabupaten Sleman ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Komponen Anggaran Penerimaan dalam APBD Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2002

No.	SUBYEK	PERSENTASE DARI		
		JUMLAH	TOTAL	SUBTOTAL
1	Pendapatan Asli Daerah	34.001.261.932	10.37%	
	a. Pajak Daerah	17.07.636.139		50.22%
	b. Retribusi Daerah	9.443.952.700		27.78%
	c. Bagian Laba Perush. Daerah	1.761.360.635		5.18%
	d. Lain-lain PAD	5.721.312.458		16.82%
2	Dana Perimbangan	288.434.390.109	87.93%	
	a. Bagi Hasil Pajak	20.500.000.000		
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	684.390.109		
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	255.350.000.000		
	d. Dana Alokasi Khusus	Nihil		
	Dana Darurat	Nihil		
	e. Dana Perimb. Dari Propinsi	11.900.000.000		
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.560.000.000	1.70%	
	a. Dana Penyeimbang	5,060,000,000		
	b. Dana Luncuran	500,000,000		
	TOTAL	327.995.652.041		

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002. Data diolah.

Nampak pada Tabel 5, sumber anggaran utama Kabupaten Sleman adalah berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 87,93%, disusul PAD 10,37%, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah sebesar 1,70%. Dengan demikian, anggaran penerimaan Kabupaten Sleman sangat bergantung pada penerimaan non PAD. Padahal dalam era otonomi daerah, kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunannya sangat diharapkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kabupaten Sleman untuk

mengembangkan penerimaan utama dari PAD. Pada Tabel 6 tampak bahwa sumber PAD utama adalah pajak daerah (50,22%), kemudian retribusi daerah (27,78%), lain-lain PAD (16,82%), dan paling kecil persentasenya adalah bagian laba perusahaan daerah (5,18%). Hal ini juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, yaitu dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2001 seperti yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perkembangan Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1997/1998 - Tahun Anggaran 2001

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Lain-lain	Jumlah PAD
1997/1998	6.307.064.984,82	3.450.573.395,00	708.029.761,57	2.999.213.148,51	13.464.881.289,90
1998/1999	7.229.182.708,87	3.466.829.646,00	883.219.551,51	3.207.183.131,62	14.786.415.038,00
1999/2000	9.185.908.717,58	5.551.344.263,90	728.790.632,33	1.659.401.098,41	17.125.444.712,22
2000	9.602.014.787,69	5.676.781.484,60	1.242.452.958,17	1.368.634.205,00	17.889.883.435,46
2001	16.069.014.396,26	8.268.612.581,75	1.743.565.085,30	3.489.961.151,122	29.571.153.214,43

Sumber : Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001.

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat dihitung persentase masing-masing sumber PAD terhadap PAD keseluruhan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7
Persentase Sumber-Sumber PAD Terhadap PAD Keseluruhan
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Lain-lain	Jumlah PAD
1997/1998	46,84%	25,63%	5,26%	22,27%	100,00%
1998/1999	48,89%	23,45%	5,97%	21,69%	100,00%
1999/2000	53,64%	32,42%	4,26%	9,68%	100,00%
2000	53,67%	31,73%	6,94%	7,66%	100,00%
2001	54,34%	27,96%	5,90%	11,8%	100,00%

Sumber: Data diolah dari Tabel 6.

Dalam bagian ini akan dianalisis potensi pengembangan BUMD yang ada meliputi Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Pasar, dan PDAM

Kabupaten Sleman. Adapun persentase masing-masing sumber PAD yang berasal dari bagian laba perusahaan daerah ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Bagian Laba Perusahaan Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun Anggaran 2002

Bagian Laba BPD		Bagian Laba Bank Pasar dan PDAM		Bagian Laba Perusahaan Daerah	
Rp254.529.158,75	57,80%	Rp185.811.000,00	42,20%	Rp440.340.158,75	100%

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun. Anggaran 2002. Data diolah

Nampak pada Tabel 8, sumber PAD dari bagian laba perusahaan daerah didominasi oleh penerimaan dari bagian laba BPD, yaitu sebesar 57,80% sedangkan penerimaan dari bagian laba Bank Pasar dan PDAM sebesar 42,20%. Dengan demikian, untuk meningkatkan PAD yang berasal dari sumber bagian laba perusahaan daerah yang masih relatif kecil (rata-rata sebesar 5,67%), dapat dilakukan dengan meningkatkan laba dari masing-masing sumber bagian laba perusahaan daerah. Hal itu berarti, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan

kinerja BPD dan masing-masing perusahaan daerah tersebut.

Peningkatan kinerja BPD dan masing-masing perusahaan daerah perlu dilakukan, di samping untuk meningkatkan laba BPD dan perusahaan daerah juga untuk meningkatkan efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah tersebut. Efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah selama tahun anggaran 1999/2000 - 2001 mengalami peningkatan, yaitu dari 68% menjadi 138%. Hal itu ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Efektivitas Penerimaan Laba BPD dan Perusahaan Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001

Tahun Anggaran	Anggaran (Target)	Realisasi	Efektivitas
1999/2000	Rp1.073.790.632,33	Rp728.790.632,33	68%
2000	Rp1.262.000.000,00	Rp1.242.452.958,17	98%
2001	Rp1.262.000.000,00	Rp1.743.565.085,30	138%

Sumber : Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001. Data Diolah.

Peningkatan efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah Kabupaten Sleman itu menunjukkan bahwa kinerja BPD dan perusahaan daerah secara makro mengalami peningkatan. Peningkatan itu dimungkinkan karena pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tanggal 1 Januari 2001 telah "memaksa" pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk bekerja keras memperoleh sumber pembiayaan secara lebih mandiri dalam rangka pembiayaan APBD Kabupaten Sleman, yaitu dari sumber PAD. Dengan demikian, pemerintah daerah Kabupaten Sleman diharapkan tidak ragu lagi dalam menargetkan anggaran sumber penerimaan yang berasal dari laba BPD dan perusahaan daerah menjadi lebih besar mengingat realisasi atau efektivitas penerimaan laba BPD dan perusahaan daerah yang meningkat dari waktu ke waktu.

BPD Cabang Sleman

BPD adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa-jasa keuangan. Bank sebagai *financial intermediary* mempunyai peran yang penting

dalam perekonomian. Pengelolaan bank membutuhkan adanya keterpaduan antara dua tujuan/kepentingan. Bank sebagai lembaga yang mencari keuntungan harus mempertimbangkan juga masalah keamanan dan likuiditas. Semakin likuid sebuah asset akan semakin kecil yang bisa dihasilkan oleh asset tersebut. Bank harus mempertimbangkan *trade-off* antara likuiditas dan profitabilitasnya.

Tujuan jangka panjang BPD adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan bisa diperoleh jika bank dikelola dengan manajemen yang tepat. Secara umum pengelolaan keuangan perusahaan akan menghadapi tiga masalah yang penting yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Untuk menjaga posisi BPD agar tetap likuid, BPD harus mengelola likuiditasnya dengan cara yang benar. Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Dalam dunia perbankan sering timbul pertentangan antara kepentingan likuiditas dan profitabilitas. Untuk mempertahankan posisi likuiditas yang tinggi berarti harus menggunakan dana yang seharusnya bisa dipinjamkan untuk memperbesar

cadangan primer. Dengan demikian maka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan akan berkurang. Pengelolaan likuiditas bisa dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *assets management* dan *liability management*.

Menurut Neraca BPD per September 2001 dan 2002, terjadi peningkatan aktiva/passiva dari Rp751.155.000.000 menjadi Rp1.040.541.000.000 atau naik sebesar 38,53%. Kenaikan aktiva/passiva BPD menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja BPD. Apabila dilihat pada sisi aktiva Neraca BPD per September 2001 dan 2002 tersebut nampak bahwa aktiva terbesar terdapat pada pos kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp328.843.000.000 atau sebesar 43,78% per September 2001 dan Rp514.221.000.000 atau sebesar 49,41% per September 2002. Dengan demikian, selama periode 2001 sampai dengan 2002 BPD DIY mengalami kenaikan jumlah kredit yang diberikan sebesar 5,64%. Kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh BPD DIY tentunya akan menghasilkan pendapatan bunga yang

semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan dengan rasio non performing loan (NPL) yang angkanya semakin menurun dari 3,64% menjadi 1,15%. NPL merupakan salah satu indikator kesehatan suatu bank yang menunjukkan persentase jumlah kredit yang bermasalah, misalnya kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang mempunyai NPL kurang daripada 5%. Oleh karena nilai NPL BPD DIY semakin menurun berarti alokasi kredit yang disalurkan oleh BPD DIY semakin self liquidating. Dengan kata lain, semakin menurunnya nilai NPL BPD DIY menunjukkan bahwa pendapatan bunganya semakin meningkat.

Apabila dilihat pada sisi passiva Neraca BPD per September 2001 dan 2002 tersebut nampak bahwa passiva terbesar terdapat pada pos penerimaan giro, disusul penerimaan simpanan berjangka dan tabungan. Sisi passiva (tiga pos terbesar) Neraca BPD DIY per September 2002 dan 2002 ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10
Sisi Passiva (tiga pos terbesar) Neraca BPD DIY
per September 2001 dan 2002

Pos	Per September 2001 (Rp juta)		Per September 2002 (Rp juta) (%)		Perubahan
	Rp	%	Rp	%	
Giro	Rp398.163	53,01%	Rp453.239	43,56%	-9,45%
Simpanan Berjangka	Rp102.778	13,68%	Rp229.216	22,03%	8,35%
Tabungan	Rp142.214	18,93%	Rp214.131	20,58%	1,65%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Berdasarkan Tabel 10, nampak bahwa pada Neraca BPD DIY per September 2001 penerimaan simpanan terbesar adalah giro (53,01%), disusul tabungan (18,93%) dan simpanan berjangka (13,68%). Sedangkan pada Neraca BPD DIY per September 2002 penerimaan simpanan terbesar adalah giro (43,56%), disusul simpanan berjangka (22,03%) dan tabungan (20,58%). Dengan demikian, selama periode 2001 sampai dengan 2002 BPD DIY mengalami penurunan simpanan giro sebesar 9,45%, kenaikan simpanan berjangka (8,35%), dan kenaikan tabungan (1,65%). Secara keseluruhan, simpanan giro, berjangka, dan tabungan BPD DIY per September 2001 sampai dengan

September 2002 mengalami kenaikan dari Rp643.155.000.000,- menjadi Rp896.586.000.000,- atau naik sebesar 39,40%.

Kenaikan jumlah ketiga simpanan di BPD DIY selama periode tersebut menunjukkan kinerja BPD DIY yang semakin meningkat yang oleh karenanya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang semakin meningkat pula. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di BPD DIY ditunjukkan oleh simpanan berjangka dan tabungan. Sedangkan simpanan giro mengalami penurunan. Dengan demikian, agar BPD DIY lebih mampu lagi dalam menggali sumber dana dan kemudian

disalurkan dalam berbagai alokasi kredit pinjaman maka BPD DIY harus mampu untuk menarik dana tabungan dari masyarakat sehingga kenaikannya lebih besar lagi (tidak hanya 1,65%). Di samping itu, BPD DIY juga harus mampu menarik dana masyarakat dalam bentuk giro terutama dari transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah propinsi dan kota atau kabupaten propinsi DIY atau propinsi lain. Karena simpanan giro menurut jenisnya lebih tepat untuk penabung masyarakat yang menggunakan rekeningnya terutama untuk keperluan transaksi bisnis. Penarikan dana dari masyarakat dan pengalokasiannya di BPD DIY,

khususnya BPD Cabang Sleman yang semakin meningkat tersebut karena ditunjang oleh lima Kantor Cabang Pembantu (Condongcatur, Prambanan, Godean, Pakem, dan Gamping) dan sepuluh Kantor Kas (Tempel, Maguwoharjo, Ngemplak, Ngaglik, Mlati, Turi, Berbah, Seyegan, Moyudan, dan RSUD Morangan).

Apabila dilihat pada indikator kesehatan bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia, nampak indikator BPD DIY telah memenuhi persyaratan dan dengan demikian termasuk bank yang sehat. Indikator kesehatan BPD DIY dan ketentuan Bank Indonesia disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Indikator Kesehatan BPD DIY per September 2001 dan 2002

Indikator	BPD DIY per September 2001	BPD DIY per September 2001	Indikator Bank Indonesia
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,12%	15,58%	minimum 8%
Non Performing Loan (NPL)	3,64%	1,15%	maksimum 5%
Return On Assets (ROA)	4,05%	4,08%	-
Return on Equity (ROE)	27,09%	30,12%	-
Loan to Deposit Ratio (LDR)	51,46%	57,32%	maksimum 100%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Nampak pada Tabel 11 indikator BPD DIY untuk CAR, NPL, dan LDR semua memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Untuk CAR memang mengalami penurunan tetapi masih di atas minimum 8%. Untuk NPL mengalami penurunan sehingga menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan BPD DIY semakin self liquidating atau semakin kecil kredit macet yang terjadi. Untuk LDR mengalami kenaikan berarti terjadi peningkatan alokasi kredit untuk investasi. Peningkatan LDR yang diimbangi dengan penurunan NPL menunjukkan bahwa alokasi kredit untuk investasi telah memenuhi prudent banking.

Peningkatan kinerja BPD DIY dapat diartikan juga sebagai peningkatan kinerja BPD Sleman karena pemerintah daerah Kabupaten Sleman merupakan pemilik ketiga terbesar yaitu sebesar 13% setelah pemerintah Propinsi DIY (54%) dan pemerintah Kota Yogyakarta (13,58%). Sebagai pemilik terbesar ketiga

sebesar 13%, maka setoran bagian laba BPD Sleman dalam setoran laba BUMD (salah satu komponen PAD) pada tahun anggaran 2002 (triwulan I) mencapai Rp254.529.158,75 atau 57,80% dari bagian laba BUMD yang sebesar Rp440.340.158,75.

Untuk meningkatkan kinerja BPD secara keseluruhan (termasuk BPD DIY), ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/29/ekonomi/meng38.htm>), yaitu:

1. Risiko penurunan dana dan aktiva karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang habis dialokasikan dalam satu tahun anggaran.
2. Serbuan bank-bank pesero dan bank asing dalam memperebutkan DAU.
3. Pemenuhan standar dan ketentuan sebagai universally regulated institutions, misalnya ketentuan CAR.

4. Aktiva produktif yang relatif homogen.
5. Nasabah BPD yang sebagian besar merupakan nasabah berskala kecil dan menengah yang kurang memberikan nilai tambah bagi bank untuk maju dan berkembang untuk bersaing secara global.

Untuk memenangkan persaingan global, berdasarkan studi yang dilakukan oleh McKinsey maka BPD DIY perlu memperhatikan beberapa strategi yang cukup relevan dengan situasi perbankan nasional, yaitu:

1. *Securing the lifeline* atau mengamankan garis kehidupan bank.
2. *Refocusing* atau melakukan fokus operasional bank pada target pasar.
3. Menawarkan berbagai produk baru perbankan, seperti *trade services*, tanpa meninggalkan sektor UKM yang sudah teruji.
4. Meningkatkan kemampuan dalam beberapa bidang utama, seperti manajemen risiko.

Di samping itu, menurut Marihot H. Tambunan (Kompas, 16 Maret 2001 hal. 15) BPD perlu melakukan reposisi, yaitu pengambilan posisi yang aman dan meng-untungkan untuk menjalankan bisnis BPD dalam kancan persaingan setelah melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis dan para pesaing BPD. Reposisi dilakukan dengan:

1. Mengubah status badan hukum BPD menjadi perseroan terbatas (PT).
2. Meningkatkan modal.
3. Mengubah citra dan segmentasi, seperti yang dilakukan oleh BPD DKI menjadi Bank DKI dan BPD Jatim menjadi Bank Jatim.
4. Internasionalisasi dengan mengubah menjadi bank devisa dan membangun jaringan correspondent banking.
5. Mencermati posisi dewan komisaris terutama posisi komisaris utama.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) “Bank Pasar” Kabupaten Sleman

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) “Bank Pasar” sebagai BUMD di Kabupaten Sleman berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. PD BPR “Bank Pasar” didirikan dengan maksud

dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. PD BPR “Bank Pasar” mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Tugas PD BPR “Bank Pasar” adalah me-ngem-bangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Adapun fungsi PD BPR “Bank Pasar”:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusus pada pengusaha kecil;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan keuangan lainnya;
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bentuk layanan PD BPR “Bank Pasar” terhadap masyarakat kabupaten berupa:

- a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusus pada pengusaha kecil.

Adapun penggunaan laba bersih PD BPR “Bank Pasar” berdasarkan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995, ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah | 40% |
| b. Cadangan umum | 20% |
| c. Cadangan tujuan | 20% |
| d. Dana kesejahteraan | 10% |
| e. Jasa produksi | 10% |

Persentase sumbangan laba Bank Pasar Kabupaten Sleman terhadap bagian laba perusahaan daerah Kabupaten Sleman sebesar 42,18%. Sedangkan persentase sumbangan laba Bank Pasar Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 sebesar 0,23%. Sementara persentase sumbangan laba perusahaan daerah Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 sebesar 5,18%.

Tabel 12
Bagian Laba Perusahaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

Bagian Laba BPD		Bagian Laba Bank Pasar		Bagian Laba PDAM		Bagian Laba Perusahaan Daerah	
Rp1.018.116.635	57,80%	Rp743.000.000	42,18%	Rp244.000	2%	1.761.360.635	100%

Sumber: Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002.

Berdasarkan Tabel 12 tersebut, nampak bahwa bagian laba Bank Pasar Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002 maupun terhadap bagian laba perusahaan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan bagian laba BPD. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup operasional BPD yang lebih luas daripada Bank Pasar Kabupaten Sleman. Tetapi melihat persentase BPD yang cukup besar itu, seharusnya Bank Pasar Kabupaten Sleman dapat melakukan berbagai strategi perbankan seperti yang dilakukan oleh BPD.

Mengingat laba bersih Bank Pasar Kabupaten Sleman yang disetor ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman berdasarkan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30 tahun 1995 ditetapkan sebesar 40%, maka jumlah laba yang disetor adalah $40\% \times \text{Rp}1.409.674.000,- = \text{Rp}563.869.600,-$ pada tahun 1999. Pada tahun 2000 jumlah laba yang disetor adalah $40\% \times \text{Rp}1.813.621.000,- = \text{Rp}725.448.400,-$. Dengan demikian, pada kurun waktu 1999-2000 jumlah laba yang disetor Bank Pasar Kabupaten Sleman ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sebesar 28,66%. Kenaikan jumlah laba yang disetor oleh Bank Pasar Kabupaten Sleman ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman menunjukkan adanya peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman, mengingat laba merupakan selisih antara pendapatan dan non pendapatan dengan beban dan non beban operasional.

Pada tahun 1999-2000, ternyata pemerintah daerah Kabupaten Sleman melakukan peningkatan setoran ke Bank Pasar Kabupaten Sleman sebesar $\text{Rp}1.858.814.000,-$ naik menjadi $\text{Rp}2.483.814.000,-$ atau mengalami kenaikan sebesar 33,62%. Apabila dibandingkan antara setoran laba Bank Pasar ke ke pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang sebesar

28,66% dengan setoran modal pemerintah daerah Kabupaten Sleman ke Bank Pasar Kabupaten Sleman yang sebesar 33,62% maka efektivitas Bank Pasar dalam menggunakan setoran modal dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman masih kurang, karena angkanya hanya menunjukkan sebesar $28,66\% : 33,62\% = 85,25\%$ atau kurang daripada 100%. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, Bank Pasar Kabupaten Sleman harus mampu meningkatkan kinerja bank melalui berbagai usaha, seperti:

- meningkatkan berbagai sumber dana bank (pada sisi kewajiban dan ekuitas).
- meningkatkan berbagai sumber penggunaan dana bank (pada sisi aktiva).

Menurut Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000, terjadi peningkatan aktiva/passiva dari $\text{Rp}14.765.570.000$ menjadi $\text{Rp}17.399.802.000$ atau naik sebesar 17,84%. Kenaikan aktiva/passiva Bank Pasar Kabupaten Sleman menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman. Apabila dilihat pada sisi aktiva Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000 tersebut nampak bahwa aktiva terbesar terdapat pada pos kredit yang diberikan yaitu sebesar $\text{Rp}11.549.276.000$ atau sebesar 78,22% per 31 Desember 1999 dan $\text{Rp}14.713.080.000$ atau sebesar 84,56% per 31 Desember 2000. Dengan demikian, selama periode 1999 sampai dengan 2000 Bank Pasar Kabupaten Sleman mengalami kenaikan jumlah kredit yang diberikan sebesar 6,34%. Kenaikan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Pasar Kabupaten Sleman tentunya akan menghasilkan pendapatan bunga yang semakin meningkat pula.

Apabila dilihat pada sisi passiva Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000 tersebut nampak bahwa passiva (dana simpanan

dari masyarakat) terbesar terdapat pada pos penerimaan tabungan, disusul penerimaan deposito berjangka. Sisi passiva (dua pos terbesar) Neraca Bank Pasar

Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000 ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 13
Sisi Passiva (tiga pos terbesar) Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000

Pos	Per September 2001 (Rp juta)		Per September 2002 (Rp juta) (%)		Perubahan
Tabungan	5.940.301	40,23%	7.197.552	41,37%	1,14%
Deposito Berjangka	1.477.420	10,01%	1.519.920	8,74%	-1,27%

Sumber: Neraca BPD DIY per September 2001 dan 2002.

Berdasarkan Tabel 13, nampak bahwa pada Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 penerimaan simpanan terbesar adalah tabungan (40,23%), disusul deposito berjangka (10,01%). Sedangkan pada Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 2000 penerimaan simpanan terbesar adalah tabungan (41,37%), disusul deposito berjangka (8,74%). Dengan demikian, selama periode 1999 sampai dengan 2000 Bank Pasar Kabupaten Sleman mengalami kenaikan tabungan sebesar 1,14% dan penurunan deposito berjangka (1,27%). Secara keseluruhan, simpanan tabungan dan deposito berjangka Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 sampai dengan 31 Desember 2000 mengalami kenaikan dari Rp7.417.721.000 menjadi Rp8.717.472.000,- atau naik sebesar 17,52%.

Kenaikan jumlah kedua simpanan di Bank Pasar Kabupaten Sleman selama periode tersebut menunjukkan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman yang semakin meningkat yang oleh karenanya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang semakin meningkat pula. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di Bank Pasar Kabupaten Sleman ditunjukkan oleh tabungan. Sedangkan simpanan deposito berjangka mengalami pe-nurunan. Dengan demikian, agar Bank Pasar Kabupaten Sleman lebih mampu lagi dalam menggali sumber dana dan kemudian disalurkan dalam berbagai alokasi kredit pinjaman maka Bank Pasar Kabupaten Sleman harus mampu untuk menarik dana tabungan dari masyarakat sehingga kenaikannya lebih

besar lagi. Di samping itu, Bank Pasar Kabupaten Sleman juga harus mampu menarik dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka.

Peningkatan kinerja Bank Pasar Kabupaten Sleman dapat diartikan juga sebagai peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Sleman karena pemerintah daerah Kabupaten Sleman merupakan pemilik utama yaitu sebesar 100%. Sebagai pemilik utama, maka setoran bagian laba Bank Pasar Kabupaten Sleman masuk ke kas pemerintah Kabupaten Sleman sebagai setoran laba BUMD (salah satu komponen PAD).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sleman

PDAM Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Dati II Sleman, mulai beroperasi sejak tanggal 2 Nopember 1992. Pada saat ini, PDAM Kabupaten Sleman mengelola dan mengoperasikan 12 sistem yang terbagi menjadi 5 Cabang Wilayah Operasional. Air baku diperoleh dari 26 sumur bor dan 3 mata air dengan total kapasitas terpasang 352 liter/detik yang 98% sistem pendistribusiannya dilaksanakan dengan pemompaan. Rata-rata operasi adalah 20 jam dengan pemanfaatan produksi kepada pelanggan sebanyak sambungan rumah (16.464 unit) dan hidran umum (203 unit) dengan cakupan layanan sebanyak 126.341 jiwa. Tingkat kehilangan air PDAM masih cukup tinggi, yaitu sebesar 27,70% (Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman

dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 8). Tingkat kehilangan air PDAM Kabupaten Sleman tersebut memang lebih rendah daripada tingkat kehilangan air PDAM rata-rata nasional yang sebesar 40% (Risyaana Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/5974/risyana.html>).

PDAM Kabupaten Sleman sebagai BUMD Kabupaten Sleman memiliki potensi dan peluang yang cukup baik untuk berkembang sesuai dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Usaha peningkatan kinerja PDAM Kabupaten Sleman dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini (Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 13):

a. Mengubah sikap operasional dari birokrasi ke wirausaha.

- b. Memahamkan kepada pegawai bahwa konsumen adalah aset perusahaan terbesar.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana operasional dengan memantapkan sarana produksi air bersih sehingga layak beroperasi.
- d. Memantapkan sistem manajemen operasional dalam hal penyiapan perangkat lunak, perangkat keras, dan peningkatan sumberdaya manusia.
- e. Membuat program jangka pendek dan jangka panjang sebagai arah operasional.
- f. Melakukan pemetaan terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi PDAM Kabupaten Sleman. Tantangan muncul karena adanya kelemahan, sedangkan peluang muncul karena adanya kekuatan.

Berdasarkan penggunaan air sumur dengan pompa yang dioperasikan dan dilaporkan kepada Dinas Perindustrian Propinsi DIY tahun 2000 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 14
Rata-Rata Penggunaan Air Bersih dalam M³ Per Bulan dan Liter
Berdasarkan Pompa yang Dioperasikan di Kabupaten Sleman Tahun 2000

No	Pelanggan		Rata-Rata Pemakaian/Bulan		Nilai Rupiah per Bulan
	Nama	Jenis	M ³	Liter	
1	Hotel berbintang	Niaga besar	97.718	35,91	207.010.360
2	Hotel melati	Niaga kecil	69.242	26,28	133.640.980
3	Lembaga pendidikan	Niaga besar	24.187	9,01	50.986.680
4	Restoran	Niaga besar	7.117	2,86	14.915.500
5	Rumah sakit	Niaga besar	30.439	11,55	64.482.380
6	Cuci kendaraan	Niaga kecil	705	0,28	1.254.300
7	Instansi	Niaga kecil	3.610	1,37	6.962.900
8	Kolam renang	Niaga kecil	2.299	0,87	4.443.860
9	Asrama/pondokan	Niaga kecil	614	0,23	1.150.660
10	Industri	Industry besar	52.534	21,1	208.187.920
	TOTAL	288.465	109,47	693.035.540	

Sumber: Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001, hal. 19.

Dengan demikian, menurut Tabel 14 PDAM Kabupaten Sleman diperkirakan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp693.035.450,- per

bulan dengan permintaan air bersih berbagai pelanggan sebanyak 288.465M³. Apabila dihitung dalam 1 tahun (selama tahun 2000) PDAM Kabupaten Sleman

diperkirakan mengalami permintaan air bersih sebanyak 3.461.580M³. Realisasi permintaan air bersih PDAM Kabupaten Sleman hanya sebanyak 2.653.291M³ (Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2001, Materi Ekspose). Dengan demikian, efektivitas permintaan air bersih hanya mencapai 76,65%. Penerimaan PDAM Kabupaten Sleman dalam tahun 2000 diperkirakan mencapai Rp8.316.425.400,-. Realisasi penerimaan air bersih PDAM Kabupaten Sleman hanya sebesar Rp2.217.073.300,- (Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun

2001, Materi Ekspose). Dengan demikian, efektivitas penerimaan air bersih hanya mencapai 26,66%. Berdasarkan efektivitas kedua hal itu yang masih rendah, maka PDAM Kabupaten Sleman harus meningkatkan kinerjanya sehingga mampu mencapai angka efektivitas yang lebih tinggi lagi dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap laba BUMD pada PAD Kabupaten Sleman. Kontribusi setoran laba PDAM Kabupaten Sleman kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman dari tahun 1994 - 1999 ditunjukkan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Setoran Laba PDAM Kabupaten Sleman
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 1994 - 1999

Tahun	Nilai Setoran Laba PDAM	Pertumbuhan
1994	Rp 1.800.000,-	-
1995	Rp 2.100.000,-	1,67%
1996	Rp 10.000.000,-	376,19%
1997	Rp 20.000.000,-	100,00%
1998	Rp105.000.000,-	425,00%
1999	Rp 55.000.000,-	47,62%

Sumber : Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2001, Materi Ekspose.

Berdasarkan Tabel 15, nampak bahwa pertumbuhan setoran laba PDAM Kabupaten Sleman kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Hal ini berarti kinerja PDAM Kabupaten Sleman masih labil. Untuk itu, PDAM Kabupaten Sleman perlu melakukan berbagai kebijakan perusahaan baik internal maupun eksternal agar kinerjanya makin baik sehingga setoran labanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga makin meningkat. Setoran laba yang makin meningkat pada akhirnya akan menambah PAD Kabupaten Sleman.

Untuk mengurangi tingkat kehilangan air dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pekerjaan fisik, seperti pekerjaan pemasangan pipa distribusi sekunder/tersier serta sambungan rumah. Pekerjaan pemasangan pipa distribusi kurang mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan paket-paket kontrak pekerjaan yang

melibatkan rekanan-rekanan dari golongan ekonomi lemah. Sambungan rumah yang menggunakan bahan-bahan bermutu rendah juga sangat memungkinkan terjadinya kebocoran air. Di samping meningkatkan mutu pekerjaan fisik, tingkat kehilangan air dapat juga dikurangi dan dicegah dengan meningkatkan kualitas para karyawan yang menjadi sumberdaya manusia di PDAM Kabupaten Sleman, seperti mengurangi terjadinya kesalahan pembacaan meter, pencatatan yang kurang cermat, dan kesalahan-kesalahan administratif lainnya.

Usulan menaikkan tarif PDAM memang akan menaikkan pula pendapatan PDAM Kabupaten Sleman yang akhirnya juga akan meningkatkan setoran labanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman sehingga pada akhirnya akan menambah PAD Kabupaten Sleman. Tetapi usulan menaikkan tarif PDAM akan banyak

menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat dan DPRD Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, PDAM Kabupaten Sleman perlu menjelaskan alasan kenaikan tarif PDAM dengan berbagai pertimbangan penjelasan (Risya Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/5974/risyana.html>). Pertama, penjelasan mengenai segmen pelanggan. Kenaikan tarif PDAM akan sangat terasa bagi pelanggan dengan pendapatan rendah, tetapi tidak akan begitu terasa bagi pelanggan dengan pendapatan menengah ke atas. Dengan demikian sasaran kenaikan tarif PDAM perlu ditujukan kepada segmen pelanggan dengan pendapatan menengah ke atas.

Kedua, kenaikan tarif PDAM berkaitan langsung dengan kenaikan tingkat pemakaian. Makin banyak pemakaian makin tinggi tarifnya. Bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, pemakaian air akan dilakukan secara hemat hanya untuk kebutuhan dasarnya yang berupa minum dan memasak. Untuk kebutuhan dasar itulah, tarif air harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat bukan pelanggan PDAM yang umumnya justru membeli air lebih mahal. Ketiga, tarif PDAM umumnya dihitung dengan pemakaian dalam m³. Tidak semua orang dapat membayangkan banyaknya air dalam m³. Satu m³ sama dengan 1.000 liter atau lima drum @200 liter, atau 40 jerigen @25 liter. Apabila harga rata-rata air PDAM adalah Rp300,- per m³, maka harga satu drum adalah Rp60,- atau Rp7,50 per jerigen, atau Rp0,30 per liter. Bandingkan dengan air kemasan yang harganya 4.000 kali (sekitar Rp1.800,- per 1,5 liter atau Rp1.200,- per liter). Tentu tidak adil membandingkan air minum PDAM dengan air kemasan yang begitu praktis dan dapat diminum di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi adilkah menganggap air PDAM mahal hanya karena tidak dapat langsung diminum, padahal dapat diperoleh langsung. Menganggap air PDAM tidak layak minum pun sebenarnya kurang tepat. Air hasil produksi PDAM apabila diperoleh langsung di tempat di mana air tersebut diproduksi pada instalasi pengolahan atau mata air di mana air yang akan didistribusikan telah terlebih dahulu diberi desinfektan juga layak minum.

Penilaian kinerja PDAM Kabupaten Sleman mempertimbangkan komponen biaya operasional yang sangat tergantung dengan kondisi ekonomi, misalnya biaya bahan bakar untuk mesin-mesin PDAM. Oleh karena itu, apabila biaya bahan bakar naik (misalnya

pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak), maka biaya operasional menjadi semakin mahal. Sedangkan untuk mengubah tarif harga jual air ke pelanggan sangat tidak mudah, artinya harus melalui beberapa proses sementara biaya operasional sudah naik terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setoran laba PDAM kepada pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 1998-1999 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 47,62% atau menurun dibandingkan pertumbuhan setoran laba PDAM kepada pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 1997-1998 yang naik sebesar 425%.

Analisis Potensi Penggalan Terhadap Pembentukan BUMD Baru

Menurut AR Karseno (2001), BUMD pada masa lalu merupakan lembaga usaha daerah yang didirikan untuk menciptakan aktivitas bisnis di daerah dan digunakan untuk menyerap anggaran pembangunan daerah yang tidak atau kurang termanfaatkan. Peran pemerintah pusat di dalam mendesain dan mengarahkan BUMD terasa sangat kentara karena sebagian BUMD didirikan dengan visi pemerintah pusat karena BUMD dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis pemerintah pusat di daerah.

Dalam perkembangannya, BUMD menjadi sangat bermanfaat sebagai tempat untuk menyerap tenaga kerja di daerah. Tetapi keberadaan BUMD dengan visi yang berasal dari pemerintah pusat dan adanya ketersediaan tenaga kerja (sumberdaya manusia) lokal yang kurang memadai malah menimbulkan ketidakefektifan misalnya, BUMD menjadi usaha bisnis yang tidak sehat dan tidak efisien karena dukungan dan proteksi sistem birokrasi yang sangat sentralistik. Manajer BUMD mempunyai jiwa birokrat dan bukan jiwa wirausaha.

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan munculnya dua undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah) berdampak terhadap pengelolaan BUMD, yaitu menjadi lebih profesional. Hal ini disebabkan laba BUMD menjadi salah satu sumber anggaran APBD, artinya apabila pada masa lalu ada BUMD yang rugi maka akan memperoleh subsidi tetapi dengan otonomi

daerah per 1 Januari 2001, BUMD harus mampu memperoleh laba yang sebagian disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan reposisi terhadap pengelolaan BUMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Termasuk dalam mendirikan BUMD baru harus berlandaskan pada alasan yang rasional, misalnya dengan memperhatikan faktor endowment yang dimiliki masing-masing daerah.

Analisis potensi penggalan terhadap pembentukan BUMD baru menggunakan data PDRB Kabupaten Sleman, PDRB per kecamatan di Kabupaten Sleman, dan Location Quotient (LQ) per kecamatan di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut akan diperoleh sektor-sektor per

kecamatan yang mempunyai nilai LQ lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil daripada 1 sehingga dapat diusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dari sektor-sektor yang berpotensi ekonomi di Kabupaten Sleman yang berbasis di kecamatan-kecamatan. Munculnya BUMD baru yang berbasis di kecamatan-kecamatan, akan sejalan dengan rencana pembangunan makro Kabupaten Sleman. Dengan demikian, pembentukan BUMD baru akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dan mengembangkan kecamatan yang berpotensi ekonomi (berdasarkan nilai LQ) sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Sleman. Berdasarkan penghitungan nilai LQ untuk Kabupaten Sleman per lapangan usaha yang hasil penghitungannya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16
Location Quotient (LQ) Lapangan Usaha (Sektor)
Kabupaten Sleman Tahun 1999

NO	LAPANGAN USAHA	LQ
1	Pertanian	0.8661
2	Pertambangan dan Penggalan	0.2747
3	Industri Pengolahan	0.8796
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.1481
5	Bangunan	1.1867
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.0020
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.9066
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.3451
9	Jasa-Jasa	1.1326

Sumber: Diolah dari PDRB Kabupaten Sleman.

Nampak pada Tabel 16, beberapa sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Besarnya nilai LQ yang lebih besar daripada 1 untuk sektor-sektor di Kabupaten Sleman tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memungkinkan untuk dikembangkan. Apabila sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 dikelompokkan dalam kategori 3 sektor, maka

sektor-sektor di Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai LQ lebih besar daripada 1 ternyata termasuk dalam kategori sektor jasa. Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sleman perlu memperhatikan hal tersebut karena berkaitan dengan penyediaan lahan dan prasarana lainnya yang dibutuhkan. Termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan dalam mengembangkan dan membentuk BUMD di Kabupaten Sleman. Artinya, BUMD yang dapat dikembangkan dan dibentuk di Kabupaten Sleman adalah BUMD yang berkaitan dengan sektor-

sektor yang mempunyai kemungkinan potensi untuk dikembangkan mengingat nilai LQ sektor yang lebih besar daripada 1. Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X (2001), BUMD yang dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah daerah merupakan BUMD sebagai bagian mutlak pendayagunaan aset dan lembaga ekonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjadikannya profit center agar mampu menjadi sumber penerimaan anggaran APBD.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kesiapan sumberdaya dan anggaran pembangunan (APBD). Peningkatan anggaran penerimaan dalam APBD dapat dilakukan melalui penerimaan PAD khususnya dari setoran laba bersih BUMD. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman seharusnya tidak ragu lagi dalam menargetkan anggaran sumber penerimaan yang berasal dari laba BPD dan BUMD lainnya menjadi lebih besar mengingat realisasi atau efektivitas penerimaan laba BPD dan BUMD lainnya meningkat dari waktu ke waktu. Agar setoran laba bersih BUMD terhadap PAD dan APBD Kabupaten Sleman meningkat pada tahun-tahun mendatang maka BUMD yang sudah ada maupun

BUMD yang akan dikembangkan berdasarkan analisis ekonomi LQ hendaknya dikelola dengan memperhatikan berikut ini (Sri Sultan Hamengku Buwono X, 2001):

- a. Membangun persepsi melalui image building BUMD sebagai entitas bisnis dan mengubah visi bisnis dari *inward-oriented market strategy* menjadi *outward-looking strategy*.
- b. Melakukan dialog berkelanjutan antara kelompok-kelompok pembaharu di dalam dan luar pemerintahan untuk mendapat konsensus dengan pihak legislatif sehingga memungkinkan penerbitan peraturan daerah yang dapat menjadi wahana menciptakan fleksibilitas BUMD.
- c. Meningkatkan keunggulan bersaing BUMD dalam menyiasati proses globalisasi ekonomi.
- d. Melakukan transparansi dalam rekrutmen tenaga profesional maupun dalam pemanfaatan aset, penyertaan saham, dan pemilihan mitra strategis BUMD.
- e. Mendorong perubahan watak dari lembaga birokrasi dan instrumen kekuasaan menjadi korporasi berorientasi profit yang profesional.
- f. Memilih strategi pada tingkatan unit bisnis yang lebih fokus dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. HTTP: //kompas. kampus kita.com/fiscal_01.html.

AR Karseno. Reposisi BUMD Pasca UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Makalah Seminar. 2001.

Bisnis Indonesia. 1 Desember 1999.

_____. 22 Desember 1999.

Bank Pasar Kabupaten Sleman. Neraca Bank Pasar Kabupaten Sleman per 31 Desember 1999 dan 2000.

Bank Pembangunan Daerah DIY. Neraca BPD per September 2001 dan 2002.

BPS Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman Dalam Angka Tahun 1999. 2000.

_____. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dati II Sleman Tahun 1993-1997. 1998.

_____. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dati II Sleman Tahun 1995-1999. 2000.

BPS Propindi DIY. DIY Dalam Angka 1999. 2000.

Budiono. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4: Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE. Yogyakarta. 1992.

Budiono Sri Handoko. Pembangunan Regional. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta. 1984.

_____. Interaksi antara Desa dan Kota. PPE FE UGM dan Deptan RI. Yogyakarta-ta. 1985.

Dumairy. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1996.

Gamma. Rancangan Perda Berselemak Protes. HTTP://www.Gamma.co.id/artikel/42-3/hukum-GM10112-692.shtml.

Gunawan Sumodiningrat. Agenda Pemantapan Otonomi Daerah: Suatu Pokok Pikiran. Seminar Nasional Otonomi Daerah. ISEI Yogyakarta. 1999.

Hadwi Soendjojo. Peta dan Otonomi Daerah. HTTP://www.Plengkung.co.id/Article/DH190120011.shtml.

_____. Reformasi Kebijakan Perolehan Data Spasial. HTTP://www.plengkung.co.id/Article/DH190120013.shtml.

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/29/ekonomi/meng38.htm.

http://www.sidoarjo.go.id.

http://www.sleman.go.id.

Inventarisasi Aset Pemprov Dimanipulasi? HTTP://www.fajar.co.id/berita/05-2002/7metro-4.htm.

Kadariah. Ekonomi Perencanaan. LP FE UI. Jakarta. 1989.

Kompas. 16 Desember 1999.

_____. 7 Desember 2000.

_____. 7 Januari 2001.

_____. 16 Maret 2001.

_____. 26 Nopember 2001.

_____. 15 Desember 2001.

Koran Tempo. Lamongan dan Semangat Otonomi Daerah. [HTTP://www.tempo.interaktif.com/korantempo/news/2002/2/18/nusantara/79.html](http://www.tempo.interaktif.com/korantempo/news/2002/2/18/nusantara/79.html).

Laporan Penelitian PDAM Kabupaten Sleman dan STIE YKPN Yogyakarta, tahun 2001.

Laporan Tahunan Direksi PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2001, Materi Ekspose.

Lincoln Arsyad. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan: Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta. 1999.

Mahbub ul Haq. Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan Untuk Dunia Ketiga. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1983.

Meningkatkan PAD ala Kota Solo. [HTTP://www.build.or.id/Newsletter/Terobosan/terobosan6.htm](http://www.build.or.id/Newsletter/Terobosan/terobosan6.htm).

Mubyarto. Pembangunan Dengan Pemerataan. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM. Yogyakarta. 1992.

Mudrajad Kuncoro. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 1997.

Pemerintah Kabupaten Sleman. Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Triwulan I Tahun Anggaran 2002. 2002.

_____. Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001.

Proceedings. Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Daerah. ISEI Yogyakarta. 1999.

Raksaka Mahi. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah. Makalah Seminar. 2001.

Risyana Sukarma, PDAM dan Manajemen Krisis, <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/5974/risyana.html>

Rudy Badrudin. “Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis)”. Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UII. Yogyakarta. 2000.

Saving, Jason L. “Privatization and The Transition to a Market Economy.” Economic Review (Federal Reserve Bank of Dallas) Journal. Fourth Quarter 1998. p: 17-25.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Penerbit Kuraiko Pratama. Bandung. 1999.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Beberapa Peraturan Pemerintah Bidang Dana Perimbangan Nomor 104, 105, 106, dan 107. Penerbit PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta. 2001.

Soeharsono Sagir. *Ekonomi Indonesia: Gagasan, Pemikiran, dan Polemik*. Penerbit Iqra. Bandung. 1981.

Sri Sultan Hamengku Buwono X. *Pengembangan Strategis BUMD Dalam Otonomi Daerah Propinsi DIY*. Makalah Seminar. 2001.

Suara Merdeka. *Perda Retribusi Bermunculan, Hasil Belum Optimal*. [HTTP://www.suaramerdeka.com/harian/0205/01/kot13.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0205/01/kot13.htm).

Subagyo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. 2. BP STIE YKPN Yogyakarta. Yogyakarta. 2002.

Sukanto R. dan AR Karseno. *Ekonomi Perkotaan*. Ed. 3. BPFE. Yogyakarta. 1997.

Suwarjoko Warpani. *Analisis Kota dan Daerah*. Penerbit ITB. Bandung. 1994.

Wiyono. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah*. [HTTP://www.arupa.or.id/papers/32.htm](http://www.arupa.or.id/papers/32.htm).

HUBUNGAN PEMBINGKAIAN INFORMASI ANGGARAN, TANGGUNG JAWAB, DAN PENGALAMAN TERHADAP PILIHAN KEPUTUSAN PADA INVESTASI BERISIKO

*Frasto Biyanto *)*

ABSTRACT

In the investment decision-making process, framing effect often biases the resulting decision. Prior research found that individual differences such as experience and responsibility also affect the decision making process. Using quasi experiment in this research aimed at testing 1) whether the decisions outcome is difference when the information is framed differently (negatively or positively), 2) whether the degree of responsibility will give different outcomes of decision, and 3) whether the experience level moderate the impact of framing on decision outcome.

The result shows that the decisions made by subject differ in information framed positively and negatively. This finding serves as important evidence about the effect of framing in the decision making process. Furthermore, there is no difference of decision outcomes between subject with high responsibility and low responsibility. The result also indicate that experience reduces the effect of framing in the decision making process.

Kata kunci: pembingkaiian, informasi anggaran, pengalaman, investasi

LATARBELAKANG

Tugas utama seorang manajer adalah untuk melakukan pengambilan keputusan. Tanpa mempertimbangkan tingkat kompleksitas permasalahan, individu secara umum mempergunakan petunjuk-petunjuk (*rule of thumb*) dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah cara informasi disajikan (selanjutnya digunakan istilah pembingkaiian). Pembingkaiian berkaitan dengan cara manusia merasakan atau menstruktur suatu keputusan (Main dan Lambert, 1998). Lebih jauh menurut Anderson (1999) kesalahan paling umum dalam pembuatan keputusan ada dua. Pertama, *confirming-evidence trap*, yaitu bias yang mengarahkan kita untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang sudah dipercayai saja, dan mengabaikan informasi kontradiktif. Kedua adalah *framing trap*, bahwa cara kita mengambil keputusan sering kali ditentukan bagaimana Anda memandang pilihan kita atau cara kita menyusun pernyataan dan informasi di sekitarnya.

Masalah pengambilan keputusan didefinisi sebagai bagaimana tindakan atau pilihan terhadap alternatif yang harus dipilih. Dalam *Prospect theory* yang dikemukakan Kahneman dan Tvesky (1979), dikatakan bahwa bagaimana informasi disajikan

*) Frasto Biyanto, SE., M.Si., adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

(dibingkai) pada pembuat keputusan dapat mempengaruhi jenis keputusan yang diambil akan lebih bersifat berisiko atau berhati-hati. Penelitian yang dilakukan oleh Bazerman (1984), Whyte (1989), serta Rutledge dan Harrel (1994) menunjukkan adanya pengaruh pembingkai terhadap pola pengambilan keputusan yang dilakukan secara kelompok.

Perbedaan pola pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, salah satunya adalah perbedaan individu (*individual differences*). Penelitian dalam bidang ini telah dilakukan diantaranya oleh Alderfer dan Bierman (1970), Slovic (1972), Frederic dan Libby (1986), serta Choo dan Trotman (1991). Menurut Slovic (1972), individu yang telah mendapat pelatihan dan lebih berpengalaman dalam situasi menghadapi risiko akan cenderung berperilaku memilih pilihan yang berisiko apabila dibandingkan dengan individu lainnya.

Penjelasan lain juga dikemukakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Staw (1976), dan Fox (1977), dan Bazerman et al (1984) yang mengidentifikasi bahwa tingkat tanggung jawab atas keputusan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil apakah berisiko ataukah lebih berhati-hati.

Dalam pembuatan keputusan manajer membutuhkan informasi. Pada sisi lain pemberi informasi menginginkan manajer untuk menjatuhkan pilihan pada suatu opsi tertentu. Kedua kepentingan tersebut memunculkan permasalahan yaitu tentang cara mempertemukan keduanya. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa keputusan seseorang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari berbagai faktor tersebut tiga diantaranya adalah pembingkai informasi, tanggung jawab, dan pengalaman.

TUJUAN PENELITIAN

Masalah ini penting karena dapat menambah wacana dalam strategi pembuatan keputusan dan lebih jauh lagi penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris bahwa: (1) pembingkai informasi anggaran memiliki pengaruh terhadap pola keputusan yang diambil, (2) besarnya tanggung jawab yang ditanggung pengambil keputusan berpengaruh terhadap pilihan keputusan, (3) tingkat pengalaman individu akan

berpengaruh terhadap efek pembingkai, dan (4) menguji hubungan ketiga variabel terhadap pilihan risiko.

PENTINGNYA PENELITIAN

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa diantara banyak sumber informasi yang dipergunakan manajer dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi, hal ini sesuai dengan fungsi akuntansi yaitu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu tentang kejadian-kejadian dalam entitas bisnis dan non bisnis untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam membuat keputusan ekonomis.

Guna mencapai kemanfaatan yang lebih tinggi dari akuntansi diperlukan banyak penelitian dalam pengembangannya. Jika penelitian akuntansi berjalan ke arah pengembangan teknik akuntansi manajerial yang lebih baik, diperlukan banyak usaha pemanfaatan dari ilmu keperilakuan (Birnberg dan Nath, 1967). Implementasi teknik-teknik akuntansi membutuhkan perhatian pada elemen manusia, tentang interaksi individu atau kelompok dengan sistem. Apabila akuntansi memasukkan dimensi dari perilaku manusia maka muncul ilmu akuntansi yang lebih luas dari ilmu akuntansi tradisional yaitu akuntansi keperilakuan.

Siegel dan Marconi (1989) menyatakan bahwa cakupan akuntansi keperilakuan sangat luas, termasuk di dalamnya: aplikasi konsep-konsep ilmu keperilakuan ke dalam perancangan dan pengkonstruksian sistem akuntansi, penelitian mengenai reaksi manusia terhadap isi dan format laporan akuntansi, cara informasi tersebut diproses dalam pengambilan keputusan, pengembangan teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan perilaku data pada pemakai, dan pengembangan strategi-strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan orang yang menjalankan organisasi. Cakupan akuntansi keperilakuan dapat dipecah menjadi 3 area umum:

1. Pengaruh perilaku manusia terhadap perancangan, penyusunan, dan penggunaan sistem akuntansi.
2. Pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia.
3. Metoda untuk memprediksi dan metoda untuk mengubah perilaku manusia.

Penelitian ini dititikberatkan pada area ketiga dari akuntansi keperilakuan, terutama pada aspek metoda untuk mengubah perilaku manusia.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik suatu benang merah antara topik penelitian ini dan kaitannya dengan akuntansi, khususnya akuntansi keperilakuan. Apabila kita dapat mengetahui efek pembingkai informasi terhadap suatu keputusan yang dibuat, diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan teknik penyajian informasi akuntansi agar menjadi lebih efektif.

METODA PENELITIAN

Desain Penelitian

Model *quasi experiment* digunakan untuk menguji hipotesis. Data dikumpulkan melalui kuesioner, sehingga akan diperoleh data primer. *Treatment* eksperimen diberikan melalui 4 kasus yang terdapat dalam kuesioner. Responden diminta bertindak dan berpikir seolah-olah ada dalam situasi yang tergambar dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan kuesioner menggunakan model pertanyaan yang telah dikembangkan oleh peneliti berdasarkan model yang digunakan oleh Rutledge dan Harrel (1994).

Penggunaan model penelitian *quasi experiment* dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Subjek penelitian adalah pengambil keputusan yang terdiri atas para manajer yang berkaitan dengan masalah investasi di perusahaannya. Sulitnya akses untuk dapat mengumpulkan subjek manajer guna melakukan eksperimen laboratoris mengakibatkan metoda kuesioner dianggap yang paling sesuai untuk mengetahui perilaku subjek kelompok ini.
2. Validitas eksternal yang tinggi dapat dicapai apabila hasil penelitian dapat digeneralisasi secara luas. Hal tersebut dimungkinkan apabila subjek penelitian mewakili populasi yang diamati.

Pilot-test dan *Pre-test*

Guna meningkatkan validitas internal, perlu dilakukan *pilot-test* terhadap kuesioner. *Pilot-test* dilaksanakan dengan melibatkan 15 orang mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi UGM dari jurusan manajemen, akuntansi, dan IESP. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman subjek terhadap kasus.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan validitas eksternal dengan melakukan *pre-test*. *Pre-test* dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perbedaan terhadap *treatment* yang diberikan secara laboratoris dengan apabila dilakukan dengan pengumpulan dilakukan dengan metoda kuesioner.

Pre-test dilaksanakan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah melakukan eksperimen laboratoris dengan menggunakan desain eksperimen dari Rutledge dan Harrel (1994). Subjek pada eksperimen ini adalah 22 mahasiswa S2 Jurusan Manajemen Program Pasca Sarjana UGM semester 2. Eksperimen dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, pada subjek diberikan kasus 1 dan 2 (kasus dibingkai dengan pembingkai positif dengan tanggung jawab tinggi pada kasus 1 dan tanggung jawab rendah pada kasus 2). Subjek diberikan waktu 10 menit untuk mempelajari kasus, kemudian diberikan waktu 5 menit untuk menjawabnya.

Tahap kedua dilaksanakan pada hari berikutnya dengan subjek yang sama. Subjek diberikan kasus 3 dan 4 (pembingkai negatif tanggungjawab tinggi pada kasus 3 dan tanggung jawab rendah pada kasus 4). Waktu yang diberikan sama dengan eksperimen tahap pertama.

Kelompok responden kedua adalah 22 mahasiswa S2 Jurusan Akuntansi semester 2 pada Program Pascasarjana UGM. Kelompok ini digunakan sebagai model pengumpulan data secara kuesioner. Kepada mereka diberikan keempat kasus secara bersamaan dalam bentuk kuesioner. Responden diminta mengumpulkan kembali kuesioner tiga hari sesudahnya. Hasil jawaban dari kelompok I dan II selanjutnya diuji menggunakan *t-test*. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa kedua metoda memberikan pola jawaban yang secara statistis berasal dari populasi yang sama (Lampiran I).

Pada penelitian ini pengendalian peneliti terhadap variabel bersifat *ex post facto*. Hal ini disebabkan penggunaan metoda *quasi experiment* sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap jawaban subjek.

Pemilihan sampel

Sampel penelitian dipilih dari populasi yang biasa melakukan proses pengambilan keputusan investasi

yaitu manajer. Subjek yang dipilih adalah manajer dibidang keuangan atau yang berkaitan dengan masalah investasi. Lamanya menduduki posisi manajer digunakan untuk mengindikasi variabel pengalaman. Pemilihan sampel diambil dari daftar perusahaan yang tercatat di BEJ baik itu perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner dikirimkan kepada responden manajer melalui pos. Kuesioner dikirimkan kepada 120 perusahaan yang dipilih secara acak. Setiap perusahaan diberikan 3 kuesioner (total kuesioner 360 buah). Kuesioner dikirimkan melalui pos dan dialamatkan kepada *corporate secretary* masing-masing perusahaan. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengisi dan mengirimkan kembali kuesioner adalah 3 minggu.

Responden diminta untuk memberikan jawaban-jawaban dengan memberikan tanda pada *arbitrary scale*, dari pilihan pasti memilih A dan pasti memilih B. Skor yang diberikan bernilai dari 1 sampai 6 yang akan menunjukkan tingkat preferensi responden.

VARIABEL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Variabel pembingkai informasi anggaran

Variabel pembingkai merupakan variabel independen pertama dalam penelitian ini. Pembingkai dibagi menjadi dua kelompok yaitu pembingkai positif dan pembingkai negatif. Pembingkai positif merupakan bentuk penyajian informasi anggaran yang menonjolkan faktor keberhasilan atau keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan pembingkai negatif penyajian informasi anggaran lebih ditonjolkan pada kemungkinan kegagalan atau kerugian yang akan dihadapi. Kahneman dan Tversky (1981) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembingkai berkaitan dengan keputusan yang diambil. Subjek penelitian menunjukkan perilaku yang berbeda pada saat satu informasi disajikan dengan cara yang berbeda (positif dan negatif). Penelitian Hartadi dan Gudono (1998) dengan menggunakan subjek orang Indonesia memberikan hasil yang mendukung penelitian

Kahneman dan Tversky walaupun dengan beberapa perkecualian. Mittal dan Rose (1998) menemukan pembingkai positif dan negatif berpengaruh secara berbeda terhadap penginterpretasian suatu isu dan memiliki dampak yang berbeda dalam subjek penelitiannya. Pembingkai informasi secara negatif berpengaruh lebih kuat untuk tindakan *risk taking* dibandingkan pembingkai positif. Zickar dan Highhouse (1998) menemukan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pembingkai untuk *gain* dan *losses*, pada pilihan yang berisiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky (1979–1981), Fishburn dan Kochenberger (1979), Payne et al (1998, 1981), Mowen dan Mowen (1986) menunjukkan pada saat ada kerugian (*loss*) orang akan cenderung *bertindak risk taking*, sedangkan apabila pada posisi untung (*gain*) orang akan bertindak *risk averse*.

H1 : Terdapat perbedaan sifat keputusan pada investasi yang diambil individu apabila informasi dibingkai secara negatif dengan apabila informasi dibingkai secara positif.

Variabel Tanggung jawab atas Keputusan

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak menemukan bahwa tanggung jawab kegagalan suatu investasi dapat mempertinggi pilihan mengambil risiko oleh pengambil keputusan. Staw (1976); Staw dan Fox (1977); Caldwell dan O'reilly (1982); Bazerman, et al, (1984) menemukan bahwa individu cenderung akan melakukan penambahan investasi terhadap investasi awal. Proses justifikasi ini disebabkan oleh efek psikologis dari tanggung jawab pribadi dan efek sosial. Rutledge dan Harrel, (1994). Tanggung jawab yang diterima akan meningkatkan pilihan untuk melakukan investasi tambahan pada kondisi menghadapi risiko mendapatkan hasil yang negatif atau keputusan yang bersifat *risk taking* (Staw(1976); Staw dan Fox (1977); Caldwell dan Oreiley (1982); Bazerman et al (1984); Rutledge dan Harrel (1993)).

H2 : Ada perbedaan keputusan pada investasi berisiko yang diambil individu dengan tanggung jawab tinggi dan individu dengan tanggung jawab rendah.

Variabel pengalaman dalam pengambilan keputusan dan pengaruhnya terhadap efek pembingkai

Menurut Alderfer dan Bierman (1979), terdapat perbedaan dalam pembuatan keputusan diantara subjek pelajar/mahasiswa dan manajer serta diantara anggota kelompok manajer. Diasumsikan manajer adalah orang yang memiliki pengalaman dalam pengambilan keputusan sedangkan mahasiswa adalah subjek yang belum berpengalaman dalam pembuatan keputusan yang berisiko. Perbedaan terjadi pada perbedaan asumsi subjek terhadap situasi dalam simulasi pilihan risiko personal dan tingkat penerimaan risiko pribadi.

Slovic (1972), mengatakan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pelatihan dan pengalaman yang telah didapat dalam satu risiko tertentu mempunyai peran yang besar dalam menentukan perilaku *risk taking*. Dimasukkannya variabel pengalaman dalam penelitian ini dianggap oleh peneliti sebagai suatu keunggulan penelitian ini. Selama ini penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah pembingkai informasi belum ada yang memasukkan pengalaman sebagai salah satu variabelnya. Menurut peneliti terdapat hubungan yang berlawanan antara pengalaman dan pembingkai informasi. Kemampuan individu dalam menginterpretasikan informasi akan sangat dipengaruhi oleh pengalamannya dalam membaca informasi. Seseorang dengan pengalaman pembuatan keputusan yang banyak akan lebih mampu memahami informasi. Dapat disimpulkan pengalaman akan mereduksi pengaruh pembingkai dalam pengambilan keputusan. Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut adalah:

H3 : Semakin tinggi pengalaman individu, semakin rendah efek dari pembingkai informasi.

Dari penjelasan terdahulu dan jika ketiga hipotesis terdukung secara empiris maka dapat dibuat suatu hipotesis gabungan :

H4 : Sifat keputusan investasi berisiko yang diambil individu berhubungan dengan variabel pembingkai, tanggung jawab, dan pengalaman.

ANALISIS DATA

Kuesioner yang kembali 45 buah (12,5%) dan sebanyak 36 buah (10%) layak untuk dianalisa. Responden terdiri dari 28 pria dan 8 perempuan. Posisi subjek pada saat mengisi kuesioner terbagi menjadi: 20 orang manajer, 6 orang asisten general manajer, 7 orang general manajer, dan 3 orang direktur. Lama rata-rata menduduki posisi adalah 4,5 tahun. Umur rata-rata responden 40,5 tahun, dengan umur tertua 50 tahun dan termuda 30 tahun.

Analisis Hipotesis Satu

Pengujian H1 bahwa terdapat perbedaan sifat keputusan pada investasi berisiko yang diambil individu apabila informasi dibingkai secara negatif dengan apabila informasi dibingkai secara positif, memanfaatkan *paired t-test* dengan tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 1

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	NEGTINGG - POSTTING	1,3611	2,2823	,3804	,5889	2,1333	3,578	35	,001
Pair 2	NEGREND - POSREND	1,2778	2,1059	,3510	,5652	1,9903	3,641	35	,001

Hasil pengujian dengan tingkat signifikansi (a) 5 % atau *confidence level* 95% pada *degree of freedom* (df) 35, menunjukkan t_{hitung} adalah 3,578 untuk

pembingkai negatif- tanggung jawab tinggi, dengan positif-tanggung jawab tinggi, dan t_{hitung} 3,641 untuk negatif -tanggung jawab rendah dengan positif-

tanggung jawab rendah. Hal tersebut berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,578 > 1,697$) dan ($3,641 > 1,697$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sifat keputusan pada investasi berisiko yang diambil individu apabila

informasi dibingkai secara negatif dan apabila informasi dibingkai secara positif dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 2
Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NEGTINGG	5,1389	36	1,4373	,2396
	NEGREND	4,8889	36	1,7853	,2976
Pair 2	POSTTING	3,7778	36	2,0440	,3407
	POSREND	3,6111	36	2,1945	,3658

Dengan melihat nilai rata-rata masing-masing pembingkai peneliti menarik kesimpulan bahwa pembingkai informasi secara negatif akan menghasilkan keputusan yang sifatnya *risk taking*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata untuk pembingkai negatif dibandingkan nilai rata-rata untuk pembingkai positif, baik dengan tanggung jawab tinggi maupun tanggung jawab rendah (5,1389) dibanding (3,7778 dengan 3,611). Hal tersebut diperkuat oleh nilai deviasi standar untuk pembingkai negatif yang lebih kecil (1,4373) dan (1,7853) sehingga nilai keputusan lebih mengelompok pada satu area dibandingkan pembingkai positif yang nilainya lebih besar (2,044 dan 2,1945).

Hasil ini mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya oleh: Kahneman dan Tversky (1979, 1981);

Mowen dan Mowen (1986); Mittal dan Ross (1998); dan Hartadi dan Gudono (1998) mengenai pengaruh pembingkai informasi terhadap keputusan yang diambil oleh individu.

Analisis Hipotesis Dua

Hipotesis alternatif dua adalah *ada perbedaan sifat keputusan pada investasi berisiko yang diambil pada kondisi tanggung jawab tinggi dengan kondisi tanggung jawab rendah*, diuji dengan menggunakan *paired t-test*. Hasil statistik menunjukkan bahwa pemberian *treatment* tanggung jawab rendah tidak mengakibatkan subjek mengubah keputusannya. Hal ini disimpulkan dengan pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 3

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	NEGTINGG - NEGREND	,2500	1,3175	,2196	-,1958	,6958	1,139	35	,263
Pair 2	POSTTING - POSREND	,1667	1,5766	,2628	-,3668	,7001	,634	35	,530

Hasil pengujian statistik pada tingkat signifikansi (α) 5 % atau *confidence level* 95% pada *degree of freedom* (df) 35 menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} , baik pada pembingkai negatif ($1,139 < 1,697$)

ataupun pada pembingkai positif ($0,634 < 1,697$). Tingkat signifikansi kedua pembingkai juga lebih besar dari 0,05 yaitu 0,263 untuk pembingkai negatif dan 0,530 untuk pembingkai positif, sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan respon keputusan individu pada tingkat tanggung jawab tinggi maupun pada tingkat tanggung jawab rendah.

Hasil ini berbeda dengan apa yang telah ditemukan oleh Rutledge dan Harrel (1993). Pada penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keputusan pada pilihan berisiko apabila individu atau kelompok diberikan tanggung jawab yang berbeda.

Analisis Hipotesis Tiga

Statistik regresi linear digunakan untuk menguji hipotesis ketiga yaitu, *semakin tinggi pengalaman*

individu, semakin rendah efek dari pembingkaiian informasi. Pada tingkat signifikansi 5% pengujian statistik memakai *responden-observation* sebanyak 144 yang diperoleh dari 36 responden, yang pada setiap responden dilakukan 4 observasi (36x4). Dalam hipotesis tersebut variabel pengalaman memoderasi hubungan antara variabel independen pembingkaiian dengan variabel independen pengalaman ($X_1; X_2$). Perkalian tersebut berguna untuk mengetahui efek dari variabel independen pengalaman, maka persamaan regresi yang dipergunakan adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1X_2$$

Tabel 4
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,517 ^a	,267	,252	1,7163

a. Predictors: (Constant), PERUBAH, EXPER, INFORM

Variabel yang dimasukkan adalah EXPER sebagai variabel pengalaman dan tidak terdapat variabel yang dikeluarkan karena menggunakan metoda *single step*. Hasil pengujian statistik menunjukkan pengaruh variabel pengalaman pada efek variabel pembingkaiian. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel pengalaman (EXPER), pembingkaiian (INFORM), dan perubahan keputusan akibat adanya

pembingkaiian yang berbeda (PERUBAH) (koefisein korelasi $0,517 > 0,50$), walaupun hanya 25,2% dari perubahan keputusan yang bisa dijelaskan oleh model (ditunjukkan oleh angka *adjusted R square* 0,252). *Adjusted R square* digunakan karena dalam persamaan tersebut terdapat lebih dari 1 variabel independen. Sisanya ($100\% - 25,2\% = 74,8\%$) dijelaskan oleh sebab lain.

Tabel 5

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	150,532	3	50,177	17,034	,000 ^a
	Residual	412,406	140	2,946		
	Total	562,937	143			

a. Predictors: (Constant), PERUBAH, EXPER, INFORM

b. Dependent Variable: KPTSAN

Nilai F_{hitung} pada pengujian *F-test* EXPER, INFORM dan PERUBAH terhadap variabel Y (KPTSAN) adalah 17,034 dengan tingkat signifikansi 0,001, sehingga F_{hitung}

$>F_{tabel}$ ($17,03 > 7,56$) dan probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi sifat keputusan yang diambil oleh individu.

Tabel 6

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,958	,542		1,769	,079
	INFORM	4,267	,766	1,079	5,570	,000
	EXPER	1,005	,185	,557	5,445	,000
	PERUBAH	-1,083	,261	-,858	-4,148	,000

a. Dependent Variable: KPTSAN

Adapun nilai koefisien untuk ketiganya dapat dilihat pada tabel 6. Dari nilai koefisien variabel PERUBAH dapat diketahui bahwa variabel pengalaman memoderasi hubungan antara variabel pembinaan dengan variabel keputusan secara negatif (-1,083) pada tingkat signifikansi 0,05, sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi pengalaman individu akan semakin rendah efek dari pembinaan (H3 didukung secara empiris).

Analisis Hipotesis Empat

Adanya hasil yang tidak signifikansi pada variabel tanggung jawab terhadap keputusan pada investasi berisiko mengakibatkan hipotesis empat bahwa “*Sifat keputusan investasi berisiko yang diambil individu*

berhubungan dengan variabel pembinaan, tanggung jawab, dan pengalaman”, tidak dapat didukung secara penuh. Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis alternatif pengganti dengan mengeluarkan variabel tanggung jawab yaitu :

H4 : Sifat keputusan pada investasi berisiko yang diambil individu berhubungan dengan variabel pembinaan dan pengalaman”

Seperti halnya hipotesis tiga, pada tingkat signifikansi 5%, pengujian statistis memakai *responden-observation* sebanyak 144 yang diperoleh dari 36 responden, yang pada setiap responden dilakukan 4 observasi (36 x 4).

Tabel 7

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	22,054 ^a	5	,001
Likelihood Ratio	22,930	5	,000
Linear-by-Linear Association	15,921	1	,000
N of Valid Cases	144		

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

Tabel 8
Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	38,508 ^a	15	,001
Likelihood Ratio	42,653	15	,000
Linear-by-Linear Association	9,443	1	,002
N of Valid Cases	144		

a. 12 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,58.

Hasil perhitungan *chi-square* variabel pembinaan (INFORM) dan keputusan (KPTSAN) memberikan angka 22,054 yang lebih besar dari *chi-square-tabel* (11,07) pada tingkat signifikansi 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Hal tersebut berarti bahwa apabila sifat keputusan pada investasi berisiko berhubungan dengan variabel pembinaan terbukti secara empiris (Tabel 7).

Pada pengujian *chi-square* antara variabel pengalaman (EXPER) dengan variabel keputusan (KPTSAN) memberikan angka hasil *chi-square hitung* (35,508) lebih besar dari *chi-square tabel* (25,00) pada tingkat signifikansi 0,001 (<0,005), sehingga hubungan antara variabel EXPER dan KPTSAN didukung secara statistis (Tabel 8), maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen sifat keputusan pada investasi berisiko (KPTSAN) berhubungan dengan variabel independen pembinaan (INFORM) dan pengalaman (EXPER).

SIMPULAN

Penelitian ini mencoba menggabungkan hal yang telah diteliti dengan variabel baru dalam topik ini. Tujuan utama penelitian ini adalah menguji secara empiris hipotesis yang diajukan. Dari data yang terkumpul diperoleh responden yang cukup bervariasi level kedudukannya di perusahaan, walaupun untuk proporsinya tidak sama.

Setelah dilakukan pengujian statistis pada data yang terkumpul diperoleh hasil bahwa H1 dan H3 didukung secara empiris, tetapi H2 tidak didukung. Pembinaan informasi memang berpengaruh terhadap

sifat keputusan yang diambil, dan pengaruh tersebut akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya pengalaman individu, sedangkan aspek tanggung jawab tidak memberikan perbedaan pada sifat keputusan yang diambil oleh subjek. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian terdahulu.

Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan karakteristik subjek. Perilaku subjek sangat dipengaruhi oleh kultur. Mungkin karena kultur pertanggung jawaban terhadap hukum di Indonesia masih lemah menyebabkan individu seringkali mengabaikan aspek tanggung jawab dalam membuat keputusan. Kemungkinan lain adalah perbedaan metoda eksperimen, dan pada penelitian ini menggunakan metoda *quasi experiment*.

Disebabkan tidak didukungnya H2, maka H4 agar dapat diuji perlu dilakukan penyesuaian dengan mengeluarkan variabel tanggung jawab sehingga pada H4 hanya diuji hubungan antara variabel independen pembinaan, pengalaman dan variabel dependen keputusan. Hasil pengujian *chi-square* menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan diantara ketiga variabel tersebut walaupun secara statistis tidak dapat dikatakan kuat. Hubungan yang tidak terlalu kuat tersebut karena dalam pengambilan keputusan investasi, individu tentu akan mempertimbangkan dan dipengaruhi variabel-variabel lain yang sifatnya sangat kompleks. Dalam situasi nyata tidak mungkin individu mengambil keputusan investasi hanya berdasarkan pembinaan dari informasi atau pengalamannya saja, tentu ia akan melakukan banyak analisis dan pertimbangan.

Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dihindari oleh peneliti keterbatasan tersebut tentu saja akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah :

- Desain penelitian yang bersifat *quasai experiment* memiliki kelemahan dalam hal ketidakmampuan peneliti dalam mengontrol variabel-variabel penyela lain yang berpengaruh terhadap jawaban yang diberikan oleh subjek. Jika variabel lain tersebut ternyata berpengaruh secara lebih kuat dari *treatment* mungkin akan menjadikan hasil penelitian menjadi bias.
- Menggunakan kuesioner dalam menyampaikan *treatment* kepada subjek bisa menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap maksud dari peneliti. Hal ini bila terjadi bisa menjadikan analisis yang dilakukan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Implikasi hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wacana mengenai bagaimana kita menyajikan suatu informasi. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan diharapkan kita dapat membuat keputusan yang lebih berkualitas .peningkatan kualitas ini dapat dicapai salah satunya dengan cara pembingkaiian informasi

yang lebih sesuai dengan tujuan dan keputusan yang ingin dicapai. Kita dapat menyajikan informasi dengan cara positif jika kita menginginkan keputusan yang lebih menghindari risiko, dan sebaliknya.

Penggunaan pembingkaiian informasi secara positif dapat dimanfaatkan untuk mengurangi perilaku *risk taker* pada individu sehingga menjadikan individu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebaliknya pembingkaiannya negatif akan lebih cocok untuk individu yang bersifat konservatif sehingga ia akan lebih mempertimbangkan keputusannya

Dengan mengetahui efek dari pengalaman terhadap pembingkaiian, penyaji informasi tidak perlu khawatir mengenai bagaimana ia harus membingkai informasi bagi orang yang lebih banyak pengalaman karena terbukti secara empiris bahwa efek pembingkaiian berkurang seiring dengan peningkatan pengalaman individu.

Saran Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian yang akan datang untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang ada penelitian ini, peneliti menyarankan agar digunakan desain eksperimen labatoris. Penggunaan desain ini akan meningkatkan validitas internalnya sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih akurat. Subjek yang digunakan sebaiknya adalah subjek yang benar-benar mengambil keputusan, karena selama ini penelitian dalam bidang ini memanfaatkan subjek mahasiswa yang belum terbiasa dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Alderfer C.P., dan H. Bierman, “*Choices With Risk: Beyond the managers an vari-ances.*” Journal of Business,

Anderson, K., “*Decision-Making Traps,*” Broadcast Engineering, Vol.41 (January 1999)

Bazerman, M.H., “*The Relevance of Kahneman and Tversky’s Concept of Framing to Organizational Behavior,*” Journal of Management, Vol. 10 (1984).

Bimberg, Jacob G., dan Raghu Nath, “*Implication of behavior Science for Managerial Accounting,*” The Accounting Review, (July, 1967).

Buhler, Patricia M., “*Decision-making: A Key to Successful Managers Supervision,*” Burlington, Vol. 62, (February 2001).

Caldwell, D.F., dan C.A. O’Reilly, “*Response to Failure: The Effect of Choice and Responsibility on Impression Management*”, Academy of Management Journal, Vol. 66 (July 1991).

Choo, Freddie, dan Ken T Trotman, “*Relationship between Knowledge Structure and for Experienced and Inexperienced auditors*”. The accounting review, Vol. 66 (July 1991)

Fishburn, P.C. dan G.A. Kochenberger, “*Two piece von Neuman Morgenstern Utility Function*”, Decision Science, Vol. 10 (1979).

Frederick, David M., dan Robert Libby, “*Expertise and Auditors Judgements of Con-junctives Events*”, Journal of Accounting Research, Vol. 24 (Autumn 1986).

Hammond, John S., Ralph L. Keeney, dan Howard Raiffa, “*The Hidden Traps in Decisions Making*”, Harvard Business Review (September–October 1998)

Hartadi, Bambang, Gudono, “—”, Jurnal Riset Akuntansi (Januari 1998).

Hendrikson, Eldon S., dan Michel F. Van Breda, “*Accounting Theory*”, Irwin, McGraw-Hill, Edisi 5 (1992).

Kahneman D., dan A. Tversky, “*Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk*”, Econometrica, Vol. 47 (1979).

Main, D.J., “*Improving Your Decision Making*”, Business and Economics Review, Vol. 44 (April–Juni 1998).

Mittal V., W.T. Ross Jr., “*The Impact of Positive and Negative Affect and Issue Framing on Issue Interpretation and Risk Taking*”, Organization Behavior & Human Decision Processes, Vol. 76 (December 1998).

Mowen, M.M., dan J.C. Mowen, “*An Empirical Examination of the Biasing Effect of Framing on Business Decisions*”, Decisions Sciences, Vol. 17 (1986).

Payne, J.W., D.J. Laughhunn, R. Crum, “*Futher Test of Aspiration Level in Risky Choice Behavior*”, Management Science, Vol. 27 (1981).

Ruthledge, R.W., dan A.M. Harrel, “*Escalating Commitment to an Ongoing Project: The Effect of Responsibility and Framing of*

Accounting Information”, International Journal of Management, Vol. 10 (1993).

Ruthledge, R.W., dan A.M. Harrel, “*The Impact of Responsibility and Framing of the Budgetary Information on Group Shifts*”, Behavior Research in Accounting, Vol. 6 (1994)

Siegel, Gary dan Helene R. Marconi, “*Behavioral Accounting*,” South Western Publishing Co.,

Slovic, B.M., “*Psychological of Human Judgment: Implications for Investment Decision Making*”, Journal of Finance (September, 1972).

Staw, B.M., “*Knee Deep in the Big Muddy: A Study of Escalating Commitment to a Chosen Course of Action*,” Organization Behavior and Human Performances, Vol. 16(1976)

Staw, B.M., dan F. Fox, “*Escalation: Some Determinations of Commitment to a Previously Chosen Course of Actions*,” Human Relation, Vol. 30 (1977).

Tversky, A., dan D Kahneman, “*The Framing of Decisions and the Psychological of Choice*”, Science, Vol. 211 (1981).

Wallach, M.A., N. Kogan, D.D.Bem, “*Diffusion of Responsibility and Level of Risk Taking in Groups*”, Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol.14 69 (1964).

Whyte, G, “*Groupthink Reconsidered*”, Academy of Management Review, Vol. 14 (1989).

Zickar M.J., S. Highhouse, *Looking Closer at the Effect of Framing on Risky Choice: An Item Response Theory Analysis*,” Organizational behavior & human decision Processes, Vol. 75 (July 1998).

Choo, Freddie, dan Ken T Trotman, “*The Relationship between Knowledge Structure and Judgment for Experienced and Inexperienced Auditors*”, The Accounting Review, Vol.66 (July 1991)

PENERAPAN *BALANCED SCORECARD* SEBAGAI PENGUKUR KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK

Djoko Susanto^{*)}
Siti Resmi^{**)}

ABSTRACT

Organization are competing in complex so that an accurate understanding of the goals and methods for achieving those goals is vital in a complex competition among organizations. The balanced scorecard translates an organization's mission and strategy into a comprehensive set of performance measures that provides the framework for strategic measurement and management system. The balanced scorecard emphasizes on achieving financial objectives their performance drivers. The scorecard measures organizational performance across four balanced perspectives: financial, customers/stakeholders, internal business processes, and learning and growth.

Balanced scorecard as a performance measure can be implemented either on profit oriented organizations or non profit and governmental organizations. The non profit and government organizations implement the balanced scorecard for actualizing good governance so that they need to measure their performance in order to be accountable. Implementing balanced scorecard in the non profit and government organizations needs some adjustments because they are different from the profit oriented company especially the strategy, value, outcome, stakeholder/customer, key success factor, etc.

Keywords: performance measurement, balanced scorecard, government, vision, mission

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan peraturan dalam bentuk keputusan dan Instruksi Presiden yang mewajibkan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengukur kinerja dan untuk lebih dapat bertanggung jawab (akuntabel). Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan BUMN No. 215/M – BUMN I/1999 menyatakan bahwa BUMN diwajibkan untuk mengukur kinerjanya dalam bentuk indikator keuangan (*debt equity, net working capital to total assets, inventory turnover*, dan lain-lain); pertumbuhan produktifitas; pertumbuhan persaingan; pertumbuhan efisiensi; pengembangan sumber daya manusia; inovasi produk dan usaha; penelitian dan pengembangan; pembangunan masyarakat; kepuasan pelanggan; kepedulian lingkungan; dan lain-lain. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 menyatakan bahwa unit-unit eselon II ke atas berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Oleh karena pengukuran kinerja merupakan salah satu bagian dari LAKIP, maka unit-unit tersebut berkewajiban melakukan pengukuran kinerja.

^{*)} Dr. Djoko Susanto, MSA., Akuntan adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta.

^{**)} Dra. Siti Resmi, MM., Akuntan adalah Dosen Tetap AMP YKPN Yogyakarta.

Ketentuan atau aturan baru tersebut memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada instansi pemerintah dan BUMN untuk memperkenalkan sistem pengukuran kinerja dan pemantauan yang efektif. Untuk dapat mengimplementasikan ketentuan atau peraturan tersebut dengan berhasil, suatu organisasi harus membuat perencanaan strategis agar dapat mencapai visi dan misi organisasi serta mengkaitkan program dan kegiatan dengan tujuannya.

Terdapat banyak pendekatan dalam mengukur kinerja, diantaranya adalah: Kerangka kerja “*Program Logic*”, *Total Quality Management*, Piramida Kinerja, Model *Stakeholder*, “*Maisel’s Balanced scorecard*”, *Effective Progress and Performance Measurement* (EP2M), maupun “*Kaplan & Norton’s*” *Balanced Scorecard*. Bastian (2001) mengatakan bahwa terdapat beberapa alat dalam pengukuran kinerja diantaranya adalah *balanced scorecard*, dan Penilaian Dengan 3 E (Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas).

Untuk dapat menilai kinerja sektor publik (instansi pemerintah yang tidak berorientasi laba dan organisasi nirlaba lainnya) secara akurat, dibutuhkan indikator kinerja keuangan dan non keuangan. Pendekatan *balanced scorecard* menyediakan kerangka kerja untuk tujuan tersebut. Lebih penting lagi, bahwasannya pendekatan *balanced scorecard* memperhitungkan entitas sebagai fungsi yang menyeluruh dengan mengaitkan visi, misi, dan strategi organisasi dengan kinerja keuangan dan non keuangan dalam mencapainya, bahkan tidak hanya sebagai sistem pengukuran kinerja tetapi juga merupakan sistem manajemen kinerja strategik yang komprehensif dan progresif. Untuk mengukur strategi suatu organisasi, seluruh tujuan dan ukuran baik ukuran keuangan maupun non keuangan harus diturunkan dari visi dan misi organisasi tersebut. Akhir-akhir ini, pendekatan *balanced scorecard* digunakan oleh banyak organisasi (non profit) yang sukses sebagai pusat strategi dan kerangka kerja pengukuran yang membantu pimpinan menyatakan, mengomunikasikan, dan menerapkan strategi dengan menggunakan sistem yang saling terkait dengan visi jangka panjang. Beberapa organisasi pemerintah dan non profit di luar negeri yang telah berhasil menerapkan *balanced scorecard*, antara lain: *The City of Charlotte, North Caroline; United Way of Southeastern New England; May Institute and New Profit Inc.; Montefiore Hospital* (Kaplan and Norton,

2001). Contoh lain adalah: *Naval Undersea Warfare Center (NUWC), State of Massachusetts Department of Mental Health* (<http://www.bscd4gov.com/government.htm>).

Dalam sebuah *balanced scorecard*, pengukuran kinerja dilakukan dalam empat perspektif yang berbeda, yaitu: keuangan (*stakeholders/financial*), pelanggan (*customer*), proses internal (*internal process*), dan pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*). Keempat perspektif tersebut telah mewakili indikator (ukuran) kinerja keuangan dan non keuangan yang digunakan sebagai indikator pengukuran kinerja suatu organisasi.

Melihat keberhasilan penerapan *balanced scorecard* pada sektor publik (organisasi pemerintah maupun non profit) di beberapa negara tersebut, maka artikel ini akan menguraikan lebih jauh tentang alat pengukur *balanced scorecard*, contoh penerapannya pada sektor publik, dan kemungkinan penerapannya di Indonesia sebagai upaya realisasi Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah.

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang tertuang dalam perumusan strategis. Lary D Stout dalam Bastian (2001) menyatakan bahwa “pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses”. Setiap organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasar kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang baik, dibutuhkan artikulasi yang jelas tentang rencana strategik suatu organisasi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur serta berhubungan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tim Studi AKIP (2000) menyatakan pengukuran kinerja merupakan hal penting dalam sistem pengendalian manajemen karena sebagai alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk:

1. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya;
2. menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran oleh manajemen atas program-program;
3. mengelola program secara efisien;
4. menyediakan data dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian program;
5. membuat kebijaksanaan anggaran;
6. mengelola dan mengukur hasil program;
7. umpan balik bagi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang;
8. mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan kepada manajemen.

Selama ini banyak organisasi yang melakukan pengukuran kinerja secara tradisional, yaitu pengukuran kinerja yang hanya mendasarkan pada aspek finansial atau keuangan seperti *return on investment* (ROI), *profit margin*, *economic value added* (EVA) dan rasio-rasio keuangan yang lain. Dunia bisnis yang semakin kompetitif mendorong manajemen untuk tidak hanya mengukur kinerja dari aspek finansial saja tetapi juga aspek lain yang bersifat non finansial seperti kepuasan pelanggan, menjadi pemimpin suatu produk, dan lain-lain. Bastian (2001) mengatakan bahwa aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja meliputi: aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, kepuasan pegawai dan waktu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya meliputi aspek finansial saja tetapi juga aspek non finansial. Pentingnya pengukuran kinerja berdasarkan aspek non finansial juga dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1996). Pengukuran kinerja berdasar aspek keuangan saja memiliki kelemahan, karena kinerja keuangan tidak mampu mengukur kinerja harta-harta tak berwujud/tak tampak (*intangible assets*) dan harta-harta intelektual (sumberdaya manusia perusahaan); kinerja keuangan tidak mampu bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. Dengan kelemahan-kelemahan ini, pada tahun 1992 Kaplan dan Norton membuat sistematis sebuah konsep yang dapat

memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan pencapaian visi dan misi organisasi ke dalam suatu set pengukuran penting, yang dialokasikan ke seluruh perspektif organisasi (keuangan dan non keuangan) yang disebut *balanced scorecard*.

PENDEKATAN *BALANCED SCORECARD*

Pengukuran kinerja yang efektif hendaknya mampu menerjemahkan misi, visi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja baik kinerja keuangan maupun non keuangan. Menurut Kaplan dan Norton, pendekatan *balanced scorecard* mampu menerjemahkan strategi dan misi organisasi ke dalam suatu perangkat pengukuran kinerja yang komprehensif yang merupakan kerangka dalam melaksanakan strategi. Hal ini disebabkan *balanced scorecard* tidak hanya memfokuskan diri pada pencapaian tujuan finansial dan jangka pendek tetapi juga memperhatikan pada tujuan non finansial dan jangka panjang.

Dalam pendekatan *balanced scorecard*, suatu kinerja diukur dari empat perspektif, yaitu: perspektif keuangan (*stakeholder/financial*), perspektif pelanggan (*customer*), perspektif proses bisnis internal (*internal business*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*). Perspektif keuangan memberikan penilaian terhadap target keuangan yang dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visinya (“bagaimana kinerja keuangan kita dilihat oleh para *stakeholder*”). Perspektif keuangan memberikan penilaian terhadap segmen pasar yang dituju dan tuntutan pelanggan beserta kebutuhan yang dilayani oleh organisasi (“bagaimana pelanggan melihat kita”, “bagaimana kita melihat pelanggan”). Perspektif proses bisnis internal memberikan penilaian gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pelanggan (“apa yang harus kita lakukan dengan amat baik untuk memenuhi harapan pelanggan dan *stakeholder* kita”). Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan penilaian yang merupakan pemacu kompetisi personal, prasarana sistem informasi, dan suasana lingkungan kerja yang diperlukan (“apakah kita terus berinovasi dan belajar untuk meningkatkan/menambah nilai jasa yang ada dan/atau menciptakan jasa baru untuk memenuhi harapan pelanggan”).

Empat perspektif menurut Kaplan dan Norton tersebut merupakan sebuah pola dasar dan bukan merupakan model yang langsung cocok untuk setiap organisasi. Oleh karena itu dimungkinkan adanya modifikasi kerangka penerapan *balanced scorecard* sesuai dengan misi, visi dan tujuan organisasi yang bersangkutan. Meskipun pada awalnya *balanced scorecard* didisain untuk organisasi bisnis (berorientasi profit), dalam perkembangan berikutnya *balanced scorecard* dapat pula diterapkan untuk organisasi sektor publik baik instansi pemerintah maupun organisasi non profit lainnya. Sudibyo (1997) mengatakan bahwa BUMN dapat menilai kinerja organisasinya dengan pendekatan *balanced scorecard* sepanjang telah memformulasikan misi dan strateginya serta telah mengenal, apresiatif, dan bersikap positif terhadap paradigma dan pendekatan-pendekatan manajemen era informasi. Kaplan dan Norton (2001) menyatakan bahwa dalam waktu lima tahun terakhir ini *balanced scorecard* telah diterapkan oleh beberapa organisasi non profit dan pemerintah dengan kerangka modifikasi tertentu. Chang dan Chow (1999) dalam Saptono dan Widanarto (2002) memberikan contoh penerapan *balanced scorecard* pada lembaga pendidikan tinggi. Penerapan *balanced scorecard* pada lembaga pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan sepanjang *balanced scorecard* dipahami secara benar dan ada usaha dari lembaga tersebut untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Organisasi yang berbeda tentu mempunyai visi, misi dan strategi yang berbeda, demikian pula penekanan pada setiap perspektifnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa visi, misi, dan strategi merupakan komponen utama dalam penerapan *balanced scorecard*. Oleh karena itu ukuran kinerja yang dipakai dalam *balanced scorecard* harus dapat menunjukkan visi, misi, dan strategi suatu organisasi/instansi. Terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa ukuran kinerja dalam *balanced scorecard* telah menunjukkan strategi yang telah disusun oleh suatu organisasi/instansi. Kriteria tersebut adalah:

1. Adanya hubungan sebab akibat. Setiap ukuran kinerja dalam *balanced scorecard* seharusnya merupakan bagian dari kesatuan hubungan sebab dan akibat yang merupakan representasi dari strategi organisasi.

2. Adanya pendorong kinerja. Ukuran kinerja dalam *balanced scorecard* seharusnya mengandung ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang menunjukkan hasil kinerja yang telah lalu dan ukuran kinerja pendorong yang merupakan ukuran yang mendorong perbaikan kinerja untuk masa mendatang.
3. Terhubungnya dengan keuangan. Perubahan-perubahan paradigma dalam organisasi mendorong manajemen untuk memfokuskan diri pada kualitas, kepuasan pelanggan, atau inovasi baru. Ukuran kinerja yang baik seharusnya selalu mengaitkan hal-hal tersebut dengan ukuran keuangan.

PENERAPAN *BALANCED SCORECARD* PADA SEKTOR PUBLIK

Meskipun pada awalnya konsep *balanced scorecard* diterapkan pada sektor swasta (*profit motive organization*), pada perkembangannya konsep ini dapat pula ditetapkan pada organisasi sektor publik. Kaplan dan Norton (2001) mengatakan bahwa penerapan *balanced scorecard* pada organisasi sektor publik yaitu organisasi non profit dan pemerintah (*non profit and government organization*, disingkat NPGO's) di beberapa negara telah dimulai sejak tahun 1996. Meskipun demikian penerapan *balanced scorecard* tersebut bukanlah tanpa masalah. Organisasi sektor publik pada umumnya telah menetapkan visi, misi dan telah melengkapinya dengan serangkaian program-program tertentu. Meskipun demikian mereka tidak berusaha untuk mewujudkan keluaran (*outcome*) secara jelas. Sebagian besar organisasi sektor publik telah berusaha merealisasikan misinya dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara lebih efisien dan memperkenalkan beberapa inisiatif yang menekankan pada perbaikan proses. Akan tetapi jarang sekali organisasi sektor publik yang memfokuskan pada strategi penting yang dapat dieksekusi, seperti kepemimpinan produk (*product leadership*) dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan (*customer intimacy*).

Penerapan *balanced scorecard* pada organisasi sektor publik memerlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Hal ini terjadi karena organisasi publik mempunyai perbedaan dengan organisasi profit dalam banyak area kegiatan, yang meliputi perbedaan dalam

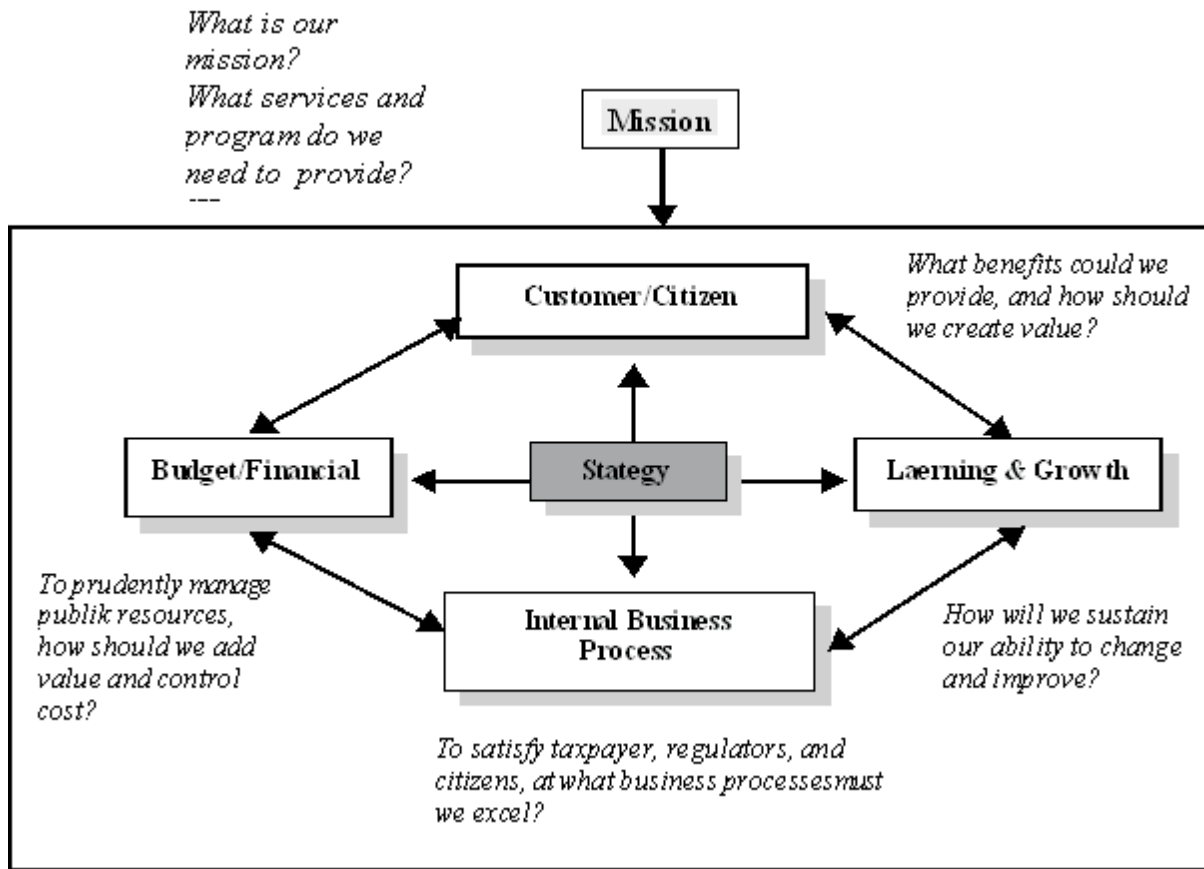
strategi, keberagaman *stakeholder*, pendefinisian keberhasilan, kriteria keberhasilan, dan kriteria kinerja

keuangan. Perbedaan tersebut oleh Averson (1999) dinyatakan sebagai berikut.

Faktor Pembeda	Organisasi Profit	Organisasi Sektor Publik
1. Sasaran stratejik umum	Daya saing	Efektivitas misi
2. Sasaran keuangan umum	Laba, pertumbuhan, pangsa pasar	Pengurangan biaya, efisiensi
3. Nilai-nilai	Inovasi, kreativitas, <i>goodwill</i> , penghargaan	Akuntabilitas pada publik, integritas, dan keadilan.
4. <i>Outcome</i> yang diharapkan	Kepuasan pelanggan	Kepuasan pelanggan
5. Stakeholders pemilik, pasar	<i>Pemegang saham, Menteri, dan dalam hal-hal</i>	<i>Masyarakat, DPR, Presiden, tertentu penyedia jasa antara</i>
6. Pelanggan	Penerima barang dan jasa secara langsung	Kadang-kadang penerima tidak langsung dari keluaran organisasi
7. Penentu prioritas anggaran	Permintaan pelanggan	Kepemimpinan, pembuat UU, perencana
8. Faktor kunci sukses	Pertumbuhan, laba, pangsa pasar	Praktik manajemen terbaik

Sejumlah penyesuaian perlu dilakukan dalam menerapkan konsep *balanced scorecard* pada organisasi sektor publik mengingat perspektif keuangan, misalnya, bukan merupakan *ultimate goal* seperti yang terjadi pada perusahaan swasta. Pada sektor publik, perspektif keuangan lebih cenderung memberikan batasan ketimbang tujuan. Organisasi sektor publik umumnya harus membatasi pengeluaran sesuai dengan jumlah yang dianggarkan, oleh karena itu perspektif keuangan disubstitusi menjadi istilah perspektif *budget* (BPKP, 2002). Meskipun demikian keberhasilan sektor publik tidaklah diukur semata-mata dari efisiensi pengeluaran atau bagaimana menjaga

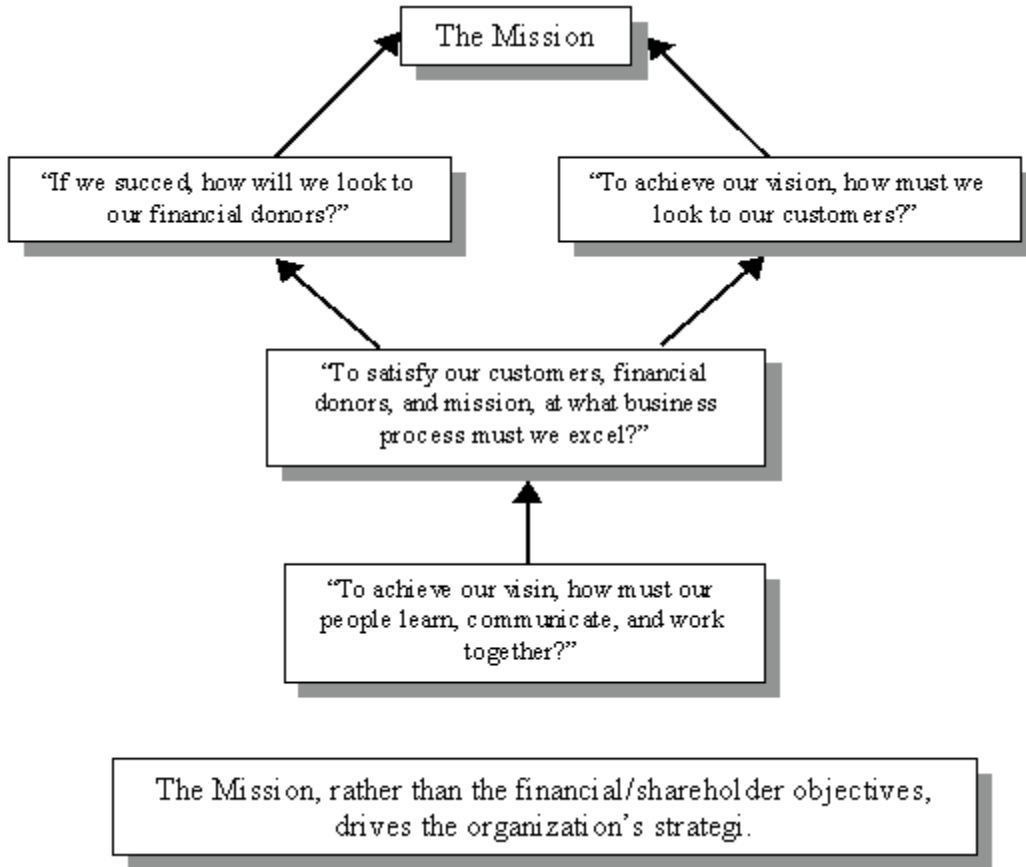
pengeluaran sesuai dengan anggaran, akan tetapi seberapa efektif dan efisien organisasi dalam memenuhi visi dan misinya yaitu melayani publik. Dalam organisasi publik, perspektif *customer* diperluas menjadi perspektif *citizen* dengan pertimbangan bahwa organisasi publik harus memberikan *benefit* bagi masyarakat luas. Dalam kerangka *balanced scorecard*, perspektif *customer/citizen* ini dipandang sebagai *ultimate goal* dengan tanpa mengabaikan perspektif yang lain. BPKP (2002) menggambarkan perspektif dalam *balanced scorecard* untuk organisasi sektor publik pada gambar berikut ini.



Kaplan & Norton (2001) mengatakan bahwa sebagian besar NPGO's mengalami kesulitan dalam menerapkan *balanced scorecard* yang menempatkan perspektif keuangan dalam hierarki yang teratas (puncak). Mereka menganggap bahwa sukses finansial bukanlah tujuan utama, sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang dengan menempatkan perspektif pelanggan/masyarakat pada hierarki puncak. Pada perusahaan swasta, pelanggan memainkan dua peran yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai pembayar/pemberi dan penerima jasa. Dalam organisasi non profit, sumber-sumber finansial berasal dari donor yang tidak hanya pelanggan tetapi juga yayasan dan lain-lain, sedangkan penerimanya adalah semua komponen bangsa yang

sekaligus sebagai pelanggan. Oleh karena itu kerangka penyusunan *balanced scorecard* untuk NPGO's menempatkan donor dan penerima jasa pada tempat yang sejajar. Mereka mengembangkan tujuan organisasi dari donor dan penerima, kemudian mengidentifikasi proses internal yang diharapkan dapat memberikan nilai kepada kedua kelompok pelanggan tersebut (yaitu donor dan penerima). Penempatan tujuan organisasi pada hierarki puncak *balanced scorecard* dimaksudkan agar dapat mengomunikasikan secara jelas misi jangka panjang organisasi tersebut. Gambar berikut ini merupakan modifikasi kerangka *balanced scorecard* untuk organisasi non profit.

Kerangka *Balanced Scorecard* pada Organisasi Nonprofit



Untuk dapat memberikan gambaran secara aktual tentang penerapan *balanced scorecard* pada organisasi sektor publik, berikut ini diberikan contoh kasus Legal Aid Commission (LAC) di New South Wales, Australia (BPKP, 2001). LAC merupakan sebuah lembaga yang menyediakan bantuan hukum dan jasa hukum lainnya sehubungan pemberlakuan Undang-undang (UU) LAC. Dalam menjalankan fungsinya, UU LAC merinci tugas yang harus dilaksanakan LAC untuk

memenuhi fungsinya. Sebagai contoh: LAC harus memastikan bahwa bantuan hukum diberikan dengan efektif, efisien dan ekonomis; LAC diminta untuk memperhatikan kebutuhan akan bantuan hukum yang mudah diperoleh bagi masyarakat kurang mampu di New South Wales. Penekanan ditempatkan pada pelatihan dan penyebaran informasi, untuk memastikan bahwa penduduk memahami hak-hak mereka.

**Penerapan *Balanced Scorecard* pada Instansi Pemerintah
(Kasus Legal Aid Commission di New South Wales, Australia)**

Visi : menjadi Komisi Bantuan Hukum terkemuka di Australia dan model yang sempurna dalam manajemen dan pemberian layanan sektor publik.
Misi : untuk membantu orang-orang tidak mampu memahami, melindungi, dan menggunakan hak dan kepentingan hukumnya dengan meningkatkan akses kepada sistem hukum dan mendorong digunakannya

Stakeholder/Financial

Untuk mencapai Visi/Misi, bagaimana LAC akan dilihat oleh stakeholdernya?

- Sumber daya digunakan secara efisien;
- Tidak ada duplikasi layanan bantuan hukum;
- Stakeholder memandang biaya layanan LAC adalah wajar;
- Keputusan dibuat secara adil, sesuai kriteria, dan tepat waktu;
- Akses layanan hukum yang memadai untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.

Pelanggan

Untuk mencapai visi/misi, bagaimana LAC sebaiknya dilihat oleh kliennya?

- Informasi umum jelas dan mudah dipahami, mudah diakses dan selalu tersedia setiap saat;
- Klien menerima layanan advis dengan cepat, tepat, dan diberikan secara sederhana dan mudah dipahami;
- Keputusan dibuat secara adil, sesuai kriteria, dan tepat waktu.

Proses Internal

Untuk memuaskan stakeholders dan pelanggan, proses internal apa yang dilakukan LAC dengan sangat baik?

- Sistem dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan pegawai merespon pelanggan secara tepat waktu;
- Pegawai spesialis hukum yang terakreditasi dan berkualitas tinggi;
- Staf pendukung telah mengikuti pelatihan pelanggan;
- Sistem dan metodologi yang canggih untuk penerimaan, pemutusan, dan administrasi permohonan;
- Sistem keuangan yang efisien dalam pembayaran praktisi swasta.

Inovasi

Untuk mencapai visi/misi, proses baru dan kompetensi apa yang dibutuhkan pegawai LAC di masa depan?

- Lingkungan kerja yang positif;
- Identifikasi tren yang muncul dalam masalah sosial dan hukum yang akan mempengaruhi persyaratan bantuan hukum;
- Identifikasi jasa baru untuk memberikan layanan yang komprehensif;
- Pengetahuan atas model hukum dan administrasi.

**Contoh Hipotesis *Balanced scorecard* untuk Instansi Pemerintah
(Kasus Legal Aid Commission di New South Wales, Australia)**

<i>Perspektif Stakeholders/Financial</i>			
Faktor Kritisal Keberhasilan	Tujuan Strategik	Ukuran Kinerja	Target
Pemakai sumber daya yang efisien dan efektif	Memantau biaya-biaya pemberian jasa terhadap praktik-praktik terbaik (<i>best practice</i>)	Biaya per advis yang diberikan (dirinci per jenis hukum)	\$ x advis via telepon \$ x per layanan tatap muka
		Biaya rata-rata layanan advis sendiri (<i>in-house</i>) dan layanan yang dikontrakkan ke pihak lain	Biaya <i>in-house</i> dan yang dikontrakkan seimbang
		Biaya layanan <i>in-house</i> dibandingkan dengan biaya sektor swasta untuk layanan yang sejenis	Biaya <i>in-house</i> berada dalam kisaran x % dari nilai tengah biaya sektor swasta (<i>best practice</i>)
		Biaya per kasus hukum yang dimenangkan melalui litigasi, mediasi, atau pemberian advis.	Pengurangan biaya tahunan sebesar x % untuk setiap kategori .
	Mendorong penggunaan "Alternate Dispute Resolution" (ADR) untuk menghemat biaya.	Proporsi penggunaan ADR aktual dibandingkan total kasus yang seharusnya dapat menggunakan ADR	Y % dari penggunaan ADR aktual dibandingkan total potensi penggunaan ADR.
Berkurangnya ketergantungan	Meningkatkan perolehan <i>fee</i> dari klien yang mampu melalui penilaian atas membayarnya.	Proporsi pengeluaran yang dibiayai dari <i>fee</i> .	Pengurangan proporsi sebesar x % atas pengeluaran yang dibiayai dana pemerintah
Layanan yang mudah diakses dan tersedia setiap saat.	Menciptakan kepedulian publik atas cakupan dan mutu layanan melalui publikasi.	Rasio orang tidak mampu yang dilayani atas seluruh populasi orang yang tidak mampu	Kenaikan sebesar x % dari orang tak mampu yang mengakses layanan hukum LAC.

<i>Perspektif Pelanggan</i>			
Faktor Kritisal Keberhasilan	Tujuan Stratejik	Ukuran Kinerja	Target
Advis yang akurat, relevan dan tepat waktu.	Pemantauan terus menerus atas layanan advis untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu layanan.	% masalah yang diselesaikan dengan memuaskan klien pada sekali kunjungan/ hubungan.	Sebesar x % masalah diselesaikan dengan memuaskan klien pada sekali kunjungan/hubungan
		% masalah dimana klien harus mengulang kunjungan /hubungan.	Kurang dari x % kunjungan/hubungan ulangan
		% keluhan yang diterima sehubungan dengan advis yang diterima klien.	Rasio keluhan kurang dari x %.
		Kepuasan pelanggan atas kualitas advis dan ketepatan waktunya.	Indeks kepuasan pelanggan sebesar y.

<i>Perspektif Proses Internal</i>			
Faktor Kritisal Keberhasilan	Tujuan Stratejik	Ukuran Kinerja	Target
Layanan tepat waktu perjanjian dibuat dalam jarak waktu yang wajar.	Memantau permintaan jasa untuk memastikan ketersediaan layanan pegawai.	Rata-rata dan nilai tengah dari waktu tunggu untuk perjanjian pertama.	Rata-rata waktu tunggu sebesar x hari; sebesar z % perjanjian dibuat lebih cepat dari standar tersebut.
		Jumlah telepon yang dibatal kan dibanding seluruh telepon yang masuk ke nomor layanan.	Telepon batal lebih kecil daripada x % dari seluruh telepon masuk.
		Proporsi waktu tunggu telepon.	x % dari telepon masuk dijawab dalam satu menit y % dari telepon masuk dijawab antara satu s/d lima menit. z % dari telepon masuk dijawab lebih dari 5 menit.

Pegawai yang bermutu tinggi dan terlatih.	Memantau proses perekrutan dan seleksi untuk menghasilkan pegawai bermutu tinggi.	Proporsi pejabat hukum dengan sertifikat tanpa batasan.	Sebesar x % dari pejabat hukum memiliki sertifikat tanpa batasan.
		Proporsi pejabat hukum berstatus spesialis yang terakreditasi.	Sedikitnya x % dari pegawai lapangan memenuhi standar kompetensi.
	Pengembangan pegawai hukum untuk memukhtahirkan pegawai lapangan dan meningkatkan pengetahuan mereka dengan perubahan dan	Proporsi pegawai hukum yang menghadiri pelatihan kantor sendiri atau kursus terakreditasi.	Seluruh pegawai memiliki x jam pelatihan profesional
		Biaya pelatihan per pegawai profesional.	Biaya pelatihan sebesar x % dari biaya gaji pegawai profesional.
Informasi yang mutakhir atas kasus-kasus hukum dan peraturannya.	Pangkalan data berbasis <i>Personal Computer</i> untuk menyediakan informasi lengkap.	Ketersediaan sistem (<i>down time</i>) per periode kerja.	Pangkalan data tersedia bagi pegawai lebih besar dari x % waktu yang dibutuhkan.
		Selang waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan aturan dan kasus hukum baru kedalam pangkalan data	Seluruh aturan dan kasus hukum baru telah diinput dalam sistem dalam x jam per hari setelah data diinput.
		Proporsi pegawai terlatih menggunakan sistem pangkalan data.	Seluruh pegawai dibagian advis telah dilatih menggunakan sistem. Pegawai baru telah dilatih menggunakan sistem baru dalam x hari setelah melaksanakan tugas di bagian advis.
		Jumlah keluhan pegawai berkaitan dengan ketiadaan informasi database.	Sebelum akhir tahun, tidak ada keluhan atas kelengkapan informasi di database

	Benchmark terhadap database sejenis pada kantor hukum swasta atau komisi bantuan hukum di negara bagian lain.	Perbandingan standar kelengkapan dan waktu akses dengan 3 kantor hukum swasta dan komisi sejenis di negara bagian lain di Australia.	Mencapai x % dari standar kantor/komisi yang menjadi <i>benchmark</i> .
Pegawai yang puas.	Menciptakan budaya partisipasi dan lingkungan yang profesional.	Indeks kepuasan pegawai.	Sebesar x % dari pegawai meranking nilai tempat kerja LAC dengan "amat baik".

Perspektif Inovasi			
Faktor Kritis Keberhasilan	Tujuan Strategik	Ukuran Kinerja	Target
Cakupan layanan yang <i>up to date</i> dan adanya cara baru dalam memberikan layanan.	Kembangkan layanan baru guna memenuhi tuntutan yang berkembang dalam masalah sosial dan hukum.	Jumlah layanan baru yang diperkenalkan.	Sebelum akhir tahun, memperkenalkan sedikitnya x layanan baru.
	Identifikasi peningkatan teknologi baru dalam memberikan jasa yang efisien.	Jumlah peningkatan teknologi yang diperkenalkan.	Sebesar x peningkatan setiap tahun.
Lingkungan kerja yang profesional untuk mempertahankan pegawai.	Lingkungan kerja yang <i>up to date</i> dalam hal ruang dan peralatan bagi staf profesional.	<i>Benchmark</i> ruang dan peralatan dengan tiga kantor hukum swasta terkenal.	Sebelum akhir tahun depan lingkungan kerja sudah sebanding dengan kantor hukum swasta.
Tempat kerja yang aman dan sehat.	Memberikan pelatihan kepada pegawai dalam menangani klien yang agresif.	Proporsi anggaran pelatihan penanganan klien.	Sebesar x % dari dana pelatihan digunakan untuk dana pelatihan klien.
		Proporsi pegawai yang telah dilatih.	Sedikitnya x % dari pegawai lapangan telah dilatih.
		Jumlah nilai klaim kompensasi.	Kurang dari x klaim per 1.000 jam kontak klien.

Di Indonesia, pengukuran kinerja dengan pendekatan *balanced scorecard* belum diterapkan pada sector publik khususnya instansi pemerintah. Namun demikian dengan pemberlakuan Inpres No. 7 Tahun

1999, pendekatan *balanced scorecard* pada instansi pemerintah sangat mungkin untuk diterapkan.

Inpres No. 7 tahun 1999 merupakan upaya untuk melakukan perbaikan di lingkungan pemerintah. Inpres

tersebut berisi tentang kewajiban instansi pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya secara mandiri. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kesadaran bahwa sudah seharusnya instansi pemerintah berakuntabilitas terhadap kinerjanya. Inpres tersebut pada dasarnya menginstruksikan bahwa para pejabat publik mulai eselon II agar mewujudkan akuntabilitasnya dengan didahului pembuatan rencana strategis (renstra), yang akan digunakan sebagai acuan dalam tindak kegiatannya. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada maupun yang mungkin terjadi. Renstra dengan demikian harus mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Melalui renstra tersebut diharapkan terjadi reformasi di bidang penganggaran dari *incremental basis* menjadi berdasar *program budgeted system*. Demikian pula dalam mengekspresikan kinerjanya, suatu instansi pemerintah yang selama ini lebih menonjolkan pencapaian target fisik (*output*) dan keuangannya, diarahkan agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang dimaksud dalam Inpres di atas merupakan sistem yang menyelaraskan perencanaan strategik dengan sistem pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kemajuan program suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik. Sistem akuntabilitas kinerja meliputi tiga tahapan utama yang membentuk siklus tidak terputus, yaitu:

1. Membuat perencanaan kerja atau menetapkan target yang ingin dicapai. Sebelum mengukur kinerja, terlebih dahulu harus menyusun rencana kinerja yang meliputi mendefinisikan visi, misi, dan hasil (*outcome*); menetapkan tujuan *strategik* (*strategic objectives*) yang diinginkan; dan menetapkan indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) untuk setiap tujuan strategik.
2. Mengukur pencapaian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah diperoleh dikaitkan dengan tujuan/sasaran yang telah

ditetapkan, dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dan rencana kinerja yang telah disusun. Tahapan ini dimulai dengan menetapkan sistem pengukuran kinerja, melaksanakan kegiatan dan mengukur pencapaian kinerja, dan melaporkan capaian kinerja.

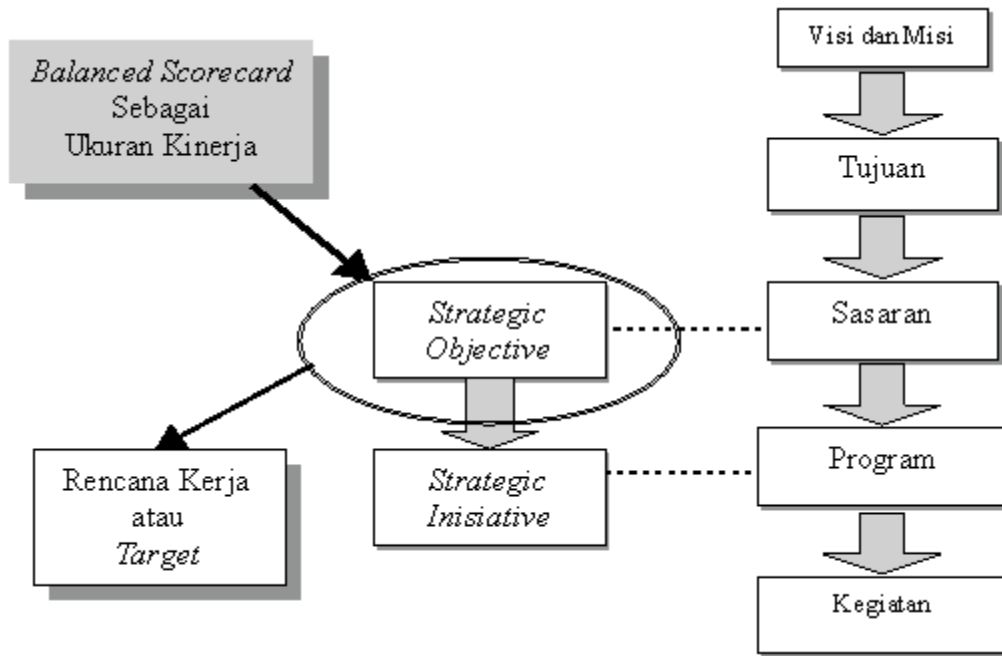
3. Mengevaluasi kinerja dan menggunakan hasilnya. Capaian kinerja akan digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui kegiatan evaluasi kinerja.

Dari ketiga tahapan tersebut dapat dikatakan bahwa bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja adalah **sistem pengukuran kinerja**, yang memungkinkan dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dan rencana kinerja sehingga dapat diidentifikasi adanya celah kinerja. Celah kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai perbaikan kinerja organisasi dalam proses pencapaian tujuan/sasaran yang ditetapkan. Terdapat tiga kegiatan utama dalam sistem pengukuran kinerja, yaitu:

1. Menetapkan dan menentukan indikator kinerja untuk setiap tujuan/sasaran strategik.
2. Menetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada setiap tujuan/sasaran strategik.
3. Mengukur dan melaporkan capaian kinerja dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan bagi perbaikan kinerja.

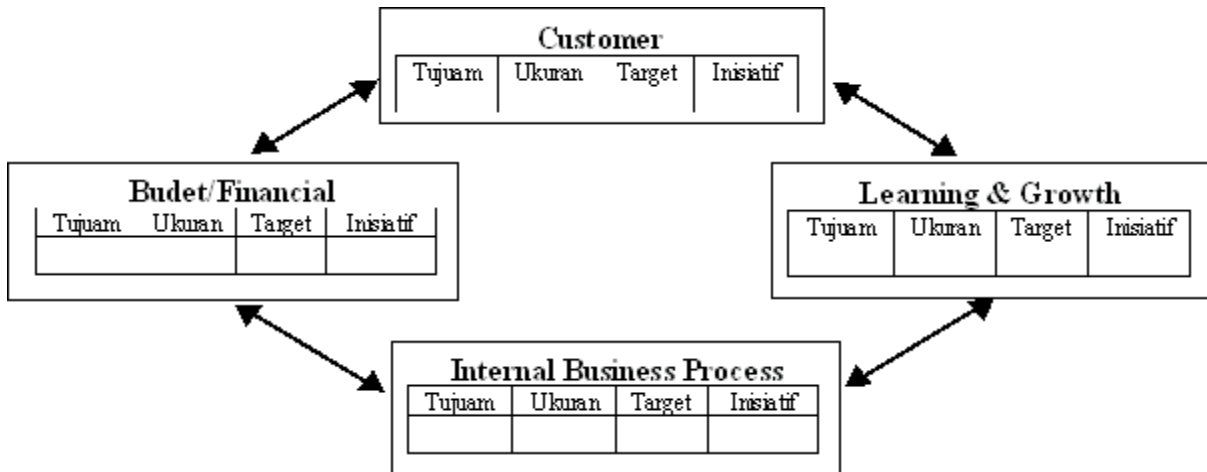
Visi dan Misi

Melihat sistem pengukuran kinerja tersebut maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat menyeimbangkan pengukuran kinerja tujuan/strategi organisasi ke sejumlah sisi strategik organisasi dan kemudian menyelaraskan visi misi organisasi. Salah satu pendekatan konseptual yang memenuhi kriteria tersebut adalah *balanced scorecard*. Jika diterapkan secara benar, pendekatan *balanced scorecard* dapat menjamin ditranslasikannya visi misi organisasi menjadi aksi nyata untuk kemudian diukur keberhasilan pencapaiannya ke sebuah perspektif organisasi secara berimbang. Esensi sistem pengukuran kinerja ada pada setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu *balanced scorecard* secara ideal dapat diterapkan pada siklus akuntabilitas kinerja. *Balanced scorecard* dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan pada gambar berikut ini.



Dengan posisi *balanced scorecard* tersebut maka setiap perspektif dalam *balanced scorecard* terdapat suatu tujuan (*strategic objectives*), yang berisi tentang strategi apa yang harus dicapai dan apa faktor kunci keberhasilannya; ukuran kinerja (*performance measure*), yang berisi tentang bagaimana kesuksesan itu diukur; target atau rencana kerja (*performance plan*),

yang merupakan harapan atau ekspektasi kinerja; dan kegiatan/program (*initiative*), yang merupakan realisasi program (*action program*) yang harus dilakukan supaya tercapai tujuan. Secara lebih jelas perspektif dalam *balanced scorecard* untuk instansi pemerintah dapat didisain seperti pada gambar berikut ini.



SIMPULAN

Berbeda dengan alat pengukur kinerja yang lain, *balanced scorecard* merupakan suatu alat pengukur kinerja yang efektif karena mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja baik kinerja keuangan maupun non keuangan. *Balanced scorecard* tidak hanya memfokuskan diri pada pencapaian tujuan finansial dan jangka pendek tetapi juga memperhatikan tujuan non finansial dan jangka panjang. Dengan pendekatan *balanced scorecard*, suatu kinerja diukur dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Pendekatan *balanced scorecard* mulai dikenal pada tahun 1992 dan telah diterapkan oleh beberapa perusahaan di dunia. Dalam perkembangannya,

pendekatan ini tidak hanya dapat diterapkan pada organisasi yang berorientasi laba tetapi juga pada organisasi non laba bahkan pada instansi pemerintah. Di Indonesia, peluang untuk menerapkan pendekatan *balanced scorecard* pada sektor publik (instansi pemerintah) cukup besar sejak ditetapkannya Inpres No. 7 Tahun 1999 yang berisi tentang kewajiban penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi unit-unit eselon II. Salah satu bagian dari LAKIP tersebut adalah pengukuran kinerja.

Penerapan pendekatan *balanced scorecard* pada sektor publik bukanlah tanpa masalah. Organisasi sektor publik pada umumnya telah menetapkan visi, misi dan telah melengkapinya dengan serangkaian program-program tertentu, akan tetapi tidak ada usaha untuk mewujudkan keluarannya (*outcome*) secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Averson, Paul, 1999, *Translating Performance Metrics from The Private to Public Sector*.
- Bambang Sudibyo, 1997, "Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Balanced Scorecard: Bentuk, Mekanisme, dan Prospek Aplikasinya pada BUMN", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, FE UGM, Vol. 12, No. 2.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- BPKP, 2001, *Performance Audit Project: Pengukuran Kinerja dan Peningkatan Kinerja*, Jakarta.
- , 2002, *Penerapan Balanced Scorecard dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja: Studi Kasus pada Deputi pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas BPKP*, Jakarta.
- <http://www.bscd4gov.com/government.htm>, diakses tanggal 1 September 2002.
- Kaplan, R. S & Norton, D. P., 1996, *The Balanced Scorecard: Translating Strategi into Action*, Boston, MA: Harvard Business School Press.
- , 2001, "Transforming The Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part I", *Accounting Horizons*, Vol. 15, No. 1, March.
- Saptono, Laurentius dan Widanarto, 2002, "Penerapan Balanced Scorecard dalam Lembaga Pendidikan Tinggi: Suatu Tanggapan", *Antisipasi*, FE USD Vol. 6 No. 2.

Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2000, *Pengukuran Kinerja*, Jakarta.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Akuntansi & Manajemen

Format Penulisan

1. Naskah adalah hasil karya penulis yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
3. Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (8.5 x 11 inch.) dengan jarak 2 spasi pada satu permukaan dan diberi nomor untuk setiap halaman.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan batas margin minimal 1 inch untuk margin atas, bawah, dan kedua sisi.
5. Halaman pertama harus memuat judul, nama penulis (lengkap dengan gelar kesarjanaan yang disandang), dan beberapa keterangan mengenai naskah dan penulis yang perlu disampaikan (dianjurkan dalam bentuk *footnote*).
6. Naskah sebaiknya diawali dengan penulisan abstraksi berbahasa Indonesia untuk naskah berbahasa Inggris, dan abstraksi berbahasa Inggris untuk naskah berbahasa Indonesia. Abstraksi berisi *keyword* mengenai topik bahasan, metode, dan penemuan.
7. Penulisan yang mengacu pada suatu referensi tertentu diharuskan mencantumkan *bodynote* dalam tanda kurung dengan urutan penulis (nama belakang), tahun, dan nomor halaman. Contoh penulisan:
 - a. Satu referensi:
(Kotler 1997, 125)
 - b. Dua referensi atau lebih:
(Kotler & Armstrong 1994, 120; Stanton 1993, 321)
 - c. Lebih dari satu referensi untuk penulis yang sama pada tahun terbitan yang sama:
(Jones 1995a, 225) atau (Jones 1995b, 336; Freeman 1992a, 235)
 - d. Nama pengarang telah disebutkan dalam naskah:
(Kotler (1997, 125) menyatakan bahwa
 - e. Referensi institusi:
(AICPA Cohen Commission Report, 1995) atau (BPS Statistik Indonesia, 1995)
8. Daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis tanpa nomor urut. Contoh penulisan daftar pustaka:

Kotler, Philip and Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, Seventh Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1996

Indriantoro, Nur. "Sistem Informasi Strategik; Dampak Teknologi Informasi terhadap Organisasi dan Keunggulan Kompetitif." *KOMPAK* No. 9, Februari 1996; 12-27.

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review* (Summer 1994): 57-67.

Paliwoda, Stan. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince., 1994.

Prosedur Penerbitan

1. Naskah dikirim dalam bentuk *print-out* untuk direview oleh *Editors JAM*.
2. Editing terhadap naskah hanya akan dilakukan apabila penulis mengikuti kebijakan editorial di atas.
3. Naskah yang sudah diterima/disetujui akan dimintakan *file* naskah dalam bentuk disket kepada penulis untuk dimasukkan dalam penerbitan JAM.
4. Koresponden mengenai proses editing dilakukan dengan *Managing Editor*
5. Pendapat yang dinyatakan dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi, tidak mencerminkan pendapat redaksi atau penerbit. Surat menyurat mengenai permohonan ijin untuk menerbitkan kembali atau menterjemahkan artikel dan sebagainya dapat dialamatkan ke *Editorial Secretary*.